UNRIKAPress

MEMBACA INDONESIA

DARI KACAMATA BATAM

ADE P NASUTION

ADE P. NASUTION

MEMBACA INDONESIA

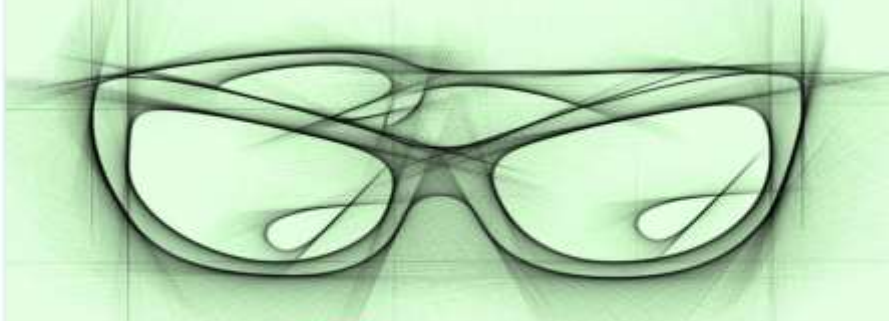

DARI KACAMATA BATAM

UNRIKAPress

MEMBACA INDONESIA DARI KACAMATA BATAM

ADE P. NASUTION

Penerbit UNRIKAPress, Batam

MEMBACA INDONESIA DARI KACAMATA BATAM

Penulis : Ade Parlaungan Nasution
ISBN : 978-602-74687-0-2
Editor : Muhammad Natsir Tahar
Layout : Aura Diah Meitasari
Desain Sampul : Mahfut Azhari

Penerbit : UNRIKAPress
Gedung F, Kampus Universitas Riau Kepulauan
Jln. Batuaji Baru No.99 Batuaji, Kota Batam 29424
Telp.(0778) 392752 e-mail : unrikapress@unrika.ac.id
Website : www.unrikapress.unrika.ac.id

Cetakan Pertama , Agustus 2016
17x24 cm, xxi, 255 Halaman
1.Ekonomi 2. Sosial Budaya 3. Pasar Bebas 4. Kebijakan Pemerintah
5. Globalisasi

Dicetak oleh : PT. Tambun Djaya Printama
Griya Permai Blok AA No. 2 Sei Binti. Sagulung Kota Batam
Telp. (0778) 392373 e-mail : tambundjayaprintama@gmail.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama, dan paling utama, saya mengucapkan Syukur kepada Allah SWT. Yang atas Kuasa-Nya saya masih diberi nikmat berfikir, nikmat menulis dan nikmat menjalani hidup.

Buku yang hadir kehadapan khalayak ini yang berjudul "***Melihat Indonesia dari Kacamata Batam***" adalah hasil kompilasi dari berbagai artikel/tulisan baik yang pernah dipublikasikan di media massa, blog pribadi saya http://adenasution.com maupun hasil-hasil penelitian dan survey yang dilakukan dan tentu saja nuansanya kental dengan permasalahan kota Batam.

Seperti kita ketahui, referensi tentang Batam yang ditulis oleh orang Batam sendiri masih cukup jarang dan saya berharap, setidaknya buku sederhana ini dapat menjadi tambahan referensi/rujukan bagi khalayak ramai untuk lebih mengerti denyut nadi dan segala macam persoalan kota Batam terutama dalam bidang persoalan ekonomi, tenaga kerja, dan sosial budaya.

Buku ini merupakan buku pertama saya, dan ternyata membuat buku adalah hal yang sulit dan rumit. Namun kalimat Pramoedya Ananta Toer sering terngiang ditelinga "menulis adalah bekerja untuk keabadian" yang memotivasi untuk menulis dan menulis. Dan ini sudah terbukti, banyak tokoh-tokoh yang sudah wafat, namun "namanya" sering disebut, dikutip, diperdebatkan terlepas pro atau kontra, namun semuanya membuktikan bahwa tokoh tersebut masih tetap "hidup".

Buku ini terwujud atas bantuan dan kerja keras dari sahabat saya, **Muhammad Natsir Tahar**, seorang esais, budayawan batam sekaligus pengelola Rumah Penerbit Focus Publishing Intermedia yang secara sukerala menjadi editor dan ikut berkontribusi dalam buku ini lewat beberapa tulisan yang menarik.

Saya dan Bung Natsir adalah teman lama sekaligus juga mitra setia dalam berbagai forum diskusi dan perdebatan, terkadang satu arah dan satu pandangan namun tak jarang saling berlawanan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan hanya Tuhan lah yang mampu membalas budi baiknya.

Ucapan Terima kasih saya sampaikan dengan hormat kepada Orang tua saya **Dr. H. Amarullah Nasution** yang mengajarkan saya keberanian dan keseriusan juga tentunya atas support beliau pada pendanaan dalam penerbitan buku ini, dan kepada Ibu saya **Alm. H. Tardiah Nasution** yang berkat cinta kasihnya dan penderitaannya agar anak-anaknya mampu menegakkan kepala menghadapi dunia ini.

Kepada **Prof. Dr.H. Zainudin,M.Pd** selaku Rektor Universitas Riau Kepulauan Batam yang merupakan tempat saya mencari sesuap nasi. Atas desakan beliau yang memaksa supaya cepat-cepat menyelesaikan program doktor dan mengejar gelar guru besar, membuat saya tercambuk untuk menghasilkan karya berupa buku. terima kasih atas dukungan dan arahannya Prof. !!

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan untuk sahabat-sahabat saya sepertengkaran dalam berbagai diskusi dan debat antara lain Bung Ryan Jatnika, Tain Komari, Eliaki Gulo, Edy Burmansyah, Yudi Kurnain, Yudi Saputra dan sahabat-sahabat saya lainnya yang tidak bisa

saya sebut satu persatu. Dari berbagai hasil diskusi yang terkadang berapi-api dan terkadang penuh emos dengan sahabat-sahabat ini terkadang muncul ide atau gagasan untuk menulis.

Tak lupa juga, Terima kasih untuk Rekan-rekan seperjuagan di Kampus UNRIKA Batam terutama Adinda Edwin Agung Wibowo, Bung Rahmat Riyandi, Mas Farid Setyobudi, Uni Mira Yona, Ramon Zamora dan rekan lainnya yang tak bias disebut satu persatu, yang setiap hari kita berdiskusi dan mengerenyitkan kening.

Yang terakhir dan yang terutama adalah terima kasih tulus ikhlas kepada sang istri yang setia dan paling memahami, **Eva Dewi Melinda**, yang senyum dan kopi buatannya kerap melahirkan ide-ide kreatif. Dan juga untuk Ananda **Denny Ammari Ramadhan Nasution, Aura Diah Meitasari Nasution dan Rizky Amalina Nasution**, untuk kalianlah perjuangan ini.

Semoga buku ini bermanfaat. Amin.

Batam, Mei 2016

Ade Parlaungan Nasution

PENGANTAR EDITOR

Gempita pembangunan Batam hari ini adalah proses hampir empat dasawarsa yang sibuk. Batam tidak tumbuh alami, ia begitu gegas tersulap dari kampung nelayan yang *genuine* menjadi cikal kota modern nan futuristik. Posisinya yang terdepan di jalur tersibuk Selat Philips adalah tuah yang melekat pada tanah Batam.

Namun mesin pembangunan yang hanya menggunakan satu mata pisau yakni Neo Kapitalisme, menciptakan paradoks bahkan kontradiksi. Problema sosial muncul sama dahsyatnya dengan ledakan populasi penduduk.

Pertumbuhan ekonomi terkatrol sangat signifikan, namun pemerataan sosial tertatih – tatih di belakangnya. Akhirnya tercipta *gap* antara borjuis dan jelata dalam posisi saling menyikut. Akan sangat mudah ditebak bahwa pemenangnya adalah borjuis kapitalis. Dengan kekuatan modal mereka merengkuh apa saja yang bernilai ekonomis dan ironisnya Pemerintah Indonesia membentangkan karpet merah untuk itu. Sedangkan kaum marjinal, penduduk lokal dan proletar yang sejatinya

adalah gerigi penting mesin – mesin indusrialisasi, terpinggirkan dan tereksploitasi sedemikan rupa.

Sang Penulis, Ade P Nasution yang menurut saya mampu melihat dari sisi lain dengan sangat cerdas memamerkan kepiawaiannya lewat tulisan – tulisan menggigit dalam buku ini. Untuk melihat dengan terang model pembangunan Indonesia yang menganut mazhab Pasar Bebas, kelemahan – kelemahannya langsung dapat ditelanjangi jika kita mengintipnya pada posisi agak ke sebelah Kiri. Kendati paham Sosialisme, Marxisme, Leninisme, Komunisme dan seterusnya mendapat stigma negatif secara berat sebelah, namun dalam dialektika keadilan sosial, produk – produk berpikir Neoliberalisme sangat layak untuk terus menerus digugat hingga mencapai taraf yang paling ideal.

Ade P Nasution secara gamblang mengangkat ke permukaan mazhab – mazhab ekonomi mulai dari Merkantilis Klasik, Neo Klasik, Marxis, Keynesian hingga Konsep Ekonomi Syariah sebagai rujukan untuk menyigi kebijakan pembangunan ekonomi nasional.

Penulis tidak hanya menyorot titik lemahnya, tapi juga menawarkan solusi dengan mengajak *stakeholder* dan pemangku kebijakan apapun untuk memberi laluan yang benderang kepada unit

usaha mikro dan koperasi yang memiliki semangat gotong – royong khas Indonesia. Konsep Ekonomi Kerakyatan yang dapat disempurnakan dengan pendekatan dogmatis, adalah “jalan damai” yang mesti ditempuh untuk menatap Indonesia sejarahtera di hari depan.

Batam adalah sebentuk miniatur yang merefleksikan wajah Indonesia. Kita dapat membaca Indonesia dengan menggunakan kacamata Batam. Esai – esai bernilai konstruktif dan mencerahkan dalam buku ini, yang kemudian dilengkapi dengan sumbangan tulisan dari saya sendiri karena kebetulan selalu ekuivalen dengan kerangka berpikir dan gaya bahasa Sang Penulis, mudah – mudahan dapat menjadi rujukan diskursus ekonomi Indonesia dan Batam khususnya. Selamat datang di lembar pembuka buku bermutu ini.

Wassalam.!

Muhammad Natsir Tahar

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH.....

PENGANTAR EDITOR.....

DAFTAR ISI.....

BAB I

EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN INDUSTRIALISASI

1. DE SOTO DAN EKONOMI INFORMAL.....
2. MORALITAS PASAR BEBAS.....
3. EKONOMI KULTURAL SEBAGAI KRITIK ATAS EKONOMI NEOKLASIK.....
4. EKONOMI INDONESIA YANG PENUH PARADOKS.....
5. QUO VADIS EKONOMI INDONESIA 2014 ?.....
6. EKONOMI KERAKYATAN KOTA BATAM
7. AMPERA DAN EKONOMI RAKYAT :ABSURDITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
8. SEPUTAR WTO (WORLD TRADE ORGANISATION)
9. EKONOMI PASAR : UNTUK SIAPA ?
10. ECONOMIC HITMAN
11. SISTEM EKONOMI INDONESIA : MENOLEHLAH KEBELAKANG !

12. USAHA KECIL DAN KOPERASI : TANGGUH NAMUN TERABAIKAN
13. MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH : SEBUAH PENGHARAPAN
14. THE DEATH OF ECONOMICS
15. NEOLIB, SANG MALAIKAT RUPAWAN
16. EKONOMI BATAM DALAM JAJAHAN AGEN NEOLIB

BAB 2

SOSIAL BUDAYA , MANAJEMEN DAN POLITIK

1. BUKU YANG “TERKUTUK”
2. PENTINGKAH COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ?
3. PUNGUTAN DONASI KOTA BATAM : POTRET KURANG OPTIMALNYA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
4. POTRET SEBARAN KEPENDUDUKAN DI PROPINSI KEPULAUAN RIAU
5. LAHAN, EKONOMI RENTE DAN KEADILAN EKONOMI
6. KARYA SASTRA DAN PEMBEBASAN MANUSIA
7. MASIH RELEVANKAH ISU KOMUNISME ?
8. SANG PERENCANA PEMBANGUNAN
9. MANAJEMEN MELAYU : ALTERNATIF DITENGAH ERA GLOBALISASI
10. CIVIL SOCIETY
11. TEORI KONSPIRASI
12. DEMONSTRASI ANTI WORLD BANK DAN IMF

13. DEMOKRASI DAN PEMIMPIN UTOPIS
14. FENOMENA POLLUX HABIBIE DAN WAJAH KOTA BATAM
15. FOBIA PALU ARIT DALAM KONTEKS KEKINIAN
16. SEJARAH BATAM DALAM ENIGMA ORANG-ORANG KOTA
17. BATAM DARI TITIK NOL KILOMETER
18. JEMBATAN BARELANG DAN TEORI BALON HABIBIE

BAB 3

KETENAGA KERJAAN

1. UPAH MINIMUM KOTA : ANTARA RETORIKA DAN KONSISTENSI
2. BURUH : SUATU TINJAUAN KEMBALI
3. BOLA LIAR UPAH MINIMUM
4. ISU POLITIK DAN EKONOMI DALAM PEMBAHASAN RANPERDA KETENAGAKERJAAN DI KOTA BATAM
5. MEMAHAMI HUBUNGAN BURUH – PENGUSAHA
6. POTRET TENAGA KERJA KOTA BATAM
7. MENCARI SOLUSI PENGUPAHAN YANG ADIL
8. KONDISI PENGUPAHAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DAFTAR BACAAN

TENTANG PENULIS

BAB I

EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN INDUSTRIALISASI

DE SOTO DAN EKONOMI INFORMAL

Adalah Hernando de Soto, seorang ekonom Peru, Amerika Latin yang menganalis tentang keberadaan sektor Ekonomi Informal serta permasalahanya yang dilakukannya di Peru, namun setelah bukunya terbit, *The Other Path, The Invisible Revolution in The Third Word*, ternyata mayoritas seluruh Negara yang tergolong kategori dunia ketiga memberikan apresiasi dan tanggapan positif bahwa persoalan ekonomi Informal di Peru ternyata sama saja di belahan dunia ketiga termasuk Indonesia baik objek maupun subjeknya. Menariknya lagi, analisis dan kesimpulan yang dibangun dalam bukunya tidak membedakan apakah negera tersebut Negara kapitalis ataupun Negara sosialis, atau apakah Negara jajahan Spanyol ataupun jajahan Inggris atau Belanda

Menariknya lagi, tulisan de Soto yang merupakan hasil penelitian yang intens yang pada akhirnya menyadarkan pemerintah Peru bahwa tulang punggung perekonomia Peru adalah sector ekonomi Informal bukan Pengusaha besar atau MNC.dan dengan

dukungan penuh dari pemerintah Peru, de Soto dan tim nya berhasil memfasilitasi pemberian status legalitas usaha terhadap 300,000 usaha ekonomi informal dan legalisasi terhadap lahan dan rumah mereka yang diikuti terbukanya akses perbankan untuk memperkuat sektor permodalan usaha melalui kredit perbankan yang jaminannya adalah sertifikat lahan dan rumah yang telah mereka terima..

Menurut de Soto, aktivitas ekonomi informal itu muncul sebagai jawaban atas mandeknya kesempatan mendapatkan legalitas hukum dan hambatan birokrasi. hal ini terjadi ketika legalitas hukum merupakan hak istimewa yang bisa diperoleh dengan akses politik dan ekonomi segelintir orang atau kelompok. Hambatan untuk memperoleh legalitas hukum dan pelayaan birokrasi ini menurut de soto adalah biaya transaksi yang sangat mahal harganya.

Padahal selama ini memurut pendapat umum mayoritas orang, ekonomi informal adalah suatu keadaan ekonomi yang terjadi sebagai dampak negatif dari sistem kapitalisme liberal sebagai akibat persaiangan usaha dan pasar bebas

Tentu saja pemikiran de Soto berbeda dengan pendapat beberapa kalangan terutama dari kelompok radikal baik sayap kiri maupun sayap kanan yang menganggap bahwa ekonomi informal muncul sebagai reaksi atas ketidakmampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pokok golongan penduduk kebanyakan yang dalam Bahasa masing-masing adalah inefisiensi versi kelompok kanan dan ketidakdilan versi kelompok kiri, namun de Soto tidak mau terjebak dalam kedua kelompok ini dan memandang secara fakta dan realitas penyebabbya adalah faktor teknis yaitu aturan hukum dan birokrasi bukan masalah ideologi.

Melalui penelitiannya di Peru sekitar tahun 1980-an, de Soto menemukan bahwa banyak kegiatan usaha di kota-kota besar di Peru tidak memiliki izin usaha. Data yang didapatkannya adalah bahwa 90 persen dari total usaha kecil, 82 persen dari total usaha transportasi di perkotaan, 60 persen dari total bisnis penangkapan ikan, serta 60 persen dari total usaha distribusi dan eceran yang ada di Peru, justru berasal dari sektor informal.

de Soto menyebutkan bahwa selama ini sektor informal yang sebagian besar adalah bercirikan usaha kecil menengah dan

perorangan. Usaha ini dikategorikan illegal karena tidak mengantomgi berbagai izin, tidak formal, menempati lahan terlarang dan dengan pendapatan yang rendah.Hal itu terjadi karena usaha-usaha mereka banyak dihambat oleh aturan birokrasi hukum dan sulitnya melakukan hubungan dengan pemerintah.

Kalaupun mereka berupaya untuk berhubungan dengan pemerintah dan mendapat pengakuan hukum serta legalitas harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.Biaya menjadi formal sangat mahal.Walaupun dengan risiko dikejar-kejar oleh aparat birokrasi dan hukum dan sangat sulit untuk berkembang.Bahkan selama ini mereka seperti hantu-hantu ekonomi yang tidak tersensus dan dan tidak diperhitungkan oleh pemerintah walaupun keberadaan meraka ada dan dapat dirasakan.

Pemikiran De Soto terfokus pada usaha ekonomi dalam kaitannya dengan aspek hukum dan birokrasi, yang pengaruhnya sangat nyata terhadap sistem ekonomi. Namun sekali lagi de soto membuat garis hitam putih, bahwa yang dimaksud usaha ekonomi adalah usaha ekonomi yang melibatkan semua penduduk didalamnya yang saling berinteraksi dengan cara saling menguntungkan. Ini juga

yang di kritik oleh de soto dengan apa yang disebutnya sebagai ekonomi merkantilisme yaitu suatu system ekonomi dimana suatu Negara dikendalikan oleh birokrasi dan peralatan hukum, yang menganggap bahwa membagi-bagi kekayaan nasional lebih penting daripada menambah besar kekayaan itu dan "membagi-bagi" menurut de Soto adalah membagikan hal monopoli atau kedudukan khusus pada kelompok tertentu yang hidup tergantung pada Negara.

Pendapat de soto diperkuat dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa penyusunan peraturan perundangan di berbagai dunia ketiga baik yang menyangkut masalah ekonomi dan perdagangan, kerap disusun berdasarkan keinginan kelompok tertentu yang sangat memungkinkan sebagian besar orang-orang harus terlempar dan tidak bias mengikuti aturan perundangan tersebut disamping itu juga system birokrasi dibuat berlapis-lapis dan sulit, sehingga tidak memungkan pelaku usaha kecil dapat menembusnya sebagaimana yang terlihat pada birokrasi perizinan instansi pemerintah dan birokrasi perbankan yang kaku dan menyulitkan.

Menariknya lagi, de Soto bukan seorang pembenci pasar bebas ataupun pendukung ekonomi sentalistik, sebagaimana yang

sering kita temukan dalam berbagai pemikiran ekonomi yang hanya mempunyai satu kutub, tetapi de Soto lebih mirip sebagai Anthony Giddens, yaitu yang sama-sama menawarkan “jalan tengah”. De Soto menganjurkan pemikiran untuk danya integrasi antara ekonomi formal dan informal yang dapat menciptakan kesempatan baik sektor informal maupun formal untuk berkembang menurut kaidah masing-masing, sebab hanya dengan demikian sumberdaya manusianya dapat dikembangkan baik energi maupun kreatrivitasnya.

Pendapat de Soto dalam Tulisan ini saya pikir sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini, sebab pembahasan masalah sector ekonomi informal ini sudah lama di teliti, di bahas, diseminarkan bahkan sudah ada yang menjadi peraturan perundangan, namun secara umum sifatnya parsial dan terpecah-pecah dan selalu berdasarkan permasalahan yang timbul dan musiman. Sedangkan persoalan ekonomi informal terus saja bergulir pada setiap kota di Indonesia. Persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini dalam sektor ekonomi informal adalah permasalahan rumah bermasalah, lahan pertanian yang tidak sah, pedagang kaki lima, industri rumah tangga, taksi gelap, becak,dan lain-lain yang rata-rata

menurut pemerintah, baik pusat maupun daerah adalah sebagai biang keladi penghambat pembangunan dan perusak keindahan kota. Dan ironiknya, belum ada satupun solusi yang adil dan sistematis dalam penanganan masalah ekonomi informal, yang ada hanya menghancukan dan memberangus keberadaan sektor ekonomi informal tersebut kalaupun ada pemerintah daerah yang berbaik hati, biasanya cukup hanya membiarkannya saja namun tanpa adanya perhatian yang serius.

Padahal secara faktual, sektor ekonomi informal adalah satu-satunya sektor ekonomi yang dapat bertahan dalam serbuan krisis ekonomi Indonesia tahun 1997 dan bahkan menurut menurut sumber pemerintah, sektor ekonomi Informal adalah katup penyelamat bangsa dimana pada saat itu setor usaha besar, konglomerasi dan MNC ambruk berjatuhan yang berakibat pada jatuhnya nilai rupiah dan bertambahnya pengangguran.

Dibawah pemerintahan presiden Indonesia baru, apa yang disampaikan de Soto setidaknya dapat menjadi referensi dan berharap dapat merubah paradigma dalam proses penyusunan berbagai peraturan-perundangan yang dapat mengintegrasikan

berbagai kepentingan, seperti kepentingan pasar bebas dengan kepentingan nasionalime, kepentingan pengusaha kakap dan kepentingan usaha kecil. Dan setidaknya, pendapat de Soto menunjukkan kepada kita bahwa masih ada jalan lain untuk memperbaiki ssstem ekonomi disamping jalan-jalan selama ini yang ditempuh oleh negara kita dan itu sangat mungkin…..

MORALITAS PASAR BEBAS

Tanpa kita sadari, kita sebenarnya telah masuk dalam lingkaran yang saling terangkai dalam apa yang kita namakan Pasar bebas. Pasar bebas, menurut definisinya merupakan suatu tatanan dunia baru yang di dalamnya masyarakat global akan disatukan dalam suatu sistem yang sama dan juga kemakmuran yang sama. Secara kelembagaan negara kita sejak lama telah menyepakati berbagai perjanjian pasar bebas baik bilateral maupun multilateral hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya perjanjian internasional mengenai pasar bebas (free trade area) yang secara teori dapat mendatangkan manfaat bagi negara-negara yang melaksanakannya

Bagi Indonesia khususnya, pasar bebas, secara kuantitatif telah mempunyai dampak yang positif terhadap berbagai sektor ekonomi seperti banyaknya berdiri perusahaan PMA, pembukaan lapangan kerja, kenaikan GDP dan PDRB, masuknya barang

konsumsi yang beragam dan bersaing, tersedianya tenaga-tenaga ahli internasional dan tentunya masuknya budaya baru bawaan pasar bebas seperti pola konsumsi dan gaya hidup.

Namun secara kualitatif, dampak pasar bebas terhadap kesejahteraan negara dan masyarakatnya sebagaimana yang diimpikan oleh Adam Smith, tampaknya belum dapat terwujud. Indikator-indikator menunjukkan bahwa keberadaan Perusahaan PMA/MNC hanya sebatas pada perekrutan tenaga kerja murah pada tingkat operator, derasnya serbuan produk pertanian dan industry kecil dari berbagai Negara lain justru telah menciptakan ribuan pengangguran-pengangguran baru di sektor pertanian, hak kekayaan intelektual (HAKI) yang menjadikan segalanya lebih mahal dan yang paling menakutkan adalah banyaknya muncul industri-industri besar yang bersifat substitusi impor yang bukan industri primer penghasil kebutuhan dalam negeri dan orientasi eksport murni.

Padahal, secara teori, pasar bebas dimaksudkan sebagai sebuah sistem ekonomi untuk memperbaiki sistem ekonomi yang tidak etis dan yang dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi dengan memberi kesempatan berusaha yang sama, bebas, dan fair

kepada semua pelaku ekonomi. Beberapa tindakan yang dianggap menghambat perdagangan yang kerap dipraktikkan di berbagai Negara seperti subsidi, Kuota, penetapan tariff, kebijakan politik dumping dan kebijakan-kebijakan yang memihak sekelompok keperntingan ekonomi dalam suatu Negara.

Walaupun banyak kalangan menilai dengn resah, bahwa pasar bebas adalah suatu yang tidak etis, tidak bermoral dan tidak mempunyai keadilan yang biasanya disurakan oleh para penentang pasar bebas di Negara-negara dunia ketiga. Namun, menurut para pendukung pasar bebas, pasar bebas adalah suatu sistem perdagangan yang digali dari pemikiran etis filosofis Adam Smith, seorang ahli ekonomi dan Filsuf kelahiran Scotlandia. Lewat bukunya Wealth of Nation, Smith menekankan perlunya moralitas dan etis dalam suatu pasar bebas yang meliputi keadilan, kesetaraan dan minimnya campur tangan pemerintah.

Pasar bebas, seperti produk-produk peradaban lainnya terutama yang diimport dari negara lain, juga memilki moralitas atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya . Moralitas yang terkandung dalam pasar bebas antara lain kebebasan, keseteraan, keadilan,

perlakuan yang sama dan tentu saja harus didukung oleh perangkat hukum yang jelas yang berisi aturan main dan sanksi yang jelas.Disamping berbagai macam moralitas diatas, kondisi berlakunya pasar bebas adalah di bawah pemerintahan yang adil dan demokratis. Serta peran pemerintah harus netral dan mampu menjamin hak dan kepentingan setiap orang secara sama dan fair.

Di Negara kita dan juga di Negara-negara lain, pada saat ini, dengan kondisi kekinian, disamping kita mendengar berita baik tentang kesejahteraan dan kekayaan, kita juga mendengar berita buruk tentang kesengsaraan dan kemiskinan dari pelaksanaan pasar bebas ini

Belajar dari berbagai kegagalan bangsa kita dalam mengadopsi hasil-hasil peradaban baru yang ternyata hasilnya tidak sebagus dari Negara asalnya dan ternyata malah semakin menyesangrakan dan menjadi alat untuk melakukan penipuan dan kejahatan.

Menurut saya kegagalan mengadopsi hasil-hasil pemikirian dan peradaban bukan terletak pada masalah moralitas yang di bawa oleh pasar bebas itu dari negara asalnya, tapi lebih merupakan pada ketidaksiapan mentalitas kita untuk mampu mengikuti moralitas pasar

bebas tersebut. Disamping struktur budaya dan kebiasaan yang berbeda, etos kerja masyarakat juga yang menjadi penyebab gagalnya moralitas ala barat dapat di fahami oleh masyarakat kita.

Sebagai contoh dan ilustrasi adalah ilmu akuntansi, yang merupakan sebuah ilmu keuangan yang berasal dari Italia dan dikembangkan secara pesat di Eropa dan Amerika Serikat. Moralitas dari ilmu akuntansi adalah kejujuran dan takut melanggar aturan, karena di negara mereka melanggar aturan dengan menipu atau memberikan laporan keuangan yang salah dan fikitf adalah suatu kejahatan besar yang dapat dihukum berat dan secara moral,pelanggaan ini dapat membuat pelakunya di kucilkan dan tidak dipercayai masyarakat lagi dan ini tidak berlaku bagi beberapa suku bangsa yang mempunyai moralitas yang permisif dan dengan struktur sosial yang berlapis berdasarkan garis keturunan dan kemampuan ekonomi

Demikian juga pasar bebas, moralitas yang dibawa pasar bebas dari negara asalnya tidak cocok dengan moralitas bangsa yang mengadopsinya terutama apabila negara tersebut menganut sistem ekonomi merkantilisme, dimana seluruh aturan dan produk hukum

dibuat berdasarkan permintaan dari kalangan pedagang dan dimana ketika birokrasi pemerintahan yang ada sangat berbelit-belit dan menyusahkan. Disamping sistem ekonomi dan sistem produk hukum, sistem politik suatu negara tertentu sangat mempengaruhi keefektivitasan pemberlakuan pasarbebas pada suatu negara apalagi dengan fakta di beberapa negara, bahwa kebanyakan pelaku korupsi dan kolusi adalah orang-orang yang terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung pada partai politik tertentu

Keberhasilan pasar bebas juga ditentukan oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan serta kompetensi nasional tenaga kerja dari penduduk suatu negara. Suatu negara tidak akan bisa membuka pasarnya secara bebas terhadap negara lain secara adil dan menguntungkan apabila masih terdapat jurang perbedaan kualitas pendidikan dan keahlian para pelaku pasar bebas dan ini menurut saya adalah suatu hukum alam. Suatu negara yang sumberdaya manusia dan sumber daya manajemennya lebih tinggi tentu akan dapat memperdaya negara yang sumberdaya nya rendah bahkan sekalipun tetap konsisten pada moralitas bawaan pasar bebas tersebut.

Dalam dunia saat ini yang terbuka dan hampir tanpa tanda batas (borderless world) yang diikuti oleh kemajuan teknologi dan Sistem Informasi, rasanya susah untuk menolak masuknya globalisasi dan pasar bebas. Adalah hal yang memalukan kalau kita menafikan keindahan dan kenikmatan pasar bebas tersebut.Namun ada baiknya juga kita perlu memilih, memilah dan membuat batasan-batasan agar pasar bebas tersebut dapat kita ambil keuntungannya sekaligus mampu mereduksi dampak-dampak negatifnya.Adalah hal yang konyol juga kalau kita menerima bulat-bulat padahal moralitas dan budaya kita adalah berbeda dengan mereka.Budaya bangsa kita adalah masyarakat komunal dan gotong royong, menghormati yang tua dan menyelesaikan segala sesuatu dengan musyawarah dan mufakat dan yang paling penting adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang tentunya sangat betentangan dengan kekebasan individu, persamaan hak, dan berorientasi pada hasil yang merupakan ciri khas moralitas Barat.

Disamping kekuatan negara kita, yaitu jumlah penduduk yang besar, sumber daya alam yang (masih) berlimpah, luas wilayah dan letak strategis, kita juga punya kelemahan, yaitu masih lemahnya sistem dan teknologi produksi, tenaga kerja yang kurang terampil,

minimnya inovasi dan mahalnya biaya produksi adalah menjadi hal yang penting di perhatikan dalam penerapan pasar bebas di Indonesia. Langkah ini juga yang diambil oleh berbagai Negara dalam pemberlakukan pasar bebas, mereka tetap saja memproteksi dan melindungi sektor yang mereka anggap lemah dan belum mampu bersaing dengan Negara lain, seperti Amerika Serikat yang memproteksi pasar produk pertaniannya atau Malaysia yang membuat aturan pemakaian tenaga ahli atau tenaga terampil domestik serta adanya kewajiban alih teknologi dan ilmu pengetahuan.

Sudah saatnya negara kita yang saat ini mempunyai presiden baru, mampu dan berani menyuarakan kepentingan domestik ini ditingkat perundingan internasional baik di Forum WTO maupun forum internasional lainnya yang tujuannya adalah untuk menjadikan manusia Indonesia sebagai manusia yang sesungguhnya.

EKONOMI KULTURAL SEBAGAI KRITIK ATAS EKONOMI NEOKLASIK

Banyak orang beranggapan bahwa sistem ekonomi yang ada di semua negara pasca usainya perang dingin pasti akan mengadopsi ekonomi liberal atau ekonomi neoklasik. Anggapan ini didasarkan pada runtuhnya system ekonomi sosialis yang secara menarik disebut oleh Francis Fukuyama sebagai akhir sejarah (the End Of History). Dengan perkataan lain hanya ada system tunggal ekonomi yang tersisa didunia yaitu system kapitalis yang merupakan dasar ekonomi aliran neoklasik. Hal ini berdasarkan pengamatan Fukuyama, sejak kejatuhan ideology komunisme, lonjakan besar terjadi dalam perubahan ideology Negara-negara dunia. Sebagai contoh dari tahun 1975 sampai dengan 1990 saja terdapat kenaikan Negara yang

mengganti system ideologi sebanyak 30 negara dan pada saat ini hampir seluruh Negara di dunia sudah memakai system demokrasi liberal kapitalisme.

Disamping itu, Fukuyama menemukan fakta bahwa Negara-negara yang merubah system ideologinya ke liberalism kapitalisme (sebelumnya memakai system fasisme atau komunis) secara statistik mengalami kemajuan ekonomi yang luar biasa seperti yang ditunjukkan oleh Spanyol, Pilipina, Afrika selatan, Peru dan banyak Negara lainnya.

Namun dalam perjalanannya ada yang kelihatan tidak sesuai dengan hasil "mainstream kinerja ekonomi suatu Negara dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya ketika pada akhirnya beberapa Negara asia seperti Jepang, China dan Korea mampu mengimbangi kedigdayaan ekonomi Amerika Seriakt dan Negara-negara Eropa.

Melihat tipikal dari Negara Jepang, Korea dan China kita semua tahu bahwa Negara Negara tersebut tumbuh dari reruntuhan perang dunia ke II ditambah lagi dengan perang saudara dan perang kebudayaan yang dialami oleh Korea dan China. Dan kalau dibandingkan dengan Amerika dan Negara-negara eropa, perang dunia ke II idak begitu mengganggu struktur perekonomian domestik mereka.

Belakangan Amerika akhirnya sadar bahwa Jepang sebagai salah satu anggota "dunia bebas" selama perang dingin, telah mempraktikkan demokrasi dan kapitalisme sesuai dengan rangkaian norma-norma kulturalnya yang berbeda dengan yang dilakukan oleh Amerika. Para pelaku jaringan bisnis Jepang (keiretsu) saling membeli diantara mereka sendiri ketimbang dijual ke asing, walaupun penuh dengan proteksi dan kepentingan domestic yang kalau menurut hitungan ekonomi bahkan merugi. Hal ini tentu berbeda dengan ajaran teori ekonomi neoklasik, dimana jepang membelot

demi mempertahankan kepentingan kebangsaan yang menunjukkan jepang menjunjung tinggi superioritas dan warisan budaya mereka seperti penghormatan terhadap otoritas dan nilai-nilai keluarga sebagai vitalitas sosial dan tindakan ini tidak bisa dimengerti oleh Anerika dan eropa yang lebih mementingkan hak-hak inidividu dengan mengorbankan kepetingan masyararakat umum.

Di Korea Selatan, salah satu kontribusi terpenting dari pertumbuhan ekonomi tinggi Korea Selatan adalah pengaruh positifnya terhadap modernisasi sikap, cara berpikir dari tingkah laku penduduknya). Ajaran Konfusianisme telah memberikan pengaruh yang begitu besar dalam proses modernisasi sosio-ekonomi dan politik dengan melihat latar belakang historis Korea Selatan yang suram dan proses yang dialaminya. Implementasi ajaran Konfusius telah memberikan sumbangan positif bagi pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam rangka proses modernisasi di Korea Selatan.

Ajaran Konfusius yang dilihat sebagai faktor pertumbuhan ekonomi yang cepat di Korea Selatan adalah ajaran mengenai kepatuhan dan kesetiaan, pemahaman bahwa negara adalah agen moral yang aktif dalam pembangunan masyarakat, penghormatan atas status dan hierarki, penekanan pada pengembangan diri dan pendidikan, dan perhatian terhadap harmoni sosial

Sebenarnya dari jauh-jauh hari hal ini telah diingatkan, bahwa kehidupan ekonomi, menurut Adam Smith tertanam secara mendalam pada kehidupan social, dan ia tidak bisa difahami jika terpisah dari adat dan budaya, moral dan kebiasaan-kebiasaan masyatakat dimana proses ekonomi terjadi.

Perdebatan dan pemikiran mengenai ekonomi pada akhir-akhir ini menunjukkan bahwa keberhasilan dinamika ekonomi yang tumbuh cepat di asia timur terjadi bukan karena mengikuti

aturan-aturan neo klasik, tetapi malah melanggarnya. Menurut kaum neomerkantilis, keberhasilan itu bukan disebabkan oleh karena kinerja pasar bebas yang tak terbatas, tetapi karena dalam setiap kasus pemerintah mereka selalu mendukung upaya pengembangan melalui kebijakan-kebijakan industry yang tepat.

Sementara Amerika terlena dengan dengan ekonomi berorientasi pasar, kebikajan ekonomi di dunia diluar amerika berjalalan diatas asumsi yang sangat berbeda dengan aturan-aturan ekonomi neoklasik. Banyak pemerintah Asia, misalnya melindungi industry-industri domestic dengan penetapan tariff import yang tinggi, membatasi penanaman modal asing, mempromosikan eksport melalui kredit murah dan subsidi penuh, menjamin berbagai lisensi untuk mendukung perusahaan, mengorganisir kartel-kartel untuk memobilisasi biaya penelitian dan pengembangan dan mengalokasikan pembagian pasar.

Apa yang masih problematis dalam ekonomi neoklasik adalah ia telah melupakan fondasi-fondasi kunci tertentu yang menjadi dasar ekonomi klasik. Adam Smith percaya bahwa masyarakat dikendalikan oleh hasrat mementingkan diri sendiri untuk mencapai kondisi mereka yang lebih baik. Tetapi Smith tidak pernah menggagas bahwa aktivitas ekonomi bias direduksi untuk memaksimalkan kegunaan rasional. Dalam bukunya " Theory of Moral Sentiments" menggambarkan motivasi ekonomi sebagai suatu yang sangat kompleks dan tertancap dalam kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial yang lebih luas.

Definisi paling mendasar dari teori kegunaan (utilities) adalah mengejar kesenangan atau menghindari kesakitan. Definisi ini seruang dan sebangun dengan pemahaman commonsense tentang motivasi ekonomi, manusia selalu ingin mengkonsumsi jumlah paling besar dari hal-hal baik yang ada dalam kehidupan. Namun ada

saatnya orang mengejar tujuan-tujuan yang lain ketimbang kegunaan misalnya ada orang yang rela menerobos masuk rumah terbakar untuk menyelamatkan orang lain, mati dalam pertempuran atau sengaja meninggalkan karier dan jabatan agar mereka bias berkomunikasi dengan keheningan alam disuatu tempat disebuah pegunungan. Orang tidak hanya melulu mengisi dompet mereka, mereka juga memenuhi otaknyadengan berbagai gagasan tentang keadilan atau ketidak adilan dan mereka membuat pilihan-pilihan penting yang sesuai. Tidak mungkin ada demikian banyak perang jika yang diperjuangkan hanyalah sumber-sumber ekonomi, setiap konfrontasi, konflik dan perang selalu melibatkan tujuan-tujuan non utilitarian seperti pengakuan, agama, keadilan, prestise dan kehormatan.

Sebagian ekonom berusaha menjelaskan masalah ini dengan memperluas definisi kegunaan yang melampaui kesenangan dan

uang dengan mempertimbangkan motivasi-motivasi lain misalnya seperti kesenangan fisik yang diterima seseorang karena melakukan hal yang baik atau kesenangan yang didapatkan seseorang ketika memberikan sesuatu yang bias dikonsumsi oleh orang lain.

Ilmu ekonomi selalu saja ditandai dengan pendekatan reduksionis dan terpecah-pecah yang merupakan ciri khas dari kebanyakan ilmu-ilmu sosial. Para ahli ekonomi biasanya gagal mengetahui bahwa ekonomi hanyalah satu aspek saja dari suatu keseluruhan susunan ekologis dan social, suatu system yang hidup yang terdiri dari manusia dan interaksinya yang terus menerus satu sama lain dan dengan sumber daya alamnya.

Kesalahan yang paling mendasar pada ilimu-ilmu sosial adalah membagi-bagi susunan ini menjadi potongan-potongan, yang dianggapnya mandiri dan dihadapi dalam bidang akademik yang

terpisah. Dengan demikian seorang ilmuwan ekonomi cenderung mengabaikan kekuatan factor-faktor lain seperti faktor politik, sosial dan budaya kedalam model-model yang mereka buat. Pendekatan-pendekatan yang parsial ini juga kerap tercermin dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Indonesia yang sejak tahun 1970-an telah menelan bulat-bulat teori neo klasik dengan berbagai kebijakan seperti pembukaan investasi asing besar-besaran, dalam semua bidang industry, pemberlakuan pasar bebas baik bilateral maupun regional, dan kebijakan industry yang bersifat subsitusi import memang berdampak positif dalam jangka waktu pendek dan menengah.

Namun dalam jangka panjang, kebijakan tersebut diatas justru menghancurkan negeri ini secara dramatis, sebagaimana yang kita alami pada tahun 2015 ini dimana fondasi ekonomi kita sangat lemah

dan ini ditunjukkan oleh berbagai indikator-indikator ekonomi seperti transaksi neraca berjalan, nilai tukar mata uang rupiah, cadangan devisa dan indicator lainnya yang menunjukkan adanya pelemahan dalam bidang ekonomi.

Mata pencaharian secara budaya Indonesia yang secara umum di ketahui seperti petani dan nelayan sama sekali tidak terakomodasi dalam kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah selama ini, dampaknya saat ini untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saja Negara kita tidak mampu memenuhi permintaan dan terpaksa mengimport dari luar negeri termasuk komoditas selama ini yang diupayakan oleh rakyat yaitu beras dan gula.

Demikian juga dengan sikap budaya, seperti gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, tidak diterapkan lagi dalam system ekonomi Indonesia, memang pernah

ada gotong royong dalam penyelesaian masalah kebangkrutan perbankan, namun itu jelas salah kaprah, karena perbankan bukan sector ekonomi yang sekunder, karena yang sekunder adalah aktivitas ekonomi sektor riel yang di lakoni oleh mayoritas penduduk termasuk petani, nelayan dan pengusaha kecil.

Berkaca dari keberhasilan Jepang dan korea selatan dalam mengaplikasikan aspek budaya kedalam aktivitas ekonomi yang tekah menjungkirbalikkan teori ekonomi barat, ada point penting dalam penerapannya yaitu konsistensi para pemimpin bangsa untuk membawa masyarakatnya maju dan mampu bersaing dengan Negara-negara lain tanpa harus melupakan budaya luhur yang dianut oleh masyarakat dan bangsanya.

EKONOMI INDONESIA YANG PENUH PARADOKS

Ternyata bukan hanya dalam bahasa saja Indonesia mengalami keadaan bertolak belakang dengan fakta dan realitas yang ada (Paradoks) tetapi dalam bidang ekonomi juga banyak dijumpai paradoks ini. Dalam bahasa, bahasa Indonesia terkenal karena kata-katanya memiliki rentang makna yang sangat banyak dan beragam dan dapat disesuaikan berdasarkan kepentingan para penguasa. Kata–kata yang sering dipakai adalah adil dan makmur, kesejahteraan, pembangunan dan banyak kata-kata lain yang bisa dikategorikan bahasa politik.

Entah kenapa, walaupun disadari terjadi ketidak konsistenan, namun istilah-istilah ini seolah-olah menjadi *blueprint* dan referensi wajib pada setiap orde penguasa pemerintahan di Indonesia terutama paradoks ini terus dikumandangkan baik pertanggunng jawaban presiden sampai laporan tahunan yang kepada lembaga-lembaga ekonomi internaasional. Banyak pengamat dengan pandangan skeptis menyebutkan bahwa pola ini adalah pola pikir lama dan ada

kesan pemerintah melakukan kebohongan kepada rakyatnya. Ada juga yang menyebutkan secara radikal persoalan ini adalah masalah mentalitas, mentalitas penguasa dan rakyatnya yang bukan mental bangsa yang bebas dan bermartabat.

Dibawah ini adalah beberapa paradoks dari banyak lagi paradoks yang didalamnya Indonesia menjalankan proses pembangunannya.

Paradoks Koperasi Sebagai Soko Guru Pembangunan Nasional

Dari dulu sampai sekarang, keberadaan koperasi dipandang sebagai sebagai soko guru pembangunan nasional dan dalam jenis lembaga ekonomi formal di Indonesia koperasi adalah salah satunya disamping PT, BUMN, MNC, CV dan Firma. Dalam kondisi ekonomi nasional sampai sekarang ini, khususnya dalam kaitannya proses konglomerasi, "Kesokoguruan" koperasi banyak sekali dipertanyakan dan belum ada bukti empiris yang menyatakan koperasi secara ekonomis menguntungkan anggotanya Tampaknya justru usaha-usaha swasta, khususnya usaha kecil menengah dan usaha besar, yang pantas disebut sokoguru perekonomian yang justru banyak

menyumbang terhadap distribusi barang dan jasa demikian juga BUMN-pun dapat menjadi sokoguru perekonomian nasional.

Keberlanjutan koperasi di Indonesia lebih banyak atas desakan pemerintah, terutama kebijakan pemerintah dalam mengalokasikan bahan baku, bibit dan pupuk, hal ini dapat dilihat pada koperasi unit desa (KUD) dan koperasi produksi tahu dan tempe, namun sayangnya kebijakan pasca produksi dan perlindungan terhadap kelangsungan koperasi ini sering kali diabaikan terutama bahan baku, pemasaran dan promosinya.

Saat ini koperasi banyak tumbuh hanya untuk menangkap peluang kebijakan bantuan pemerintah secara politis dan tentu saja keadaannya sering digambarkan orang dengan “hidup segan mati tak mau”, tetapi didalam interaksi ekonomi yang sesungguhnya dalam realitas pasar seringkali mereka tidak mampu bersaing apalagi banyak kebijakan-kebijakan maupun konvensi ekonomi internasional yang melarang adanya perlakuan khusus pemerintah terhadap satu bidang badan usaha tertentu yaitu konvensi organisasi perdagangan dunia (WTO).

Paradoks Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berturut dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 adalah 6,5 %, 6,23 % dan 5,78 %. Dalam teorinya pertumbuhan ekonomi yang tumbuh memberi ruang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.Dilihat dari pendapatan per kapita, itu mungkin terjadi, tetapi kesenjangan juga semakin lebar. Indeks Gini (indeks Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang mengukur tingkat distribusi pendapatan cenderung meningkat, sementara indeks pembangunan manusia tidak menunjukkan perbaikan berarti (peringkat ke-108 pada 2010). Maka, pertumbuhan ekonomi di satu sisi menimbulkan kesenjangan di sisi lain. Secara sektoral, telekomunikasi, jasa, perdagangan, dan keuangan tumbuh pesat, tetapi manufaktur, pertambangan, dan pertanian justru semakin menyusut dan ini justru melahirkan persoalan baru yang menyangkut masalah kemiskinan dan distribusi pendapatan

Adalah merupakan suatu paradoks ekonomi, ketika Indonesia yang merupakan negara kelautan dan pertanian justru Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nya adalah yang paling terkecil,

malah yang tertinggi adalah industri pengolahan dan jarak kesenjangan antara sektor pertanian dan kelautan adalah sangat besar dengan sektor industri pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada efek pengganda (multifflier effect) antara industri dan pertanian dan kelautan, dan ada kesan masing-masing sektor berjalan sendiri-sendiri.

Sampai saat ini di Indonesia, tidak ada jaminan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu memberi efek positif pada kesejahteraan dan distribusi pendapatan yang baik. Hal ini tentu saja bertentangan dengan teori dasar ekonomi dan realitas yang dialami oleh Negara-negara lain.

Paradoks Kerjasama Ekonomi

Telah diketahui, bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang gemar menandatangani perjanjian kerjasama ekonomi baik bilateral maupun multilateral. Berbagai perjanjian telah ditandatangani seperti ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), AFTA serta berbagai kesepakatan perdagangan bebas dengan negara lainnya seperti Singapura, Australia dan lain-lain

Namun ada yang perlu dicatat bahwa dalam pelaksanaanya Indonesia kerap dirugikan karena adanya faktor non ekonomi yang menjadi persyaratan utama seperti isu lingkungan hidup, hak asasi manusia dan situasi politik dalam negeri. Disamping itu ada juga faktor yang merugikan kita lainnya seperti masih adanya proteksi tersembunyi dan terang-terangan yang dilakukan terhadap industry dalam negeri dan produk pertanian yang di lakukan justru negara-negara besar dan maju

Faktor lain yang merugikan kita lainnya adalah perlakuan yang tidak adil antara bekas jajahan Commonwealth (Inggris) seperti Malaysia, Singapura, Australia, India dan Negara lain dan bukan jajahannya yang berimplikasi pada tarif masuk dan pajak lainnya meskipun tujuan dari perjanjian ekonnomi ini adalah liberalisasi perdagangan antara lain dengan dihapuskannya hambatan-hambatan tarif/non tarif menuju era perdagangan bebas antar negara.

Secara empirik, dari berbagai kasus di Negara lain, China, AS dan Singapura tidak akan mau membuka pasarnya pada negara lain ketika industri dalam negerinya belum kuat dan sekarang coba bandingkan dengan struktur industri Indonesia yang justru dalam

posisi *infant industries* yang masih membutuhkan proteksi dan perhatian penuh pemerintah Indonesia.

Dan sekarang kita telah mengalami kerugian akibat perjanjian kerjasama ekonomi Indonesia dengan contoh nyata matinya industi gula, industri beras dan industri alat-alat pembantu yang justru pasar kita dibanjiri oleh produk-produk luar negeri seperti Tiongkok, Vietnam, Thailand dan Negara-negara lainnya yang tentu saja memberi dampak pada tingkat pengangguran dan sementara itu eksport kita didominasi oleh produk budaya seperti Indomie dan kerajinan tangan yang tentu saja target untuk memperbaiki defisit trasnsaksi neraca berjalan tidak akan pernah tercapai, apalagi produksi minyak bumi dan gas Indonesia darin tahun ke tahun mengalami penurunan yang sebagai mana kita ketahui adalah andalan utama bangsa Indonesia khusunya pada masa orde baru.

Ada baiknya, dalam pemerintahan presiden kita yang baru ini, harusnya presiden dan para menterinya harus bersikap dan berkata jujur dan apa adanya tentang hasil pembangunan tanpa perlu berbohong untuk menyenangkan rakyat, sudah lama rakyat Indonesia di bius dan dinina bobokkan dengan kebohongan dan harapan palsu,

sudah saatnya rakyat dihadapkan pada realitas agar mereka dapat bersiap dan menyadari kesulitan, sebagaimana yang dialami oleh rakyat korea selatan dan Jepang, sehingga mengantarkan negara mereka menjadi salah satu negara maju didunia

QUO VADIS EKONOMI INDONESIA 2014 ?

Ekonomi sejak berdirinya republik ini belum menemukan bentuk yang tepat dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meletakkan posisi Indonesia di tataran ekonomi internasional.sudah hampir 69 tahun berlalu namun kerangka dasar ekonomi Indonesia belum menemukan fondasi yang kuat, dikatakan sektor pertanian sebagai basis, juga bukan bahkan dengan jumlah penduduk dan jumlah lahan yang luas, demikian juga sektor industry, yang digadang-gadangkan oleh birokrat ternyata juga bukan, hal ini dapat dilihat dari nilai transaksi berjalan yang selalu defisit, yang dapat kita artikan tidak ada konstribusi sektor industri secara signifikan terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.bahkan menurut Sritua Arief (1990) sektor industri terutama sektor industri penanaman modal asing tak lain tak lebih keuntungannya hanya sekedar penyerapan tenaga kerja murah belaka.

Sedangkan industri domestik kegiatannya, baik segaja maupun tidak sengaja hanya di arahkan pada pemenuhan konsumsi dalam negeri dan industri yang bersifat subsitusi import, yang sama sekali tidak mempunyai kekuatan kompetitif dalam merebut pangsa pasar internasional. Bahkan dalam perjalanannya, industri domestik ini juga dihantam permasalahan baik mengenai pasarnya juga mengenai kelangsungan produksinya melalui instrument dan regulasi dalam negeri yang tidak berfihak, hal ini dapat kita lihat pada struktur pasar gula dan beras di Indonesia, yang secara hitung-hitungan adalah lebih menguntungkan kalau import dari luar negeri. Namun tentu saja kebijakan import ini justru akan mematikan industri dalam negeri dan berakibat pada banyak hal seperti pertambahan angka pengangguran dan secara signifikan menyumbang pada persoalan defisit transaksi berjalan.

Secara teori, system ekonomi yang dianut oleh Indonesia sampai sekarang adalah system kapitalis liberalism, yang membuka diri dan pasarnya lebar-lebar kepada dunia internasional dan mengkaitkan seluruh kebijakan ekonomi pada instrument-instrumen yang di tentukan oleh lembaga-lembaga ekonomi internasional seperti

IMF, Bank Dunia,WTO dan badan-badan kerjasama ekonomi lainnya. Selanjutnya kemudian, system ini sendiri dan lembaga-lembaga internasional pendukungnya justru yang sedikit demi sedikit menggerogoti kekuatan ekonomi Indonesia melalui aturan dan konvensi yang diikuti didalam segala bidang perekonomian baik itu perdagangan, industry, pertanian, komunikasi, perkebunan, pelayaran dan sector-sektor lainnya. Kita sangat mengerti sekali bahwa Indonesia adalah salah satu Negara yang sangat patuh terhadap aturan-aturan dan konvensi dari lembaga dunia yang sebenarnya sangat merugikan Negara Indonesia sendiri, sikap berlainan justru ditunjukkan oleh Brazil dan India yang berani menyuarakan keberatan mereka, karena mereka anggap kebijakan lembaga-lembaga internasional seperti WTO dan Bank Dunia merugikan negaranya sendiri.

Menurut Bank Dunia, sebenarnya Indonesia dikategorikan sebagai negara agraris (pertanian) dan dimasukkan kedalam kelompok negara sedang berkembang. Namun dalam pelaksanaannya, justru Indonesia secara prematur sudah masuk dalam tahapan negara industri. Hal ini sangat tidak sesuai dengan

teori tahapan pembangunan W.W. Rostow yang ketika Indonesia masih belum lepas dari tahapan pertanian justru memaksakan diri masuk ke tahapan berikutnya yaitu industry, seharusnya industri yang ada adalah untuk membuat nilai tambah hasil pada periode tahapan sebelummya yaitu tahapan pertanian. Tentu saja akibat kebijakan banting setir ini banyak sekali lahan pertanian harus dirubah paksa menjadi kawasan industri dan perdagangan jasa sehingga tidak heran pada saat ini banyak sekali produk-produk pertanian seperti beras, sayuran dan buah-buahan Indonesia harus import dari negara lain dan ini adalah paradoks bagi Indonesia yang terkenal pada zaman orde baru sebagai negara agraris terkemuka di asia tenggara.

Berbagai jargon mengenai fondasi ekonomi Indonesia sudah banyak kita dengar, di zaman orde lama kita mendengar ekonomi berdikari, di zaman orde baru dan reformasi kita mendengar istilah ekonomi pancasila sampai istilah ekonomi kerakyatan.Namun kesemuanya itu hanya tinggal semboyan belaka, tidak ada perubahan yang mendasar tentang sistem perekonomian yang kita anut. Setiap peristiwa atau perubahan di Indonesia, baik pergantian presiden maupun persitiwa jatuhnya penguasa orde baru berubah menjadi

orde reformasi, kebijakan ekonomi sama sekali tidak tersentuh dan tidak pernah berupaya untuk membangun fondasi yang kokoh, semua pemimpin Indonesia hanya berdebat masalah politik dan hukum, untuk persoalan ekonomi, rata-rata presiden Indonesia hanya meneruskan apa yang telah dijalankan oleh presiden sebelumnya.

Sementara itu dalam waktu yang tidak berapa lama, Negara-negara tetangga Indonesia yang dulu dibawah indonesia sudah banyak yang berganti status dari negara sedang berkembang menjadi negara maju seperti Singapura dan Malaysia dan pencapaiannya melampaui apa yang dicapai oleh Indonesia. Dan sangat memungkinkan bahawa Negara seperti Thailand dan Vietnam akan segera berubah status menjadi Negara berkembang

Memang diakui, bahwa ada juga data-data/indikator menunjukkan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi pada periode tertentu dan juga peningkatan PDRB dan GNP, namun anehnya, peristiwa ini merupakan anomali ekonomi yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.Dan yang terjadi adalah ketidak merataan penyebaran hasil pertumbuhan

ekonomi tersebut yang sering kita sebut dengan kesenjangan (gap), baik kesenjangan struktural maupun kesenjangan regional. Perlu diketahui bahwa kesenjangan-kesenjangan yang terjadi sangat lebar terutama kesenjangan pusat – daerah dan kesenjangan kota – desa. Namun kita ketahui bersama bahwa untuk menutup kesenjangan ini, pemerintah justru tidak mengeluarkan kebjakan ekonomi baru untuk memperbaikinya namun malah mengeluarkan paket kebijakan politik yaitu kebijakan otonomi daerah yang sampai saat ini hasilnya belum dapat dilihat dan tidak dapat diukur secara signifikan dan malah melahirkan kesenjangan-kesenjangan baru yang sama sekali tidak diprediksi pada waktu pembuatan kebijakan tersebut.

Menurut sejarah ekonomi, kebijakan ekonomi suatu negara tidak selalu harus sama dengan negara lain ataupun harus sama dengan pendapat tokoh ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi diciptakan oleh ahli ekonomi bukan untuk mengatasi permasalahan negara berkembang,tapi teori-teori yang ada baik kapitalismenya Adam Smith maupun jalan tengahnya Keynes dibuat untuk mengatasi permasalahan ekonomi di negara meraka masing-masing, jadi teori ini harus dimodikasi sesuai dengan kultur dan karakter masyarakat

bangsa. Ada kesan, bahwa proses kebijakan ekonomi di Indonesia di paksakan sama dengan teori dan pemahaman menteri ekonominya yang kebetulan beraliran liberalism kapitalisme. Disamping itu juga dibutuhkan keberanian bertindak dan sikap melindungi industri dan perekonomian dalam negeri dari pemimpin bangsa/Negara sebagaimana yang ditunjukkan oleh Malaysia dengan kebijakan berfihak pada masyarakat pribumi atau kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di negara-negara Amerika Latin.

Tahun 2014 ini adalah tahun yang menentukan bagi bangsa indonesia, karena di tahun ini akan terjadi pergantian pemimpin negeri ini yaitu pemilihan presiden. Dari berbagai tahapan debat calon presiden dan wakil presiden sebanyak 5 putaran, setidaknya kedua kandidat mempunyai pandangan yang sama terhadap apa yang harus dilakukan pada sistem ekonomi Indonesia yaitu perubahan sistem secara konsisten dan berani dan kedua kandidat presiden ini juga sama-sama mengetahui secara baik persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi bangsa ini.

Kita hanya berharap, debat bukan tinggal debat, tapi berharap ada perubahan yang mendasar dalam struktur dan fondasi ekonomi Indonesia yang selama ini kita tunggu-tunggu. Semoga…

EKONOMI KERAKYATAN KOTA BATAM

Dalam penelitian *Studi Potensi dan Peluang Ekonomi Kerakyatan Kota Batam* ini diambil 110 responden yang tersebar di delapan kecamatan wilayah Kota Batam. Angka 110 dalam menentukan responden ini diperoleh dari data Sensus Ekonomi 1996 yang menyatakan jumlah usaha tidak berbadan hukum sebanyak 34.026. Dengan data ini diasumsikan tahun 2000 terjadi peningkatan sebesar 300 %, sehingga diperoleh jumlah usaha kecil menengah sebanyak 102.000. Menurut *Teori Gay* untuk penelitian deskriptif sampel yang diambil minimal 10 %, tetapi jika memakai teori ini, hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan teknis dan sumberdaya lainnya sehingga diambil sampel 1 $^{0}/_{00}$ dengan hasil sebanyak 102 sampel yang dibulatkan menjadi angka 110 sampel yang tersebar di delapan kecamatan. 110 responden sebagai pelaku ekonomi kerakyatan yang ditentukan melalui formula statistik itu dibagi dalam lima sektor, yakni sektor pertanian, perikanan,

peternakan, industri kecil dan industri kecil yang mendukung pariwisata. Satu sektor yang cukup potensial, tidak dimasukkan menjadi objek penelitian adalah sektor perdagangan.

Seluruh data hasil penelitian ini disajikan dalam persentase. Seperti yang direncanakan, dalam penelitian ini diperoleh data sesuai dengan tujuan penelitian, yakni data dan informasi seputar usaha ekonomi kerakyatan yang meliputi data tentang waktu dimulainya usaha, jenis produksi usaha (sektor usaha), modal awal usaha, daerah pemasaran, cara pemasaran, jumlah karyawan yang dimiliki, omset penjualan, pesaing usaha sejenis, organisasi, peran pemerintah dan upaya peningkatan pemasaran hasil produksi.

Karakteristik Usaha

1. Berdasarkan Tahun Dimulainya Usaha

Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh data bahwa 33% responden mengaku usaha mereka dimulai sebelum tahun 1995, kemudian, 5,61 % responden memulai usaha pada tahun 1995, selanjutnya 3,74 % responden memulai usaha tahun 1996, lalu 6.54 % usaha responden dimulai tahun 1997. Sebanyak 14,95 % usaha

ekomi kerakyatan responden dimulai tahun 1998, kemudian, 25,23 % usaha responden dimulai tahun 1999 dan 10,28 % responden memulai usaha tahun 2000. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa persentase terbesar usaha responden dimulai sebelum tahun 1995, persentase untuk tahun-tahun selanjutnya berfluktuasi pada kisaran 3 % hingga 4 % pada tahun 1995 hingga 1997. Setelah tahun 1997 usaha ekonomi kerakyatan mengalami peningkatan persentase dimulainya usaha tersebut sampai dengan tahun 1999.

Pelaku ekonomi kerakyatan yang memulai usahanya sebelum tahun 1995, sebagian besar adalah warga Batam asli yang menghuni pulau ini sejak sebelum dikembangkan sekitar tahun 1970-an. Hal ini, ditandai dengan usaha ekonomi kerakyatan yang sifatnya masih sangat subsisten di pulau-pulau sekitar Batam seperti Belakangpadang, Galang, Lubukbaja dan Nongsa yang dihuni oleh sebagian Suku Jawa, Bugis dan Melayu.

Sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia, terlihat ekonomi kerakyatan di Batam belum memperlihatkan gejala perkembangan yang cukup tinggi. Diperoleh informasi, penyebab terjadinya hal itu

adalah masih cukup terbukanya peluang kerja di sektor formal di Kota Batam.

Setelah krisis ekonomi pertengahan tahun 1997, tampak sekali perkembangan ekonomi kerakyatan. Hal itu antara lain disebabkan adanya arus migrasi yang masuk setelah terjadi gelombang PHK besar-besaran di Indonesia. Batam, yang sebagian produknya berorientasi ekspor, tidak terlalu berdampak dengan adanya krisis ekonomi tersebut. Bukti dari hal tersebut di atas ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1 : Tahun Mulai Usaha Ekonomi Kerakyatan di Batam (%)

Kecamatan	2000	1999	1998	1997	1996	1995	<1995
Blk Padang	8.33	-	-	-	-	8.33	83.33
Bulang	20.00	60.00	-	-	-	-	20.00
Galang	11.11	11.11	33.33	11.11	-	-	33.33
Sei-Beduk	15.00	25.00	15.00	5.00	10.00	5.00	25.00
Nongsa	-	22.22	27.78	16.67	-	5.56	27.78
Sekupang	7.69	46.15	15.38	-	-	15.38	15.38
Lubuk Baja	-	10.00	10.00	10.00	-	-	70.00
Batu Ampar	20.00	26.67	13.33	6.67	13.33	6.67	13.33

2. Berdasarkan Sektor Usaha

Dari data hasil penelitian yang diperoleh, ternyata sektor industri kecil menduduki persentase terbesar dari responden yang telah ditentukan yaitu 54,43 %. Kemudian diikuti sektor perikanan 38,02 %, sektor pertanian 5,46 %, sedangkan sektor usaha yang terkecil adalah sektor peternakan sebesar 2,08 %.

Diketahui, salah satu penyebab tingginya persentase besarnya sektor industri kecil adalah karena jika dibandingkan dengan berusaha sektor lain, sektor ini lebih mudah. Dan yang lebih penting adalah dengan status Batam sebagai kota industri yang membutuhkan logistik dalam jumlah besar, sektor indsutri ini mudah dipasarkan.

Tabel 2 : Distribusi Sektor Usaha Ekonomi Kerakyatan di Batam

(dalam %)

Kecamatan	Pertanian	Perikanan	Peternakan	Industri Kecil	Pariwisata
Blk Padang	0.00	33.33	0.00	66.67	0.00
Bulang	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
Galang	11.11	77.78	11.11	0.00	0.00
Sei-Beduk	5.00	20.00	0.00	75.00	0.00
Nongsa	5.56	33.33	5.56	55.56	0.00
Sekupang	15.38	23.08	0.00	61.54	0.00
Lubuk Baja	0.00	10.00	0.00	90.00	0.00
Batu Ampar	6.67	6.67	0.00	86.67	0.00
Total	5.46	38.02	2.08	54.43	0.00

Dilihat dari setiap kecamatan, sektor industri kecil, jumlah terbesar di Kecamatan Lubukbaja 90 %, selebihnya tiga sektor yang lain. Peringkat kedua yang persentase sektor industri kecilnya besar berada di Kecamatan Batuampar yakni 86,67 %. Selanjutnya kecamatan Seibeduk 75 %, Belakang Padang 66,67 %, Sekupang 61,54 % dan Nongsa 55,56 %. Sedangkan Kecamatan Bulang dan

Galang tidak mempunyai sektor industri kecil, namun usaha dibidang perikanan cukup menjanjikan seperti di Pulau Bulang sektor perikanannya 100 %.

3. Berdasarkan Lokasi Usaha

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh data bahwa 40 % usaha ekonomi kerakyatan berlokasi di sekitar pantai/laut, 29 % responden berlokasi di pinggir jalan raya, 27 % responden di kawasan perumahan dan 3 % responden berlokasi pada lokasi sentra industi sedangkan di pusat kota hanya 1 % responden yang berlokasi di pusat kota. Data diatas menunjukkan bahwa daerah-daerah hinterland mempunyai potensi untuk dikembangkan dan dibina pemerintah bagi para pelaku usaha ekonomi kerakyatan

Tabel 3:Distribusi Lokasi Usaha Ekonomi Kerakyatan di Batam

Kecamatan	Sentra Industri	Kawasan perumahan	Pinggir Jalan Raya	Sekitar Laut/Pantai	Pusat Kota
Blk Padang	0	8	3	5	
Bulang	0	0	0	10	
Galang	0	0	1	8	
Sei-Beduk	0	8	7	5	
Nongsa	0	3	3	12	
Sekupang	1	1	9	0	
Lubuk Baja	0	4	4	2	
Batu Ampar	2	5	4	3	1
Total	3	29	31	43	1

4. Jumlah Modal Awal

Untuk memulai usaha, modal awal yang dibutuhkan para pelaku ekonomi kerakyatan kota Batam sangat bervariatif. Dari data penelitian, didapatkan bahwa pelaku ekonomi kerakyatan yang membutuhkan modal awal di bawah Rp. 1.000.000,- sebanyak 27 %, antara Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- 39.25%, 6 -

10 juta 14.02 %, 11-15 juta 4.67 %, 16-20 juta 2.8 %, sedangkan di atas 21 juta 12.15 % .

Dilihat per kecamatan, Kecamatan Nongsa dan Belakangpadang merupakan kecamatan yang modal ekonomi kerakyatannya paling sedikit, yakni mencapati 50% dan 41,67 % dari seluruh pelaku ekonominya mempunyai modal awal kurang dari Rp1 juta. Sebaliknya, Kecamatan Bulang, Batuampar dan Lubukbaja mempunyai kemampuan permodalan yang cukup baik, yakni sebagian respondennya mempunyai permodalan di atas Rp 21 juta. Di Kecamatan Sekupang, bagian terbesar pelaku ekonomi kerakyatannya mempunyai permodalan antara Rp1-5 juta. Hal itu juga terjadi di Kecamatan Galang, Seibeduk dan Belakangpadang.

Tabel 4 : Persentase Modal Awal Usaha Ekonomi Kerakyatan di Batam

Kecamatan	<1 juta	1- 5 juta	6-10 juta	11 - 15 juta	16 - 20 juta	> 21 juta
Blk Padang	41.67	41.67	8.33	-	-	8.33
Bulang	-	20.00	-	20.00	20.00	40.00
Galang	22.22	55.56	22.22	-	-	-
Sei-Beduk	15.00	45.00	20.00	-	5.00	15.00
Nongsa	50.00	33.33	11.11	-	-	5.56
Sekupang	30.77	61.54	7.69	-	-	-
Lubuk Baja	30.00	30.00	20.00	10.00	-	10.00
Batu Ampar	20.00	26.67	20.00	13.33	-	20.00
Total	27.10	39.25	14.02	4.67	2.80	12.15

3.a. Sumber Permodalan

Dari modal awal yang berasal seperti modal sendiri, laba yang ditahan, perbankan, lembaga keuangan lainnya, pinjaman saudara atau kenalan dan campuran. Campuran disini maksudnya penggunaan modal tidak dari satu jenis sumber modal saja tetapi dari

beberapa sumber seperti modal sendiri dan pinjaman saudara. Dari hasil survey modal awal yang mereka butuhkan untuk memulai usaha, lebih dari 70 % menggunakan modal sendiri, sedangkan peranan lembaga keuangan maupun perbankan dalam mendukung perekonomian rakyat ini masih sangat minim tidak sampai 10 %. Pengusaha ekonomi kerayatan di Kecamatan Sekupang seluruh modal awal usahanya dengan modal sendiri. Sebaliknya, di Kecamatan Bulang, pengusaha ekonomi kerakyatannya mempunyai hubungan permodalan dengan pihak lain tertinggi, yakni 40 %.

Rendahnya persentase modal Bank yang digunakan oleh pelaku usaha ekonomi kerakyatan ini disebabkan karena selain proses kredit itu sendiri yang berbelit-belit juga keterbatasan jaminan pelaku usaha. Ada dua alternatif yang bisa dikembangkan untuk permasalahan permodalan bagi usaha ekonomi kerakyatan ini. Pertama, pemberdayaan koperasi yang sudah ada untuk mengayomi atau membina sekaligus dapat menjadi penjamin dalam hal pencairan dana pinjaman tersebut. Alternatif kedua, dengan mengembangkan sistem perekonomian syariah (bagi hasil) sehingga baik kreditur atau debitur bekerja sama dalam menghasilkan keuntungan yang kemudian dibagi hasilnya. Dengan dua alternatif ini, kesulitan dana

atau permodalan bagi pengusaha ekonomi kerakyatan akan dapat dikurangi.

Tabel 5 : Persentase Perbandingan jenis modal yang digunakan

Kecamatan	Modal sendiri	Laba yang ditahan	Perbankan	Lembaga keuangan	Pinjaman saudara	Pinjaman kenalan	Campuran
Blk Padang	75.00	-	8.33	8.33	-	-	8.33
Bulang	60.00	-	-	-	-	-	40.00
Galang	55.56	-	-	-	-	11.11	33.33
Sei-Beduk	55.00	-	-	-	15.00	5.00	25.00
Nongsa	88.89	-	-	-	-	-	11.11
Sekupang	100.00	-	-	-	-	-	0.00
Lubuk Baja	50.00	10.00	-	-	10.00	20.00	10.00
Batu Ampar	66.67	-	-	-	6.67	-	26.67
Total	70.09	0.93	0.93	0.93	4.67	3.74	18.69

3.b. Sumber Modal Per Sektor

Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa sektor peternakan, seluruh modal yang digunakan adalah modal sendiri, yakni 100 %, selanjutnya sektor pertanian menggunakan modal sendiri 40 % dan sektor industri kecil 71,4 %.

Tabel 6 : Sumber Modal usaha ekonomi kerakyatan (dalam persen*)*

Sumber Modal	Pertanian	Perikanan	Peternakan	Industri Kecil	*Pariwisata*	Total
Sendiri	40.0%	75.0%	100.0%	71.4%	0.0%	70.1%
Laba	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	0.9%
Bank	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	0.9%
Lembaga lain	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	0.9%
Saudara	0.0%	3.1%	0.0%	6.3%	0.0%	4.7%
Kenalan	0.0%	6.3%	0.0%	3.2%	0.0%	3.7%
Rentenir	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Campuran	60.0%	15.6%	0.0%	14.3%	0.0%	18.7%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

5 .Segmentasi Pemasaran Produk

Target pasar yang menjadi sasaran dari pengusaha ekonomi kerakyatan ini seperti pasar lokal, domestik, luar negeri dan campuran (bisa lokal dengan domestik, lokal dengan luar negeri atau lainnya). Sektor usaha kecil ini hampir 80 % hanya mampu menembus pasar lokal, artinya sangat besar peluang pasar yang masih dapat ditembus oleh para pelaku perekonomian rakyat ini baik pasar domestik

maupun pasar luar negeri. Dilihat per sektornya, 70 % hasil pertanian, dijual di Batam. Kemudian, 68,8 % hasil produksi perikanan juga masih dikonsumsi warga Batam. Produk ekonomi kerakyatan yang tertinggi dipasarkan di luar negeri baru hasil industri kecil yang jumlahnya pun relatif kecil, yakni hanya 1,6 % dari total produknya.

Tabel 7: Tujuan Pemasaran Usaha Ekonomi Kerakyatan

Pasar	Pertanian	Perikanan	Peternakan	Industri Kecil	Pariwisata	Total
Lokal	70.0%	68.8%	50.0%	85.7%	0.0%	78.5%
Domestik	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	0.9%
Luar negeri	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	0.9%
Campuran	30.0%	31.3%	50.0%	11.1%	0.0%	19.6%

6. Mekanisme Pemasaran Produk

Dalam melakukan pemasaran, para pelaku ekonomi rakyat menggunakan cara yang bervariasi baik dengan cara langsung, melalui perantara, ataupun pesanan. Hasil produksi sektor pertanian, 30 % menjual produknya secara langsung, sektor peternakan, mempunyai tingkat yang hampir sama dengan sektor pertanian, yakni menjual hasil produksinya secara langsung. Persentase tertinggi

dalam menjual produksinya diperoleh dari sektor peternakan, yakni 50% menjual langsung produknya ke konsumen, sedangkan sektor industri kecil cara pemasaran terbesarnya dengan 28,6 % menjual produknya berdasarkan dari pesanan konsumen.

Tabel 8 : Cara pemasaran usaha ekonomi kerakyatan

Cara pemasaran	Pertanian	Perikanan	Peternakan	Industri Kecil	Pariwisata	Total
Langsung	30.0%	31.3%	50.0%	25.4%	0	28.0%
Perantara	20.0%	56.3%	0.0%	17.5%	0	29.0%
Pesanan	0.0%	9.4%	0.0%	28.6%	0	19.6%
Lainnya	50.0%	3.1%	50.0%	28.6%	0	23.4%

7. Omset Hasil Penjualan Produk

Omset penjualan per bulan di setiap sektor ekonomi kerakyatan ini sangat beragam untuk masing-masing sektor, sektor pertanian dan perikanan misalnya, omset perbulan sampai dengan Rp. 2.000.000,- berkisar 43 % s/d 44 %, khusus sektor pertanian 22

% mampu mencapai omset perbulan di atas Rp. 50.000.000,-. Sedangkan omset penjualan per bulan terkecil berada di sektor peternakan, semua responden hanya mampu mencapai omset per bulan di bawah Rp. 2.000.000,-.

Tabel 9 : Rata-rata Omset perbulan

Omset/bulan	Pertanian	Perikanan	Peternakan	Industri Kecil	Pariwisata	Total
<2 juta	44.4%	43.3%	100.0%	33.9%	0.0%	36.4%
2-10 juta	22.2%	23.3%	0.0%	42.4%	0.0%	31.8%
11 - 18 juta	0.0%	6.7%	0.0%	8.5%	0.0%	6.5%
19 - 26 juta	0.0%	6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%
27 - 34 juta	0.0%	3.3%	0.0%	10.2%	0.0%	6.5%
35 - 42 juta	11.1%	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%
43 - 50 juta	0.0%	6.7%	0.0%	3.4%	0.0%	3.7%
51 - 58 juta	22.2%	6.7%	0.0%	1.7%	0.0%	4.7%
> 59 juta	11.1%	6.7%	0.0%	6.8%	0.0%	6.5%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

8. Peralatan Yang Digunakan

Dari hasil penelitian, diperoleh data bahwa penggunaan peralatan dalam proses produksi tidak sama untuk masing-masing sektor usaha. Adapun jenis peralatan yang digunakan seperti peralatan manual, mesin atau campuran (yakni menggunakan alat manual dan juga mesin dalam proses produksinya). Sektor pertanian seluruhnya masih menggunakan peralatan manual, dari sektor perikanan 84.4 % masih menggunakan peralatan manual sedangkan 15.6 % lainnya menggunakan peralatan manual dan peralatan mesin, sementara sektor peternakan 50 % responden masih menggunakan peralatan manual sementara 50 % lainnya menggunakan manual dan mesin, sedangkan untuk sektor indusrtri kecil 39.7 % responden menggunakan peralatan manual, 28.6 % menggunakan mesin dan 31.7 % lainnya menggunakan peralatan manual sekaligus menggunakan mesin.

Tabel 10 *:*Peralatan yang dipakai dalam produksi

Jenis Alat	Pertanian	Perikanan	Peternakan	Industri Kecil	Pariwisata
Manual	70.0%	84.4%	50.0%	39.7%	0.0%
Mesin	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%	0.0%
Campuran	30.0%	15.6%	50.0%	31.7%	0.0%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%

9. Perkembangan Tenaga Kerja

Dari hasil penelitian, diperoleh data bahwa setelah tahun 1999 terjadi sedikit penurunan penyerapan tenaga kerja kelima sektor yang menjadi objek penelitian. Secara umum, Tahun 1997, penyerapan tenaga kerja 28,6 persen yang meningkat jauh dari tahun 1996 yang hanya 7,3 %. Tahun 1998, penyerapan tenaga kerja 23,3 % yang kemudian meningkat kembali tahun 1999 yang mencapai 27 %. Diperoleh informasi, penurunan perkembangan tenaga kerja ini berhubungan dengan sektor perdagangan. Dalam kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja, sektor perdagangan mempunyai kontribusi yang cukup besar.

Tabel 11 : Perkembangan tenaga kerja per sektor usaha ekonomi kerakyatan

Tahun	Pertanian	Perikanan	Peternakan	Industri Kecil	Pariwisata	Total
1999	16.7%	17.3%	0.0%	32.2%	0.0%	27.0%
1998	50.0%	34.2%	33.3%	17.2%	0.0%	23.3%
1997	14.3%	2.8%	0.0%	43.2%	0.0%	28.6%
1996	0.0%	18.3%	0.0%	3.5%	0.0%	7.3%

2. Permasalahan Usaha

Dari penelitian ini diperoleh data bahwa permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha perekonomian rakyat antara lain masalah bahan baku, pemasaran dan permodalan. Masalah bahan baku merupakan masalah utama yang dihadapi semua sektor usaha . Dari responden yang dipilih ternyata diatas 65 % responden seluruh sektor menghadapi permasalahan bahan baku, bahkan untuk sektor perternakan 100 % reponden menyatakan bahwa masalah utama mereka terletak pada masalah bahan baku. Adapun untuk jenis permasalahan bahan baku, seperti harga bahan baku yang tidak stabil, ongkos transport untuk bahan baku yang tinggi dan lainnya. Sehingga walaupun tidak sampai menghambat produksi dan terputusnya pasokan bahan baku namun untuk mendapatkan bahan baku tersebut menjadi sangat sulit yang merupakan masalah tersendiri bagi pengusaha ekonomi kerakyatan ini.

Sedangkan untuk masalah pemasaran sektor pertanian, hanya 10 % yang mengaku mengalami kesulitan, sedangkan sektor perikanan dan sektor industri kecil masing-masing 6.3 %. Sementara 20 % sektor pertanian menyatakan menghadapi masalah

permodalan, 18.8 % pada sektor perikanan dan 9.5 % pada sektor industri kecil.

Walaupun data mengenai manajemen dan kendala sdm serta informasi dilapangan tidak dimunculkan dalam tabel, bukan berarti tidak terdapat masalah. Dari observasi yang dilakukan diketahui bahwa kondisi ekonomi kerakyatan di Kota Batam masih dikelola secara tradisional. Unsur-unsur manajemen usaha modern belum diikutsertakan dalam menjalankan usaha. Hal ini terlihat dari pertimbangan yang dipakai dalam memilih sektor ekonomi kerakyatan, yang belum sepenuhnya berorientasi kepada kebutuhan pasar.

Tabel 12 : Permasalahan yang dihadapi pengusaha ekonomi kerakyatan

Permasalahan	Pertanian	Perikanan	Peternakan	Industri Kecil	Pariwisata	Total
Bahan baku	70.0%	65.6%	100.0%	76.2%	0	72.9%
Pemasaran	10.0%	6.3%	0.0%	6.3%	0	6.5%
Produksi	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	0	0.9%
Modal	20.0%	18.8%	0.0%	9.5%	0	13.1%
Manajemen	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%
SDM	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%
Infomasi	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0	0.0%
Lainnya	0.0%	9.4%	0.0%	6.3%	0	6.5%

3. Peranan Pemerintah Terhadap Perkembangan Usaha

Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh data bahwa peranan pemerintah terhadap perkembangan usaha kecil masih sangat minim jika dilihat dari bentuk bantuan yang diberikan. Bentuk bantuan tersebut hanya berkisar pada pemberian kredit lunak, keringanan pajak, teknik produksi, dan lokasi.

Sektor pertanian misalnya, 100 % mengaku hanya pernah mendapat bentuk bantuan pemerintah dalam bentuk kredit lunak,

Sedangkan pada sektor perikanan, 75 % menyatakan bahwa bentuk bantuan tersebut berupa kredit lunak, dan 25 % menyatakan bentuk bantuan pemerintah tersebut dalam bentuk tempat usaha. Pada sektor industri kecil, bentuk bantuan tersebut lebih banyak lagi yaitu 71.4 % dalam bentuk kredit lunak, 14.3 % dalam bentuk keringanan pajak, dan 14.3 % lainnya dalam bentuk teknik produksi. Sementara dari yang terpilih pada sektor perternakan belum tersentuh bantuan sama sekali.

Tabel 13 : Bentuk bantuan Pemerintah terhadap usaha ekonomi kerakyatan

Bentuk Bantuan	Pertanian	Perikanan	Peternakan	Industri Kecil	Pariwisata	Total
Modal	100.0%	75.0%	0.0%	71.4%	0.0%	75.0%
Pajak ringan	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	8.3%
Manajemen	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Produksi	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	8.3%
Desain	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Lokasi	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%
Pemasaran	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Bahan baku	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Informasi	0%	0%	0%	0%	0%	0%

4. Organisasi Dan Jaringan Usaha

Dalam penelitian ini juga didapatkan data tentang keikutsertaan para pelaku ekonomi rakyat pada asosiasi atau organisasi tertentu. Lebih dari 90 % di semua sektor menyatakan tidak menjadi anggota asosiasi atau organisasi usaha tertentu, sedangkan yang ikut anggota asosiasi hanya di bawah 10 %.

Tabel 14 : Keikutsertaan pelaku ekonomi kerakyatan pada asosiasi tertentu

Kerja sama	Ikut serta	Pertanian	Perikanan	Peternakan	Industri Kecil	Pariwisata	Total
Asosiasi	Ya	10.0%	6.3%	0.0%	7.9%	0.0%	7.5%
	Tidak	90.0%	93.8%	100.0%	92.1%	0.0%	92.5%
Mitra kerja	Ya	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	Tidak	0.0%	3.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%

Banyaknya pelaku ekonomi rakyat yang tidak menjadi anggota asosiasi disebabkan ketidaktahuan mereka tentang bagaimana menjadi anggota asosiasi serta kurangnya informasi tentang asosiasi itu sendiri. Sedangkan keinginan mereka untuk menjadi anggota asosiasi sangat besar, ini dapat dilihat dari harapan mereka jika menjadi anggota asosiasi atau organisasi tertentu. Antara lain kerja sama dalam bidang pemasaran, tukar informasi tentang kegiatan produksi, tentang bagaimana memenuhi kebutuhan modal, serta keinginan mereka untuk meningkatkan keuntungan.

Tabel 15 : Manfaat yang diharapkan dengan menjadi anggota asosiasi/ mitra kerja

Jenis Manfaat	Pertanian	Perikanan	Peternakan	Industri Kecil	Pariwisata	Total
Produksi	0.0%	3.1%	0.0%	3.2%	0.0%	2.8%
Pemasaran	10.0%	6.3%	0.0%	19.0%	0.0%	14.0%
Keuntungan	10.0%	12.5%	0.0%	3.2%	0.0%	6.5%
Modal	0.0%	12.5%	0.0%	1.6%	0.0%	4.7%

5. Pesaing dan Persaingan

Dalam hal persaingan, hanya 8,4 % responden yang menganggap bahwa usaha sejenis yang dilakukan oleh pihak lain dianggap sebagai pesaing. Sedangkan 57 % menyatakan usaha sejenis yang dilakukan oleh pihak lain merupakan mitra kerja. Sebanyak 34,6 % menyatakan usaha sejenis tidak dianggap baik sebagai pesaing maupun mitra kerja.

Pelaku ekonomi kerakyatan yang menganggap 100 % pengusaha sejenis merupakan mitra usaha adalah pengusaha bidang peternakan. Sebaliknya, industri kecil merupakan sektor yang

mempunyai anggapan terbesar bahwa pengusaha sejenis merupakan pesaing, yakni 11,1 % dibanding sektor lainnya.

Tabel 16 Pengaruh Usaha sejenis terhadap usaha ekonomi kerakyatan

Pengaruh	Pertanian	Perikanan	Peternakan	Industri Kecil	Pariwisata	Total
Pesaing	10.0%	3.1%	0.0%	11.1%	0.0%	8.4%
Mitra	30.0%	59.4%	100.0%	58.7%	0.0%	57.0%
Lainnya	60.0%	34.4%	0.0%	22.2%	0.0%	29.0%
Tidak tahu	0.0%	3.1%	0.0%	7.9%	0.0%	5.6%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Output atau hasil produksi yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi kerakyatan, ternyata dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat, yakni 80.4 %. Di lapangan, diperoleh informasi adanya kesulitan pelaku ekonomi kerakyatan untuk membedakan segmentasi pasarnya. Jika dilihat per sektor, diketahui 50 % hasil produksi peternakan yang mempunyai segmentasi pasar tersendiri, yakni 50 % outputnya dikonsumsi oleh masyarakat kelas atas.

Tabel 17: Konsumen Produksi usaha ekonomi kerakyatan (dalam persen)

Konsumen	Pertanian	Perikanan	Peternakan	Industri Kecil	Pariwisata	Total
Rendah	0.0%	3.1%	0.0%	3.2%	0.0%	2.8%
Menengah	10.0%	0.0%	0.0%	9.5%	0.0%	6.5%
Atas	0.0%	3.1%	50.0%	0.0%	0.0%	1.9%
Semua lapisan	90.0%	90.6%	50.0%	74.6%	0.0%	80.4%
Lainnya	0.0%	3.1%	0.0%	12.7%	0.0%	8.4%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

Hal yang tidak kalah pentingnya dari hasil penelitian ini adalah, diketahuinya informasi tentang upaya pelaku ekonomi kerakyatan untuk memperbesar jangkauan pemasarannya. Secara umum diketahui, untuk memperbesar pemasaran outputnya, pelaku ekonomi kerakyatan akan meningkatkan kualitas produksinya agar masyarakat sebagai konsumen puas atau mendapatkan nilai utilitas yang lebih tinggi setelah mengkonsumsi hasil produknya. Ini ditunjukkan dengan angka 37,4 % responden yang melakukan hal itu.

Sedangkan usaha lain yang dilakukan adalah dengan diversivikasi produk, yakni membuat produknya beragam, hal ini dilakukan oleh 21,5 % masyarakat. Sedangkan langkah ketiga yang ditempuh agar pemasarannya bertambah adalah dengan menurunkan harga jual hasil produksinya sebesar 16,8 %.

Dilihat berdasarkan sektor usaha, diketahui 40 % petani, untuk menambah output pemasarannya dengan menurunkan harga jual. Di lapangan, diketahui petani melakukan hal itu karena saat menghasilkan produksi pertaniannya, petani menghadapi saat panen yang bersamaan dengan petani lainnya. Ini berhubungan dengan sifat umum petani di Indonesia yang masih cenderung bersifat tradisional. Sedangkan 54 % dari sektor industri kecil, untuk menambah pemasarannya melalui diversivikasi produk dan untuk mempengaruhi harga jual hanya 27 %.

Hal lain yang cukup layak diamati adalah sedikitnya prosentase pelaku ekonomi kerakyatan yang memberikan baik komisi maupun promosi untuk menunjang pemasaran. Ini dibuktikan hanya 1,9 % pelaku ekonomi kerakyatan yang memberikan komisi dan 0,9 % yang melakukan promosi produknya.

Tabel 18 : Cara menembus/ memperbesar pasar pada usaha ekonomi kerakyatan (dalam %)

Strategi	Pertanian	Perikanan	Peternakan	Industri Kecil	Pariwisata	Total
Harga murah	40.0%	18.8%	0.0%	12.7%	0.0%	16.8%
Kualitas Produksi	10.0%	12.5%	50.0%	54.0%	0.0%	37.4%
Promosi	0.0%	0.0%	0.0%	1.6%	0.0%	0.9%
Komisi	0.0%	3.1%	0.0%	1.6%	0.0%	1.9%
Saudara	0.0%	3.1%	0.0%	4.8%	0.0%	3.7%
Ragam produksi	20.0%	40.6%	50.0%	4.8%	0.0%	17.8%
Lainnya	30.0%	21.9%	0.0%	20.6%	0.0%	21.5%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%

Analisa Data

Dari tabel 1 mengenai tahun mulai usaha ekonomi kerakyatan di Batam, terlihat pertumbuhan yang cukup tajam sejak timbulnya krisis moneter dan krisis ekonomi yang mengimbas Batam. Hal ini menandai bahwa sektor usaha ekonomi kerakyatan ini selain lahan baru juga merupakan alternatif lain dalam mengembangkan dan menggerakkan roda perekonomian Batam.

Oleh sebab itu wajar, jika Pemerintah setempat dituntut berperan lebih aktif dalam menumbuh kembangkan usaha ekonomi kerakyatan ini karena usaha ini dapat berkembang dengan baik disaat usaha-usaha besar lainnya terpuruk.

Dari distribusi usaha yang dilakukan seperti terlihat dalam tabel 2, dari masing-masing kecamatan memiliki sektor usaha khas atau yang dominan dilakukan. Hal ini erat kaitannya dengan potensi yang ada pada daerah tersebut dan juga letak geografisnya serta kekuatan lain yang ada pada daerah yang bersangkutan. Kecamatan Belakang Padang kita lihat usaha yang berkembang adalah industri kecil 66,67 % kemudian disusul oleh perikanan 33,33 %. Sedangkan Bulang 70 % merupakan sektor perikanan. Di Kecamtan Galang Perikanan menempati posisi tertinggi dengan 66,67 %. Di Sei-Beduk usaha yang dominan adalah industri kecil yang diikuti dengan perikanan sebesar 20 %. Di Nongsa perkembangan usaha industri kecil mendominasi usaha ekonomi kerakyatan yang diikuti dengan perikanan. Sekupang primadona usaha yang dilakukan adalah industri kecil dan perikanan. Lubuk Baja 90 % industri kecil. Batu ampar selain industri kecil sektor perikanan juga layak diperhitungkan. Hal tersebut diatas dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi

pengambil kebijakan dalam pengembangan usaha ekonomi kerakyatan serta bidang – bidang usahanya.

Dari sebaran modal awal yang digunakan pelaku usaha ekonomi kerakyatan ini mayoritas menggunakan modal awal Rp 1 hingga Rp 5 juta rupiah (Tabel 3 hampir 40 %). Hal ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah setempat dalam pengalokasian dana pinjaman untuk mengembangkan usaha ini kelak.

Dari tabel 3 mengenai persentase perbandingan jenis modal terlihat lemahnya peran serta perbankan dan lembaga keuangan permodalan lainnya untuk menumbuh kembangkan usaha ekonomi kerakyatan ini. Hal ini dapat menjadi suatu ancaman kelak bagi perkembangan usaha dibidang ini jika tercemari oleh tangan-tangan rentenir jika tidak dicermati oleh lembaga keuangan resmi lainnya.

Dari tujuan pemasaran terlihat masih terbukanya tujuan pasar yang belum digarap seperti pasar domestik dan luar negeri. Hal ini merupakan peluang yang sangat potensial didalam mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan usaha yang berorientasi ekspor dan pasar domestik. Ditambah lagi dengan

kedekatan Pulau Batam dengan Singapura yang merupakan jendela perdagangan ekspor dunia.

Dari kelima sektor usaha yang menjadi objek penelitian, terlihat dalam tabel 9 omset dengan nilai yang tinggi. Antara lain seperti pertanian 22,2 % beromset Rp 51 – Rp 58 juta / bulan. Kemudian industri kecil dan perikanan sebesar 42,4 % dan 23, 3 % dengan omset Rp 2- Rp 10 juta / bulan. Hal ini menandakan bahwa jenis usaha diatas dengan omset tersebut memberikan laba yang cukup tinggi, dengan demikian masih terbuka kesempatan atau peluang untuk masuk kedalam jenis usaha rtersebut.

Lambatnya mengadopsi teknologi, yang ditunjukkan dari minimnya penggunaan mesin dalam berproduksi. Dikhawatirkan usaha yang dilakukan akan lambat pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh sebab itu teknik-teknik dan mesin produksi yang canggih dan tepat guna agar segera diperkenalkan dan dikembangkan pada pelaku usaha ekonomi kerakyatan ini, agar tidak tertinggal seandainya FTZ diberlakukan kelak.

Dari data pertumbuhan PER terlihat bahwa peluang untuk tumbuh masih cukup baik, terlihat pertumbuhan usaha sekitar 4.22 % dan pertumbuhan tenaga kerja 5.38 %.

Tahun	Laju Pertumbuhan	
	Usaha PER	Tenaga Kerja PER
1995	14.3%	
1996	8.7%	7.3%
1997	13.2%	28.6%
1998	23.2%	23.3%
1999	28.1%	27.0%
2000*)	30.2%	35.0%
2001*)	34.4%	40.4%
2002*)	38.6%	45.8%

**) Angka prediksi*

Berdasarkan data penelitian LPPM PTB mengenai Studi daya dukung SDM terhadap perkembangan industri diperoleh angka pertumbuhan tenaga kerja disektor industri (formal) pada tahun 2001

sebesar 15.29 %. Terlihat bahwa penyerapan sektor informal dengan adanya PER sangat menjanjikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Walaupun data mengenai manajemen dan kendala sumber daya manusia dilapangan tidak dimunculkan dalam bab sebelumnya, dari observasi yang dilakukan dapat disimpulkan, bahwa kondisi ekonomi kerakyatan di Kota Batam masih dikelola secara tradisional. Unsur-unsur manajemen usaha modern belum diikutsertakan dalam menjalankan usaha. Hal ini terlihat dari pertimbangan yang dipakai dalam memilih sektor ekonomi kerakyatan, yang belum sepenuhnya berorientasi kepada kebutuhan pasar.

Dilihat dari tahun memulai usaha, terlihat bahwa sektor ekonomi kerakyatan di Batam mengalami pertumbuhan yang signifikan setelah tahun 1997, yakni semenjak krisis ekonomi melanda Bangsa Indonesia. Dikhawatirkan sektor ekonomi kerakyatan ini hanya dijadikan pelarian saja, yang tentunya untuk

jangka panjang kurang bisa diandalkan dalam menghadapi ketatnya persaingan pasar bebas.

Diketahui bahwa 33 % lebih ekonomi kerakyatan telah dimulai sebelum tahun 1995. Tetapi, penyebaran pelaku ekonomi kerakyatan pada saat itu belum merata, karena yang melakukan kegiatan ekonomi tersebut berada di daerah-daerah kepulauan dan mereka menjalankan usaha tanpa berorientasi pasar dan laba. Orientasi masih berupa pemenuhan kebutuhan dalam kelompok mereka sendiri.

Dari distribusi lokasi usaha ekonomi kerakyatan 45 % berlokasi di pinggir pantai/laut atau kawasan hinterland, hal ini menunjukkan gejala bahwa kawasan pinggir pantai dan laut ini perlu diarahkan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan di Kota Batam, karena biasanya penduduk yang tinggal disekitar laut dan pantai adalah penduduk marginal

Dari segi permodalan, ekonomi kerakyatan di Batam masih sangat jauh aksesnya ke lembaga permodalan, ini terlihat lebih dari 95 % pelaku ekonomi kerakyatan menggunakan modal sendiri dalam menjalankan usahanya. Penyebab hal itu adalah masih kurangnya

informasi mereka terhadap lembaga perbankan dan keberanian berhubungan dengan perbankan. Selain itu, *image* tentang terlalu berbelit-belitnya urusan dengan perbankan juga menjadi penghalang bagi mereka untuk berurusan dengan lembaga perbankan ini. Akibat dari semua itu, mayoritas pengusaha ekonomi kerakyatan hanya memiliki modal usaha dan omset masih di bawah Rp 2.000.000.

Dalam keadaan demikian, peran pemerintah selaku mediator untuk mempertemukan mereka dengan perbankan sangat diharapkan, sehingga terjalin komunikasi dua arah antara kereditur dan debitur tersebut. Tetapi, pelaku usaha kecil itu selama ini mengaku peranan pemerintah masih belum optimal, padahal mereka berharap peranan pemerintah yang sangat mereka butuhkan. Peranan pemerintah yang diharapkan adalah peranannya sebagai sumber informasi, peranan dalam hal pembinaan, dan pemberian bantuan kredit lunak

Selain itu, banyaknya asosiasi atau perkumpulan pengusaha-pengusaha kecil yang ada di Batam juga belum dimanfaatkan untuk berbagi informasi di antara mereka. Mereka mengaku kesulitan untuk ikut masuk menjadi anggota perkumpulan-perkumpulan tersebut.

Padahal, mereka seandainya ikut asosiasi-asosiasi itu berharap banyak dapat memperoleh informasi tentang pemasaran, akses ke sumber permodalan, dan akses ke pemerintah.

Seperti dalam asosiasi, program kemitraan yang digalakkan pemerintah melalui BUMN-BUMN, juga belum terlalu banyak menyentuh mereka. Permasalahan yang dihadapi pun sama, yakni ketidaktahuan mereka tentang bagaimana cara atau prosedur yang harus dihadapinya.

Tentang pemasaran, terlihat pelaku ekonomi kerakyatan tidak terlalu menghadapi masalah yang cukup serius, artinya produk mereka diterima pasar, meski dilihat dari jumlahnya relatif sedikit. Dari lima sektor ekonomi kerakyatan yang menjadi objek penelitian, mereka sudah mempunyai segmentasi pasar sendiri-sendiri. Kebijakan menurunkan harga untuk mencari pasar, dilakukan oleh 20 % pengusaha ekonomi kerakyatan ini, selebihnya, untuk mencari pasar, mereka cenderung melakukan diversifikasi usaha, meski dalam tingkat yang relatif rendah.

Dalam memasarkan produknya, mereka menyukai langsung bertemu konsumennya. Ini memang salah satu ciri yang menonjol

dalam sistem yang masih subsisten. Artinya, pengusaha, bertindak dalam segala hal, mulai pembelian bahan baku, mengolah produk hingga memasarkannya.

Meski demikian, jika dikaitkan dengan bisnis modern, sebetulnya pelaku ekonomi kerakyatan di Batam masih tertinggal. Dengan kondisi Batam sebagai kota industri yang terletak di daerah perbatasan pusatnya perdagangan dunia, Singapura, ternyata mereka belum mampu menjual outputnya tersebut ke Singapura atau ke negara lain. Bahkan, dilihat dari sesama pelaku ekonomi kerakyatan sejenis, terkesan mereka terdesak. Buktinya hingga kini barang-barang yang mereka hasilkan belum memenuhi kebutuhan pasar di Batam yang terus meningkat.

Dengan kondisi demikian, tentu saja bisa dimaklumi jika permasalahan yang menonjol dan dihadapi oleh mereka adalah terbatasnya bahan baku. Ini berkaitan dengan keterbatasan modal dan informasi yang mereka miliki. Kekurangan informasi dan bahan baku itu juga, berdampak pada proses transfer teknologi mereka. Data hasil penelitian menunjukkan untuk memproses produk keluarannya, pelaku ekonomi kerakyatan masih manual dan

penggunaan mesin-mesin baru masih mempunyai tingkat persentase yang relatif rendah.

Secara makro dari hasil observasi dilapangan permasalahan SDM ini akan memberikan efek yang buruk dikemudian hari. Walaupun responden dalam hal ini tidak menyadari permasalahan yang mereka hadapi. Namun dari tingkat produksi dan kinerja yang ditunjukkan tampaklah permasalahan SDM tersebut. Diketahui ekonomi kerakyatan mempunyai permasalahan seperti terbatasnya kemampuan SDM. SDM ini tentunya dalam kaitannya dengan pekerja yang digunakan dalam proses ekonomi kerakyatan tersebut. Minimnya kualitas SDM, otomatis diikuti dengan rendahnya produktivitas, rendahnya produktivitas akan disertai dengan minimnya kompensasi yang mampu diberikan pada pekerja di sektor ini. Meskipun demikian, di sisi lain, jika dilihat dari kuantitas, sektor ekonomi kerakyatan, mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar.

Tentang persaingan, 80 % lebih pelaku ekonomi kerakyatan di Batam menganggap di antara mereka bukan sebagai pesaing.

Sebaliknya, mereka menganggap mereka adalah mitra yang dapat saling memberikan keuntungan.

Itulah gambaran umum dari hasil data questioner maupun dari observasi yang dilakukan tentang kondisi ekonomi kerakyatan di Batam. Hal-hal terpenting yang bisa dijadikan kesimpulan dari penggambaran umum diatas sebagai berikut:

1. Selama ini, sektor ekonomi kerakyatan di Batam masih dikelola secara tradisional. Asas-asas bisnis dan manajemen modern yang harus dikuasai mereka menghadapi persaingan yang semakin ketat, belum diadopsi mereka. Bahkan, dikhawatirkan, ekonomi kerakyatan hanya menjadi pelarian karena pelaku usahanya tidak tertampung di sektor formal.
2. Keterbatasan mengembangkan ekonomi kerakyatan selama ini adalah keterbatasannya terhadap sumber informasi. Hal ini mencangkup informasi tentang permodalan, pengembangan SDM, jaringan pemasaran dan informasi tentang berbagai kebijakan pemerintah,

khususnya dalam bidang pengmbangan usaha kecil dan menengah.

3. Peranan pemerintah dalam bidang ekonomi kerakyatan, dinilai mayoritas pelaku ekonomi kerakyatan belum optimal dan belum menyentuh langsung pada usaha mereka. Padahal, mereka mengakui peranan pemerintah sangat membantu mengembangkan usahanya.
4. Sektor ekonomi kerakyatan, masih menyimpan potensi yang sangat besar, baik dilihat dari besarnya penyerapan tenaga kerja, upaya meningkatkan pendapatn per kapita masyarakat maupun secara makro meningkatkan pendapatan Kota Batam. Hal ini terlihat dari masih terbukanya pasar dalam penyerapan produk-produk yang dihasilkan ekonomi kerakyatan ini. Jika sektor ini tidak dikelola sejak sekarang secara profesional, sangat dikhawatirkan, sektor ini akan digarap oleh pelaku pasar bebas yang sebentar lagi tidak lagi terbendung kedatangannya.

Saran

Dengan melihat diskripsi hasil penelitian seperti yang disebutkan dalam kesimpulan di atas, perlu diberikan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan masukan dalam proses pembuatan kebijakan dalam mengembangkan usaha ekonomi kerakyatan di Kota Batam.

1. Jika ekonomi kerakyatan ini hendak dikembangkan, hanya ada satu alternatif yakni sektor ini saatnya dikelola oleh pelakunya secara profesional dengan mengadopasi manajemen bisnis yang modern. Asas efektif dan efektivitas, mutlak diterapkan dalam mengembangkan sektor ini.
2. Kemauan pelaku ekonomi kerakyatan mengembangkan sektor ini, tidak banyak artinya jika tidak didukung oleh pihak lain, yakni aparat pemerintah, lembaga permodalan dan masyarakat sendiri. Kebijakan pemerintah pusat saat ini yang kurang mendukung ekonomi kerakyatan dengan menghapus beberapa kredit lunak, harus digantikan oleh pemerintah daerah.

3. Kebijakan yang dibuat pemerintah daerah dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan harus dibuat yang paling dapat menyentuh pelaku usahanya. Saatnya janji-janji yang sering disampaikan dalam berbagai forum, bisa direalisasikan ke tengah-tengah mereka. Kebijakan-kebijakan yang sebelumnya berpihak pada pelaku ekonomi kerakyatan bisa diefektifkan lagi, sedangkan kebijakan yang merugikan golongan ini, bisa ditinjau ulang.
4. Keterbatasan sumber informasi mereka selama ini, yang membuat mereka sulit untuk tumbuh dan berkembang harus segera dicarikan alternatifnya. Saatnya, sarana – sarana komunikasi modern bisa dikenalkan pada mereka. Jika hal ini tidak dilakukan, dikhawatirkan, kebijakan lain yang telah ditempuh kurang memberikan hasil yang optimal.
5. Agar dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan yang merupakan sub sistem dari sistem ekonomi pemerintah Kota Batam, hendaknya diselaraskan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat pelaku ekonomi

kerakyatan, dengan perkataan lain penerapan ekonomi jangan dipisahkan dengan pola hidup sosial budaya masyarakatnya.

AMPERA DAN EKONOMI RAKYAT : ABSURDITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Ampera yang saya maksud dalam tulisan ini bukan ingin menjelaskan sebuah jembatan yang besar dan megah di Kota Palembang atau Ampera juga tidak bermaksud untuk menyoroti rumah makan padang sederhana yang biasanya ada di pinggir jalan dan harganya biasanya murah meriah atau nama beberapa becak yang berseliweran di jalanan Malioboro Yogyakarta. Ampera yang saya maksud dalam tulisan ini adalah Amanat Penderitaan Rakyat yang akronimnya AMPERA.Ampera adalah salah satu pemikiran politik dari pendiri bangsa kita Soekarno. Wajar saja, ketika indonesia mulai merdeka, Soekarno melihat bahwa masalah terbesar yang dihadapi bangsa ini adalah kemiskinan dan kemelaratan rakyat. Kondisi yang sama juga dihadapi oleh negara-negara yang baru merdeka seperti India, Mesir, Pakistan dan lainnya, yang sama-sama melihat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan bangsa adalah

musuh baru pertama yang dihadapi setelah selesai dengan musuh penjajah.

Zaman modern ini pun pemikiran tentang Ampera masih dominan dalam wacana politik yang bahkan secara resmi masuk dalam GBHN, UU maupun Peraturan pemerintah, namun tentunya sudah berganti wujud atau nama. Saat ini namanya program pengentasan kemiskinan atau Inpres Desa Tertinggal atau nama lainnya yang kadang diadopsi oleh daerah namun pada intinya tetap berkutat pada masalah kemiskinan, kemelaratan dan keterbelakangan rakyat.

Kalau Ampera adalah pemikiran Bung Karno, Bung Hatta juga punya pemikiran klasik, yaitu ekonomi rakyat.Konsep ekonomi rakyat yang diusung oleh Bung Hatta yang kemudian secara formalnya termaktub dalam UUD 1945 dalam pasal 33. Ekonomi rakyat yang digagas oleh Bung Hatta berdasarkan kondisi pada saat itu terjadi baik di Asia maupun di Eropa, yaitu sebagai akibat adanya pertentangan kelas yaitu antara kelas borjuis dan kelas proletar. Menurut Bung Hatta ekonomi Rakyat ala indonesia adalah suatu jalan tengah sebagaimana yang merupakan Filosofi dari pasal 33 UUD

1945, yang menurut berbagai kalangan sudah mencakup 2 (dua) aliran utama ekonomi yaitu kapitalisme dan sosialisme. Bung Hatta berpendapat, kemandirian ekonomi suatu bangsa hanya akan dapat tercapai apabila seluruh mesin kegiatan ekonomi digerakkan oleh kekuatan rakyat.

Kini pun pemikiran Bung Hatta tentang ekonomi Rakyat masih abadi.Berbagai instrument hukum dan perundang-undangan baik GBHN, UU, PP maupun Perda.

Dari uraian diatas, kita mengambil suatu kesimpulan, bahwa Ampera dan Ekonomi Rakyat adalah warisan sejarah yang umurnya hampir sama dengan usia Republik ini. Pemimpin bangsa ini silih berganti, namun ampera dan ekonomi rakyat masih merupakan jargon utama setiap generasi pemimpin republik ini. Saking seriusnya terhadap jargon-jargon yang berupaya membuat senang mayoritas rakyat indonesia yang miskin dan terbelakang, pemerintah membuat suatu institusi yang berupaya untuk mengakomodir Ampera dan ekonomi Rakyat dalam setiap pembuatan kabinet, yaitu menteri negara Koperasi dan UKM serta menteri negara penanggulangan kawasan tertinggal

Demikian juga Propinsi Kepulauan Riau, yang saat ini akan menghadapi pemilihan langsung kepala Daerah (gubernur) pada 30 Juni 2005 yang akan datang. Jargon-jargon ampera dan ekonomi rakyat mendominasi visi dan misi serta spanduk-spanduk dan orasi dalam kampanye.Isu-isu antara lain yang sering kita dengar adalah bapak koperasi dan UKM, bapak orang miskin, peduli buruh, peduli hinterland dan lain sebagainya. Yang semuanya berupaya untuk merebut simpati kelompok mayoritas di dalam propinsi ini yaitu orang miskin dan tertindas.Dan yang sangat mencengangkan kita, dalam kampanye yang dilakukan oleh Calon Gubernur dan Cawagub, mayoritas peserta kampanye tersebut adalah orang-orang yang masuk dalam kategori “Ampera dan ekonomi Rakyat”.

Paradoks memang, ketika pemerintahan telah berjalan secara definitif, jargon-jargon Ampera dan Ekonomi rakyat berubah menjadi kambing hitam (pedagang kaki lima yang terus digusur tanpa solusi atau pemukim rumah liar yang rumahnya digusur hanya karena akan dibangun mall atau hotel). Kita menyaksikan -pembangunan kota Batam dan kota-kota besar lainnya, bahwa biasanya pemerintah terpilih selalu lebih memperhatikan kelompok minoritas seperti

investor, pengusaha dan kelompok minoritas namun punya bargaining yang mayoritas. Di Batam misalnya, pertumbuhan investasi asing yang cukup tinggi ternyata kurang mempunyai efek pengganda (multifflier effect) secara signifikan terhadap perkembangan ekonomi rakyat demikian juga di Jakarta, pertumbuhan gedung-gedung bertingkat dan properti berbanding terbalik dengan kesejahteraan masyarakatnya.

Tidak ada satupun yang bisa menafikan bahwa petumbuhan ekonomi kota Batam begitu tinggi. Berbagai indikator-indikator seperti PDRB, tingkat pertumbuhan, inflasi dan indikator lainnya turut mendukung.Namun pertumbuhan itu juga secara paralel menumbuhkan berbagai kemelaratan dan kemiskinan. Berbagai potret tentang kemiskinan dan penderitaan rakyat masih mendominasi dalam setiap relung pembangunan ; rumah liar, lingkungan kumuh, anak telantar, premanisme dan pelacuran adalah potret besar dalam ruangan pembangunan Kota Batam

Dari apa yang dihasilkan oleh pembangunan di masa lalu, ada baiknya Pemerintah daerah melalui Badan perencananya beserta gubernur yang akan terpilih nantinya, harus bisa merealisasikan janji-

janjinya kepada masyarakat untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Pendekatan-pendekatan seperti lebih berorientasi pada investor asing atau konsep menjadi lokomotif ekonomi nasional harus diubah dan diarahkan agar mempunyai multifflier effect terhadap masyarakat umumnya, untuk apa menjadi lokomotif ekonomi nasional sedangkan penumpang di gerbong paling depan harus berdesakan mencari tempat duduk dan berebut mencari makanan ?.

Mahbub ul Haq dalam buku The Poverty of Curtain mengingatkan para perencana pembangunan "sudah waktunya kita membalikkan teori ekonomi dan meletakkan kepalanya di bawah. Laju pertumbuhan yang makin besar bukan jaminan untuk melawan kemiskinan yang makin buruk, memisahkan kebijaksanaan produksi dengan kebijaksanaan distribusi adalah tindakan salah dan berbahaya". Konsep Pertumbuhan dimanapun biasanya selalu menyisakan persoalan besar, yaitu ketimpangan (gap) baik ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan regional.

Jadi yang diperlukan nantinya dalam mengisi pemerintahan Propinsi Kepulauan Riau pasca Pilkada adalah sebuah perencanaan

pembangunan yang adil dan terintegrasi, yang disatu sisi kita mengundang investasi asing masuk ke Propinsi Kepri namun disisi lain masyarakat umum harus dapat menikmatinya dalam bentuk interaksi ekonomi alamiah (bukan dalam bentuk sumbangan atau community development). Propinsi ini juga butuh pembangunan yang berbasiskan lingkungan, hal ini terutama banyak sektor usaha ekonomi rakyat yang tergantung dengan lingkungan alam, misalnya petani budidaya ikan, rumput laut dan nelayan tentunya. Untuk itu diharapkan kepala daerah propinsi ini harus mampu mensinergikan antara kepentingan asing dengan kepentingan masyarakat banyak Kita telah melihat, manfaat investasi asing pada masa lampau hanyalah sebatas dalam penyerapan tenaga kerja dan infrastrukstur saja (berbagai kritikan tajam dari kalangan LSM menilai bahwa kekayaan kita telah di rampok oleh negara lain). Kedepan kita berharap, bahwa proses pembangunan di Propinsi kepulauan Riau harus bisa menjadi katalisator bangkitnya ekonomi rakyat yang jumlahnya mayoritas dalam struktur perekomian di dunia ketiga seperti Indonesia. Bung Hatta percaya, bahwa jika ekonomi rakyat maju, maka akan dapat meyerap lagi tenaga kerja yang seterusnya akan menghasilkan efek pengganda (multifflier effect) terhadap

produktivitas perekonomian dan konsumsi rumah tangga dan pada akhirnya adalah terwujudnya kemandirian ekonomi yang berbasiskan kekuatan dan pemberdayaan masyarakat.

SEPUTAR WTO (WORLD TRADE ORGANISATION)

World Trade Organization (WTO) didirikan pada tanggal 1 Januari 1995, melalui perjalanan dan perdebatan panjang pada putaran Uruguay selama 9 tahun dengan disepakatinya *Agreement the World Trade Organization*, yaitu persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang ditandatangani para menteri perdagangan negara-negara anggota WTO pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh, Maroko.

WTO adalah metamorfosis yang semakin sempurna dari GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Dibawah GATT, yang diatur adalah hanya perdagangan barang saja, namun di bawah WTO, pengaturan meliputi 3 bidang yaitu perdagangan barang,

perdagangan jasa dan Hak Atas kekayaan Intelektual (trade related intellectual proverty right). WTO yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss dan beranggotakan 146 Negara termasuk Indonesia yang bergabung pada awal pembentukan WTO yaitu 1 Januari 1995.

WTO memiliki fungsi utama, antara lain: mengawasi persetujuan perdagangan untuk multilateral trade, forum untuk penyelesaian sengketa dagang, menjalin kerjasama institusi international, mengawasi kebijakan perdagangan negara anggota dan memberikan bantuan teknis kepada negara berkembang. Pengambilan keputusan WTO diadakan pada Konfrensi Tingkat Mentri (KTM) yang diadakan 2 tahun sekali. Keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam KTM yang dihadiri oleh para menteri Perindustrian/Perdagangan negara anggota biasanya bersifat *legal binding* (mengikat secara hukum). Konferensi Tingkat Menteri WTO telah diadakan sebanyak 5 (lima) kali yaitu berturut-turut di Singapura 1996, Jenewa 1998, Seattle (AS) 1999, Doha (Qatar) 2001, Cancun (Mexico) 2003 dan berikutnya adalah di Hongkong (2005). Perlu dicatat, bahwa Konfrensi Tingkat Menteri (KTM) WTO hanya sukses di Singapura dan Doha, sedangkan di

Jenewa, Seattle dan baru-baru ini di Cancun dapat dikatakan gagal karena adanya penolakan dari kelompok negara-negara berkembang yang dimotori oleh kelompok 20 (G-20) yang dipimpin oleh Brazil, India, Afrika Selatan , Cina dan Indonesia yang terakhir bergabung.

Konferensi Tingkat Menteri 1 diadakan di Singapura tanggal 9-13 Desember 1996 dengan keputusan-keputusan yang populer dengan sebutan "*Singapore Issues* " antara lain: dibidang Investasi PMA, Belanja Pemerintah , Kebijakan Kompetisi dan fasilitas Perdagangan. Dibidang investasi misalnya, Perusahaan Multinasional menuntut penerapan Penanaman Modal Asing sampai 100 % . baik Investasi Manufaktur maupun jasa, penghapusan hambatan "*local content*" dan pembatasan impor. Di bidang Belanja Pemerintah, negara-negara maju memaksakan kehendaknya agar perusahaan mulitinasional bisa ikut serta dalam tender proyek belanja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur publik seperti jalan raya, jembatan, gedung-gedung pemerintah, waduk, irigasi dan proyek infrastruktur pemerintah lainnya. Di bidang Fasiltas perdagangan, mereka menuntut liberalisasi dalam aturan-aturan

yang bersifat supporting perdagangan seperti kepabeanan, standard teknis, karantina, pameran dagang dan lain-lain.

Pada KTM WTO yang keempat di Doha (Qatar) pada November 2001 dihasilkan konsensus-konsensus sebagai berikut : isu-isu pertanian, akses pasar untuk produk nonpertanian, dan hak atas kekayaan intelektual (intellectual property right)) yang terkait dengan perdagangan dan akses terhadap kesehatan masyarakat (Declaration on TRIPs Agreement and Public Health).

Implikasi Kebijakan WTO Bagi Indonesia

Menurut Aileen Kwa WTO adalah sebuah bentuk rekolonisasi dan peperangan yang halus namun sangat dahsyat. Ia menuntut anggotanya untuk menyerahkan hak kedaulatan dan kebebasan mereka untuk membuat kebijakan (dengan membatasi kemampuan mereka membuat pengaturan di dalam negeri sendiri) agar perusahaan-perusahaan transnasional dapat melakukan penjarahan dengan leluasa. Jenuhnya pasar di Utara mengharuskan TNC untuk merebut akses pada pasar di Selatan.Cakupan peraturan WTO yang

semakin lama semakin luas dirancang persis untuk keperluan itu.WTO mencungkil gembok yang mengunci pasar di negeri berkembang, bukan saja melalui penurunan tarif secara drastis namun juga melalui langkah-langkah "*trans-nasional*".Hasilnya adalah semakin terpuruknya perekonomian dan rakyat di negeri-negeri berkembang.

Kebijakan Investasi yang di dorong WTO misalnya, dapat menutup akses perusahaan domestik ikut mensuply bahan mentah maupun bahan penolong kepada Industri PMA. Karena Industri PMA dibebaskan dari kewajiban memakai "*local content*". Demikian Juga dengan sektor Belanja pemerintah, kontraktor domestik harus bersaing keras dengan kontraktor multinasional dalam tender proyek pemerintah yang tentu saja kontraktor multinasional memiliki segalanya baik teknologi, manajemen dan tentunya dana yang berlimpah. Dalam Pemberian subsidi dan kredit ekspor yang sangat besar, produk negara maju justru gencar memasuki pasar domestik negara berkembang, dan dalam perputarannya mematikan produsen lokal di negara berkembang. Meski demikian, toh negara maju tanpa merasa bersalah meminta pengurangan tarif dilaksanakan.Karena itu,

lengkap sudah ketidakadilan yang dirasakan negara berkembang, khususnya yang ekonominya bertumpu pada sektor pertanian. Demikian juga dengan fasilitas perdagangan, dimana dibuat standard-standard teknis yang oleh Indonesia cukup sulit untuk menerapkannya seperti Standarisasi tentang kapal laut/maritim dan kepabeanan. Di bidang pertanian, akibat adanya pembebasan tariff terhadap produk pertanian, Indonesia kini kehilangan banyak lahan pertanian termasuk Tebu, Beras, dan pertanian agrobisnis karena serbuan produk pertanian dari negara lain. Namun nun jauh di Utara sana, di Amerika dan Eropa, mereka justru memproteksi produk pertanian dari negara berkembang melalui kebijakan tariff dan non tariff yang termasuk isu lingkungan dan Hak Asasi Manusia..

Perlu diakui, pada awal terbentuknya WTO, belum tersedia studi empiris yang memberi penilaian atas cost and benefit kesepakatan WTO. Seiring dengan berjalannya waktu, banyak studi empiris yang menunjukkan bahwa dalam banyak kasus justru yang menerima manfaat terbesar kerja sama WTO adalah negara maju. Sedangkan pihak yang memikul beban paling besar atas kerja sama tersebut adalah negara-negara berkembang termasuk indonesia.

EKONOMI PASAR : UNTUK SIAPA ?

Pengertian Pasar secara tekstual dalam teori ekonomi mengandung unsur permintaan, penawaran dan Harga.Pasar dalam pengertian ini hanyalah sekedar alat teknis untuk mengalokasikan barang dan jasa. Adam Smith sebagai orang yang pertama memperkenalkan teori ekonomi pasar menyebutkan bahwa pasar dimaksudkan untuk mengatur pengalokasian sumberdaya yang optimum untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui kebebasan individu dan kapital yang dimiliki oleh swasta. Pasar, masih menurut Smith, tidak membutuhkan perencanaan dan pengawasan dari pihak manapun, baik pemerintah atau institusi lainnya, biarkan saja apa adanya dan suatu *invisible hand* akan mengatur kembali kearah keseimbangan.

Namun saat ini pengertian Pasar tidak lagi dianggap sebagai sekedar alat teknis untuk mengalokasikan barang dan jasa, tetapi sudah dianggap sebagai satu-satunya cara yang mungkin untuk mengatur masyarakat, bahkan kekuatan pasar ini diyakini dapat

memecahkan berbagai problem pembangunan dunia. Bahkan beberapa orang percaya bahwa tidak hanya produksi, distribusi dan konsumsi yang tunduk pada pasar, namun juga kehidupan dan kebangsaan pun harus menyesuaikan diri dengan pasar. Perubahan definisi dan makna pasar ini oleh beberapa pakar disebut sebagai kapitalias yang berganti mantel yang kadangkala disebut neoliberal.Pasar Neoliberal tumbuh melintasi batas negara, merasuk ke lembaga pemerintahan, bermetamorfosis pada kapitalis global dan lokal dan ditunjang oleh teknologi informasi yang canggih.

Ada beberapa faktor yang mendorong timbulnya pasar neoliberal sedemikian dahsyatnya yaitu munculnya *Multinational Corporation* (MNC) yang memiliki asset kekayaaan yang bahkan lebih besar dari negara tujuan. Dalam prakteknya MNC ini semata-mata bertujuan untuk mengeruk keuntungan tanpa memperdulikan kondisi nasionalime negara tempat MNC berada. Disamping itu ketangguhan pasar neoliberal ini didukung oleh hadirnya 3 organisasi "pengatur" ekonomi dunia yaitu : World Bank, World Trade Organisation (WTO) dan International Monetary Fund (IMF). Ketiga organisasi ini bekerja untuk menjamin bahwa negara-negara

diseluruh dunia patuh menjalankan prinsip pasar bebas dan perdagangan bebas. Bila ternyata ada negara-negara yang tidak mematuhi, biasanya akan ada sanksi yaitu berupa embargo, dikucilkan, hambatan tariff dan non tariff dan lain-lain.Ironisnya, keberadaaan 3 lembaga ini mebuat negara-negara seolah kehilangan harga diri dan nasionalisme, ketika negara dituntut "*laissez faire*" terhadap produk, produksi dan distribusi, justru muncul 3 organisasi ini yang ikut intervensi dalam segala kebijakan ekonomi. Tiga Organisasi dan organisasi patronasenya muncul sebagai "Negara diatas negara" dan demokrasi ekonomi terpimpin Soekarno diadaptasi dengan nama baru :**Demokrasi Ekonomi Global Terpimpin**

Kita mungkin masih mengingat, betapa krisis ekonomi 1997 yang merusak segala sendi perekonomian dan merusak mental dan budaya bangsa, diyakini oleh banyak fihak adalah hasil nyata kebijakan pasar neoliberal : yaitu ketika Indonesia menganut sistem Devisa Bebas dan perdagangan bebas, yang ditandai dengan bangkrutnya perusahaan-perusahaan, PHK Buruh, cadangan devisa yang menipis dan *Capital Flight* dalam jumlah ratusan juta dollar.

Dari pengalaman beberapa negara termasuk indonesia dalam bersinggungan dengan pasar global yang ternyata lebih banyak cost atau dampak negatifnya, lantas timbul pertanyaan : kenapa kita harus terlalu menghambakan diri dan kenapa kita harus memandang bahwa pasar global sebagai satu-satunya sistem teknis yang terbaik ?. Berbagai kesadaran-kesadaran baru muncul untuk mempertanyakan eksistensi pasar global. Beberapa pemenang nobel ekonomi seperti Amartya Sen dan Joseph Stigliz membeberkan secara detail ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Mereka menarik kesimpulan bahwa dunia tidak akan menjadi lebih baik , makmur dan adil hanya karena pasar bebas, justru telah terjadi eksploitasi ekonomi yang begitu hebatnya dan lebih parah lagi : pasar bebas telah membeli jiwa nasionalisme dan kebudayaan. Demikian juga di Indonesia, kesadaran muncul dikalangan mahasiswa dan masyarakat ketika mereka menolak calon menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu yang mereka anggap sebagai perpanjangan tangan penguasa pasar global yaitu Sri Mulyani dan Marie Pangestu. Disamping itu, penolakan terhadap pasar bebas juga dilakukan oleh mahasiswa yang berasal dari negara penguasa pasar bebas tersebut yaitu mahasiswa AS, Inggris, Jerman dan Perancis dengan secara radikal.

Lalu, setelah kita mengetahui lebih banyak dampak negatif ketimbang positif dalam diri pasar bebas dan neoliberal, apakah kita di Batam harus terus terpesona dengan gilasan neoliberal yang berkedok Free Trade Zone, yang dimotori oleh Singapura yang sama-sama kita ketahui sebagai patron setia Amerika ? atau apakah memang Free Trade Zone itu alat teknis satu-satunya yang ampuh untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi ?, lalu dimana akan kita sembunyikan nasionalisme dan kebangsaan kita yang telah dirintis oleh Bung Karno dan Bung Hatta dengan susah payah dan kini telah tercabik .

ECONOMIC HITMAN

Economic Hitman secara luas dapat diartikan sebagai penjahat ekonomi atau perusak ekonomi. Istilah *Economic Hitman* ini semakin populer setelah terbitnya buku yang berjudul ***Confessions of An Economic Hitman*** pada tahun 2004 yang ditulis secara kontroversial oleh John Perkins. John Perkins sendiri adalah salah satu "penjahat ekonomi" warga negara Amerika Serikat yang ditugaskan oleh korporasi-korporasi besar dan badan-badan keuangan internasional untuk "membereskan dan meyelesaikan" masalah-masalah ekonomi kepentingan korporasi Amerika di berbagai negara belahan dunia. Menurut John Perkins, definisi Economic Hitman adalah *professional yang berpenghasilan sangat tinggi yang menipu di Negara-negara diseluruh dunia trilliunan dollar. Mereka menyalurkan uang dari Bank Dunia, USAID, dan organisasi "bantuan" luar negeri lainnya menjadi dana koroporasi-korporasi raksasa dan pendapatan beberapa keluarga-keluarga kaya yang mengendalikan sumber daya-sumber daya alam planet bumi ini.*

Sarana mereka adalah laporan keuangan yang menyesatkan, pemilihan yang curang, penyuapan, pemerasan, seks dan pembunuhan. Mereka memainkan permainan yang sama tuanya dengan kekuasaan, sebuah permainan yang menentukan dimensi yang baru, yang mengerikan selama era globalisasi. Hasil akhirnya, terjadilah penghisapan (secara ekonomi dan bahkan politis) negara-negara berkembang oleh negara adikuasa melalui penguasaan sumber daya alam, keuntungan rente bunga, proyek yang tidak berkesinambungan, dan sebagainya dan ini merupakan bentuk penjajahan di zaman modern.

Menurut pengakuan Perkins, negara-negara korbannya cukup banyak dengan hasil "pukulan" yang bervariasi mulai dari terhuyung sampai mematikan. Adapun modus operandi yang dilakukan perkins adalah berusaha meyakinkan negara-negara dunia ketiga yang tersebar di asia dan amerika latin untuk menerima pinjaman yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur (yang jumlah pinjamannya lebih dari yang dibutuhkan) dan menjamin bahwa proyek pembangunan itu dikontrakkan kepada korporasi Amerika Serikat. Begitu Negara-negara peminjam tersebut menerima Hutang yang sangat besar, pemerintah Amerika Aerikat dan badan keuangan

Internasional yang bersekutu dengannya dapat menguasai ekonomi dan sumber daya alam negara tersebut dan memastikan bahwa sumber daya lainnnya disalurkan untuk melayani kepentingan membangun suatu kekuasaan global. Ini merupakan upaya sistematis dan terencana dalam waktu yang panjang dari negara adikuasa untuk membuat negara-negara berkembang, seperti Indonesia dan negera-negara berkembang lainya , mengalami kebangkrutan dan selalu tergantung terhadap negara maju.

Hasil karya Perkins, baik sebagai pemain utama maupun sebagai saksi dan pendamping adalah antara lain kasus pencucian uang Arab Saudi, kejatuhan Shah Iran, Kematian Presiden Panama, Omar Torrijos dan yang lebih penting lagi adalah perannya di Indonesia. Pada tahun 1970-an. Perkins ditugaskan untuk membantu pemerintah Indonesia membuat ramalan kebutuhan listrik daya yang "sangat menjanjikan". Perkins dan tim menggunakan cara-cara kotor, penipuan, manipulasi data statistik, tujuannya tak lain adalah agar PLN sebagai penyelanggara kelistrikan negara akan melakukan investasi secara besar-besaran melalui pinjaman luar negeri dan ketika pinjaman luar negeri ini diterima maka jadilah Indonesia terjerat dalam kubangan hutang dan konspirasi global yang seharusnya tidak

sebesar yang diperlukan. Disamping itu juga Perkins memainkan sektor minyak bumi yang mungkin cikal bakal beberapa perusahaan minyak Asal Amerika Serikat yang pada saat ini menguasai dan menguras minyak bumi dan hasil tambang Indonesia.

Sasaran-sasaran empuk dari penjahat ekonomi ini adalah negara-negara yang sedang berkembang dan baru menjalankan kebijakan ekonomi baru setelah terlepas dari pengaruh komunisme, penjajahan dan sistem diktator negara-negara yang mengambil kebijakan ekonomi terbuka yang memandang kerjasama luar negeri dan bantuan asing adalah hal yang paling utama dalam pembangunan bangsa seperti Indonesia di masa awal orde baru, serta negara-negara yang yang kaya minyak dan letak negara yang strategis adalah target utama. Biasanya negara negara tersebut membutuhkan pembangunan infrastruktur yang sangat besar, apalagi jika presiden dan menterinya memang berorientasi pada bantuan luar negeri dan penanaman Modal Asing, dan Indonesia telah menempuh langkah itu dengan membuka pintunya lebar-lebar ke pada pemodal asing seperti Amerika, Jepang dan Asosiasi kreditur Negara-negara Eropa dan mengkaitkan dirinya secara permanen dan penuh loyalitas

pada lembaga keuangan Internasional seperti World Bank, IMF dan lembaga keuangan internasional lainnya.

Disamping penjahat ekonomi berskala internasional dan global seperti John Perkins dan teman-temannya diatas, ternyata terdapat juga penjahat ekonomi lokal yang tak kalah dahsyat dan rakusnya. Dampaknya memang tidak sedahsyat apa yang dilakukan John Perkins, dampaknya tidak global namun tetap saja melibatkan berbagai korporasi dan perusahaan dunia yang memakai anak bangsa ini sebagai penjjahat ekonomi di negerinya sendiri dan dampaknya jelas merusak tatanan ekonomi, sosial dan politik bangsa karena menghambat pembangunan dan mengambil hak yang seharusnya dimiliki masyarakat banyak.

Penjahat-penjahat ini berkedok mulai dari menteri, pejabat negara, anggota parlemen, akademisi, peneliti, politisi, pekerja Media massa dan profesi-profesi terhormat lainnya. Modus operandi nya pun relatif sama yaitu menjual data-data ekonomi negara ke negara asing, penggelembungan dan penipuan data, data analisis dan penelitian yang di rekayasa berdasarkan pesanan, penyesatan opini,

penyogokan, terror dan intimidasi dan pengaturan tender proyek infrastruktur.

Dampaknya terhadap kepentingan masyarakat cukup beragam, infrastrukur yang dibangun yang diharapkan dapat memperlancar kegiatan masyarakat jadi terbengkalai dan bernilai menjadi sangat mahal, kebutuhan konsumsi masyarakat seharusnya terpenuhi dengan harga terjangkau, menjadi langka dan sangat mahal yang nantinya akan berdampak efek domino terhadap tingkat pembangunan masyarakat seperti pelayanan kesehatan yang buruk, mutu pendidikan yang rendah, daya beli masyarakat yang terbatas, kualitas lingkungan hidup yang semakin memburuk karena adanya kongkalikong pengusaha dengan penjahat ekonomi melalui kebijakan Negara dalam upaya perampokan hasil hutan-hutan dan lahan penghijauan secara illegal dan kesemuanya ini akan menentukan naiknya tingkat kejahatan yang semakin meningkat sebagai proses sebab akibat dari segala persoalan kesejahteraan masyarakat suatu negara.

Ditengarai, di berbagai banyak negara sedang berkembang, banyak peraturan perundangan, baik Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Menteri bahkan Peraturan Daerah yang disusupi oleh para penjahat ekonomi ini dengan memaksakan dimasukkannya beberapa aturan/ketentuan yang tentunya menguntungkan kelompok pengusaha kleptokrasi ini yang nantinya pelaksanaan kegaiatan ini dapat berjalan secara legal dan terlembaga.

Dari berbagai kasus perampokan dan penggangsiran uang negara di Indonesia, selalu saja melibatkan para penjahat ekonomi yang terafiliasi dengan negara dan partai politik tertentu tak penting apakah partai politik itu nasionalis, demokratis ataupun berbasiskan agama. Dalam berbagai kesempatan, pemimpin negara kita secara malu-malu mengakui bahwa praktik ini memang ada dan terjadi, namun dengan istilah yang lebih sopan dan beretika timur yaitu dengan istilah : Kebocoran Anggaran.

Kasihan Indonesia, sudahlah dihantam dan luluh lantakkan oleh permainan penjahat ekonomi internasional yang memaksa Negara kita tunduk untuk memberikan upeti dan pembayaran hutang luar negeri yang besar dan ekpolitasi hasil alam dan tambang di hantam lagi oleh tikus-tikus penjahat ekonomi lokal yang

menggerogoti hasil pembangunan negara yang membuat mereka dan kelompoknya menjadi kaya raya gemah ripah loh jinawi namun rakyat kebanyakan yang menjadi korban karena hak yang seharusnya di nikmati diambil para penjahat tersebut dengan bersukaria dan menjadikan rakyat kelaparan, mati menyedihkan di sebuah rumah sakit dan tetap dalam kebodohan dan ketertinggalan…

SISTEM EKONOMI INDONESIA : MENOLEHLAH KEBELAKANG !

Sejak awal kemerdekaan, orde baru dan sampai saat ini, di Indonesia ada kecenderungan pada sebagian ekonom yang menganggap bahwa ilmu ekonomi bekerja sebagaimana halnya ilmu fisika : bebas nilai dan logis. pilosofi bebas nilai dan logis yang diusung para ekonomi itu tampak pada kebijakan ekonomi yang diambil antara lain masuknya investasi asing, industrialisasi, modernisasi, pinjaman luar negeri dan mekanisme pasar global. Yang hasilnya adalah benefit hanya sekejap mata namun cost–nya harus ditanggung beberapa generasi mendatang. Kebijakan ekonomi yang diambil malah tidak mampu mengangkat derajat sosial dan kesejahteraan bangsa namun meninggalkan dampak negatif yang biayanya tidak dapat kita hitung yaitu kemiskinan, kerusakan hutan dan lingkungan, dekadensi moral dan meninggalkan virus yang mustahil dapat diberantas : korupsi

Tapi benarkah sesungguhnya ilmu ekonomi itu bebas nilai ?, yang hanya mementingkan aspek kuantitatif ketimbang aspek kualitatif dan hanya berorientasi pada pertumbuhan yang tinggi. Untuk itu ada baiknya kita menelusuri teori-teori ekonomi yang menjadi "agama" para ekonom indonesia yang terbagi dalam tiga besar teori yaitu : Klasik, Neoklasik dan Keynesian

Teori ekonomi klasik adalah pemikiran tentang keadaan ekonomi yang benar-benar didesak oleh keadaan masyarakat zamannya dan kemudian berusaha menyusun teori ekonomi yang dapat menolong memberikan jawabannya, tokoh-tokohnya antara lain : Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan Karl Marx

Teori ekonomi klasik timbul sebagai syntesis dari analisis Karl Marx yang meramal kejatuhan sistem kapitalis yang bertitik tolak dari teori nilai kerja dan tingkat upah. Tokoh-tokohnya antara lain : Alfred Marshall, Leon Walras, W. Stanley Jevons dan Carl Menger

Dari penelusuran sejarah dan kepustakaan didapati bahwa teori ekonomi aliran klasik, neoklasik dan Keynesian dan lain-lain justru mengandung unsur-unsur normatif, yang mengandung penentuan tujuan sosial dan metode untuk mencapai tujuan sosial itu.

Disamping itu juga teori-teori ekonomi yang dirancang sebenarnya dimaksudkan untuk melindungi situasi ekonomi dalam negeri. Adam Smith, Misalnya dengan teori Pembagian Kerja (*division of labour*) mempunyai dampak ganda, yaitu : produksi dalam negeri yang tumbuh pesat serta perluasan pasar melalui proses kolonialialisme.

Demikian juga David Ricardo dengan Teori manfaat Komparative (*Theory of Comparative advantage*) yang menjadi dasar bagi perdagangan luar negeri antara Inggris dan koloni-koloninya, juga menyebabkan industri terutama industri tekstil di Inggris menjadi semakin kuat, sedangkan negara-negara lain justru mati secara sistematis (India misalnya, malah mengalami de-industrialisasi disegala bidang).

Aliran Keynesian yang dipelopori oleh John Maynard Keynes muncul untuk mengatasi krisis yang melanda Eropa pada 1930-an pasca perang Dunia I. Pada saat itu teori klasik dan neoklasik sudah tidak mampu lagi menjelaskan fenomena yang terjadi dan mengatasi krisis yang dihadapi. Bukunya "*The General Theory of Employment*, *Interest and Money*" merekomendasikan agar perekonomian tidak begitu saja diserahkan kepada mekanisme pasar, namun diperlukan

peran pemerintah dalam sistem perekonomian, yang justru dalam teori klasik dan neoklasik peran pemerintah diharamkan.

Dari uraian diatas, setidaknya dapat ditarik 4 (empat) hal yang fundamental, **Pertama**, : bahwa teori maupun sistem ekonomi yang dirancang oleh para ahli dimaksudkan untuk mengatasi krisis atau masalah, dengan perkataan lain suatu teori akan bermanfaat pada situasi, kondisi dan masalah tertentu. Dari berbagai pengalaman masa lalu terbukti bahwa tidak ada satu teori ekonomi yang dapat menjadi standard atau obat untuk menjawab semua permasalahan ekonomi. **Kedua**, Teori maupun sistem ekonomi harus bersifat nasionalistik, yang tujuannya melindungi negara dan masyarakatnya sendiri termasuk industri dalam negeri, produk dalam negeri dan tenaga kerja. **Ketiga** : bahwa kebijakan ekonomi yang diambil harus berorientasi pada welfare (kesejahteraan) dan sosial bangsa secara menyeluruh . **Keempat** : bahwa sesungguhnya teori ekonomi yang pernah ada didunia sebenarnya sarat dengan nilai moral yang dianut suatu bangsa.

Selanjutnya timbul pertanyaan mendasar : kapan nilai-nilai moral bangsa dan identitas bangsa Indonesia dapat menjadi pijakan

sistem ekonomi kita dan kapan saatnya para ekonom ataupun yang menganggap dirinya ekonom merubah paradigma dan filosopi teori ekonomi yang dianut dapat menerapkan sistem ekonomi yang berdasarkan karakteristik dan identitas bangsa Indonesia. Tokh dari berbagai pengalaman bangsa-bangsa-bangsa besar, pembangunan ekonomi akan terus berlanjut tanpa harus menjual negara dan bangsanya.

USAHA KECIL DAN KOPERASI : TANGGUH NAMUN TERABAIKAN

Krisis ekonomi yang melanda negeri ini sejak tahun 1997 sampai saat ini, telah mengubah konstelasi perekonomian Indonesia, dari perekonomian yang berbasis konglomerasi dan industri yang bersifat subsitusi import berubah menjadi perekonomian skala kecil dan menengah serta berbasis bahan baku lokal. Hal ini telah terbukti, ketika krisis yang melanda Indonesia justru yang bisa bertahan dan terus berproduksi hanya kelompok UKM, yang kandungan bahan bakunya 100 persen lokal. Bahkan menurut data Survei Business Intelegence Report (BIRO) di saat badai krisis menghantam sejak pertengahan tahun 1997 hingga awal tahun 2001, malah muncul 99 UKM yang berorientasi ekspor. Padahal, di lain sisi banyak perusahaan afiliasi konglomerat yang harus dilikuidasi karena tak mampu lagi bertahan. Fakta itu semakin menguatkan dugaan berbagai pihak bahwa sektor ini memang kuat dan fleksibel, Menurut

survei BIRO diketahui 60 persen UKM memiliki rasio penjualan ekspor lebih dari 40 persen, bahkan 29 persen diantaranya rasio ekspornya diatas 86 persen.

Fakta kesuksesan UKM yang mampu bertahan dan bahkan menyerang, dalam menghadapi krisis dan sekaligus telah menunjukkan eksistensinya dipelataran ekonomi indonesia baik secara makro maupun mikro ekonomi, namun ternyata masih dianggap sebelah mata baik oleh pemerintah maupun kalangan lainnya seperti perbankan. Hal ini tercermin dari kebijakan ekonomi baik kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, belum menunjukkan keberfihakan yang signifikan kepada Pengusaha UKM.

pemerintah banyak menggembar-gemborkan bisnis usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai andalan, tetapi ternyata pemerintah juga menjadi penyebab utama ambruknya berbagai bisnis yang dikelola UKM. Ini terjadi karena pemerintah tidak memiliki paradigma bisnis yang jelas dan proses birokrasi yang berbelit. Hambatan ini bahkan masih ditambah dengan tidak sedikitnya pejabat maupun penegak hukum yang secara sengaja mencari peluang untuk kepentingan ekonomi pribadinya. Apa yang dibahas hanyalah

mengenai masalah administrasi semata. Padahal, pemerintah termasuk lembaga legislatif seharusnya bisa melihat, dengan menggalakkan UKM otomatis kesempatan kerja meluas dan dengan sendirinya PAD akan naik.

Di Australia, seorang rakyat kecil yang ingin membuka usaha, seperti warung, pasti mendapat sambutan antusias dari kapitalis. Berbagai peluang dipaparkan, dan modal usaha pun dibantu. Sedangkan di Bangladesh, sekitar 80 persen uang yang beredar di negara itu dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) melalui berbagai jenis ekonomi rakyat.

Sebaliknya di Indonesia, warung atau usaha kaki lima yang dibuka rakyat untuk bertahan dari kemelaratan ekonomi, selalu digusur pemerintah demi kepentingan kaum kapitalis. Kebijakan yang sangat diskriminatif itu membuat ekonomi rakyat tak berkembang seperti yang dicita-citakan. Kalaupun ada dana yang dikucurkan kepada rakyat melalui berbagai program dari berbagai instansi, juga hasilnya selalu nihil. Sebab, dalam pelaksanaannya di lapangan tidak ada pendampingan yang berkelanjutan.

Perlakuan kalangan perbankan pun setali tiga uang dengan pemerintah, Sepanjang tahun 2001 kredit kepada UKM dan Koperasi (UKMK) hanya sekitar Rp 22 trilyun dari total kredit perbankan sebesar Rp 300 trilyun. Ini karena perbankan tidak mengubah paradigmanya. Mereka memandang UKM sebagai pengusaha lemah yang tidak memiliki modal besar, padahal bila paradigmanya dibalik, yaitu melihat UKM sebagai mitra dan konsumen yang potensial untuk dibesarkan, maka perbankan akan lebih "ramah" kepada UKM

Menurut pengamatan dilapangan, ada beberapa faktor yang harus dibenahi dalam pemberdayaan UKM, yaitu Peran pemerintah diharapkan sebagai fasilitator dan mobilisator dan perbankan sebagai akses untuk medapatkan modal melalui kredit. Peran Pemerintah hendaklah dapat menjembatani kepentingan antara Pengusaha UKM, perbankan dan kepentingan pemerintah sendiri (jika memang punya komitmen untuk mengembangkan ekonomi rakyat)

Langkah konkret yang perlu dilakukan adalah penyediaan lembaga keuangan yang mampu melayani kebutuhan ekonomi rakyat. Itu berarti, pemerintah hendaknya mendorong dan membuat aturan yang jelas agar Bank dan BUMN dapat melayani kebutuhan

ekonomi rakyat. Membuat kebijakan yang mempertimbangkan semua aset, dan sektor terutama dalam distribusi dan akses pada sumber daya ekonomi.

Disamping itu, sesuai dengan kebutuhan saat ini, pemerintah harus proaktif untuk memfasilitasi pendirian Lembaga keuangan Mikro (LKM) di pedesaan yang berfungsi sebagai lembaga kredit. Berkembangnya lembaga kredit di tingkat masyarakat yang paling bawah akan berdampak positif terhadap pengembangan kawasan pedesaan. Sebab masyarakat akan terbantu dalam pendanaan untuk mengembangkan potensi-potensi usaha di wilayahnya, yang lambat laun akan menjadikan pedesaan kompetitif dalam tatanan perekonomian. Keberadaan lembaga kredit di pedesaan akan menstimulasi masyarakat pedesaan menjadi masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera dalam mekanisme pasar.

Disamping itu juga peran pemerintah dalam upaya mengembangkan UKM dan Koperasi sebagai pelaku ekonomi di negeri ini adalah dengan pembangunan infrastruktur pisik untuk mendukung kegiatan usaha dari UKM dan Koperasi. Infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung UKM dan Koperasi adalah

Pelabuhan ikan, cold Storage (lemari pendingin), Laboratorium dan infrastruktur lainnya.

Berkembang tumbuhnya UKM dan Koperasi, sekali lagi tergantung pada *political will* pemerintah, siap tahu pemerintah mungkin masih terpesona dengan teori Trickle Down Effect (efek menetes ke bawah), dimana rakyat dan usaha kecilnya menerima sisa-sisa padahal di negara berkembang lainnya justru memakai efek melebar kesamping.

MASYARAKAT EKONOMI SYARIAH : SEBUAH PENGHARAPAN

Beberapa waktu lalu di PIH Hotel Batam Center, ada deklarasi dan perkenalan sebuah lembaga yaitu Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Batam, yang pengurusnya terdiri dari beberapa profesional muda. Pembentukan MES ini, bagi sebagaian kalangan yang muak terhadap kondisi ekonomi saat ini merupakan suatu pencerahan baru. Gerakan ini dapat difahami sebagai akibat rasa apatis dan frustasi generasi muda terhadap sistem ekonomi yang ada yang ternyata tidak mampu mengembangkan potensi ekonomi umat Islam yang hampir 90 % merupakan penduduk negeri ini. Banyak kalangan menilai bahwa gerakan kelembagaan untuk membangkitkan ekonomi syariah momentumnya tepat mengingat keterpurukan ekonomi umat tengah berlangsung. Keterpurukan ekonomi ini ditandai dengan hampir 60 Juta Jiwa penduduk indonesia hidup dibawah garis kemiskinan dengan rata-rata pendapatan hanya Rp. 150,000 per kapita per tahun (Baihaqi :2000). Sebuah realitas juga bahwa di Indonesia dengan pendudukk muslim terbesar, bereka

hanya bergelut dalam sektor bisnis usaha menengah dan kebanyakan di usaha Kecil

Konsep ekonomi syariah ini sebenarnya di Indonesia telah lama didengungkan. Namun konsep ekonomi syariah bersama sama dengan konsep ekonomi rakyat, selalu menjadi komoditas politik baik legislatif maupun eksekutif pada saat Pemilihan Umum. Pemerintah, baik pada tingkat nasional maupun daerah masih menganggap ekonomi syariah maupun ekonomi rakyat itu bersifat absurd, sulit dicapai dan dikhawatirkan menyinggung agama lain. Sesungguhnya, konsep ekonomi syariah telah diterapkan secara parsial dibeberapa negara Eropa dan Amerika Utara yang notabene bukan masyarakat islam

Landasan ekonomi syariah merupakan penjabaran dari ajaran Al Qur'an dan Sunnah Nabi yang bersifat holistik, ibadah, kejujuran dan tanggung jawab sosial. Landasan ini berbeda kontras dengan Sistem kapitalis yang bersifat individualistik, sekuler, akumulasi kapital dan liberal. Konsep ekonomi syariah sebenarnya adalah yang paling sempurna diantara sistem ekonomi yang pernah ada. Sistem ekonomi syarariah mengakomodir pemilikan individual

yang diharamkan oleh sistem sosialis dan juga mengakomodir pemerataan dan peniadaan kelas sosial yang dibenci oleh sistem kapitalis

Ada beberapa landasan pokok sistem ekonomi Islam yaitu (Dzajuli:2002) :

1. Asumsi dasarnya adalah syariah Islam yang berlaku secara integral terhadap individu, rumah tangga, kelompok masyarakat, pengusaha dan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani.
2. Paradigma dasar dari ekonomi islam adalah nilai moral, kebersamaan dalam berperikemanusian, serta keadilan dalam kesejahteraan sosial dan ekonomi
3. Prinsip Ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam
4. Motif ekonomi Islam adalah mencari keberuntungan dunia dan akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas

Disamping itu, sistem ekonomi syariah, sesuai dengan pengalaman beberapa negara yang telah menerapkan adalah sebuah

sistem yang universal yang melintasi berbagai perbedaan baik agama, budaya, dan Kepercayaan.

Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Batam yang baru dibentuk diharapkan dapat menjadi inisiator terwujudnya penerapan ekonomi syariah di Kota Batam. Peran selanjutnya sebagai legitimasi penerapan Ekonomi Syariah ini adalah pemerintah Kota Batam, DPRD Kota Batam dan Instansi lainnya yang terkait. Pemerintah Kota Batam bersama DPRD Kota Batam mengintegrasikan kelembagaan pendukung ekonomi syariah ini menjadi suatu sistem yang integral dan komprehensif seperti BAZIZ, Baitul mal wattamwil (BMT), Bank Syariah, Asuransi, lembaga Pendidikan, Pelaku bisnis, sistem informasi dan lainnya sehingga ada hubungan (link) yang saling melengkapi. DPRD Kota Btam pun sebagai legislator dapat memikirkan pembuatan Perda Zakat, Perda Wakaf dan Perda lainnya yang mendukung terwujudnya ekonomi Syariah ini.

Sebagaimana pengalaman beberapa negara yang menerapkan budaya dan nilai moral lokal kedalam kehidupan bangsanya seperti Jepang dan Korea, maka peran pemerintah dalam hal ini cukup besar. Dengan perkataan lain, pemerintah yang harus mengambil

tindakan-tindakan untuk dapat mewujudkan sistem ekonomi syariah. Komitmen Walikota dan jajarannya serta beberapa anggota DPRD Kota Batam yang sering melontarkan topik ekomi rakyat dan ekonomi syariah pada waktu kampanye, akan diuji dalam penerapan sistem ini. Betapa tidak, kalau sistem ini masih terus menjadi wacana, maka betul apa yang pernah di ragukan masyarakat, ekonomi rakyat dan ekonomi syariah hanya menjadi dagangan politik untuk mendapatkan dukungan dari umat Islam baik dalam Pemilu maupun dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Kebangkitan ekonomi umat Islam adalah juga kebangkitan ekonomi bangsa Indonesia, karena yang mengalami kesengsaraan dan keterpurukan pada masa krisis ekonomi dialami oleh sebagaian besar umat Islam. Semoga Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Batam dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat dan semoga tidak seperti lembaga lain yang layu sebelum berkembang karena tidak didukung secara serius oleh pemerintah dan elit politik Kota Batam

THE DEATH OF ECONOMICS

Judul diatas merupakan sebuah judul buku yang ditulis oleh **Paul Ormerod**, seorang ekonom Inggris, tak pelak lagi buku ini mengundang kontroversi, terutama caci maki para ekonom ortodoks, yang selama ini menuhankan angka dan matematika dalam membangun teorinya sampai mereka lupa bahwa ekonomi adalah ilmu sosial, yang tidak semuanya dapat diduga secara matematis.

Pertanyaan yang muncul adalah : Ilmu ekonomi manakah yang dianggap mati?. Menurut Ormerod adalah ilmu ekonomi ortodoks. Dalam pembagian ilmu ekonomi secara ekstrim dapat dibedakan menjadi Ekonomi klasik dan ekonomi ortodoks. Teori ekonomi klasik adalah pemikiran tentang keadaan ekonomi yang benar-benar didesak oleh keadaan masyarakat zamannya dan kemudian berusaha menyusun teori ekonomi yang dapat menolong memberikan jawabannya, tokoh-tokohnya antara lain : Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan Karl Marx. Sedangkan ekonomi ortodoks ditandai dengan kecenderungan untuk melihat

bidang ini lebih sebagai medan " kelinci percobaan" dan pengolahan kecanggihan akademis semata-mata, tanpa menghiraukan apakah teori-teori yang disusun itu mempunyai kaitan dengan keadaan dan persoalan yang nyata dalam masyarakat. Dan seringkali menghasilkan teori yang rumit "belukar aljabar" ketimbang pengertian yang lebih baik tentang keadaan. Tokohnya adalah Leon Walras, Alfred Marshall, Irving Fischer dan Stanley Jevons.

Contoh dari teori ekonomi ortodoks yang rumit dan statis dapat dilihat pada materi kuliah teori ekonomi mikro bagi mahasiswa fakultas ekonomi semester IV, yaitu mengenai teori *diminishing marginal utility* (Tingkat kepuasan yang semakin berkurang dengan bertambahnya masukan) tidak selalu terbukti, seseorang yang mempunyai satu mobil tidak akan berkurang kepuasannya dengan memiliki mobil kedua atau ketiga bahkan barangkali masih berkeinginan memiliki mobil keempat. Teori tentang kepuasan ekonom ortodoks tidak memperhitungkan sosial budaya yaitu *prestise. Demikian pula dengan teori diminishing marginal productivity,* kalau lah teori ini benar, maka tidak akan ada poerusahaan yang menjadi besar, dan ekonomi hanya dikuasai oleh

perusahaan-perusahaan kecil. Hal ini tentu bertentangan dengan realita bahwa ekonomi dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar, tidak terkecuali di Indonesia.

Melihat banyaknya gap antara teori dan realitas dalam ilmu ekonomi, apa gerangan yang salah dengan teori ekonomi ortodoks?. Kesalahannya terletak pada asumsi-asumsi dasar yang dipakai

Asumsi pertama adalah pengandaian tentang adanya equibilirium yang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan pasar.Paham tentang equilibirium ini diambil dari alam pikiran ilmu mekanika bahwa dunia mirip mesin yang teratur, seimbang dan bergerak mulus. Padahal dunia dan isinya terdapat unsur ketidakseimbangan dan ketidakpastian, tetapi ekonomi ortodoks tetap bertahan dengan asumsi bahwa dunia adalah seimbang, teratur dan pasti.

Asumsi Kedua; Pada dasarnya manusia lebih mementingkan diri sendiri dari kepentingan orang lain. Pengandaian ini tidak selalu benar karena cooperative behaviour ternyata sama kuatnya dengan self interest.

Asumsi Ketiga; adalah dengan munculnya ilmu ekonomi ortodoks, maka bidang ilmu ini semakin menjadi ilmu formal (sepetinya halnya matematika atau fisika) dan semakin meninggalkan sifat aslinya sebagai salah satu bidang ilmu sosial, padahal seluruh tradisi ilmu ekonomi klasik lahir karena pemikir awalnya benar-benar berjuang untuk menjawab masalah-masalah sosial yang mucul pada zamannya seperti resesi, pengangguran dan depresi.

Kalau di Eropa dan Amerika pemikiran ini memicu kontroversial, bukan tak mungkin di negeri kita Indonesia bakal menyentak, minimal menggugah kesadaran kita bahwa krisis ekonomi yang melanda negeri kita sejak tahun 1997 bukan melulu disebabkan oleh faktor ekonomis, melainkan persoalan multidimensi dan komplek seperti ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan institusinya serta bobroknya tatanan sosial dan politik..

Permasalahan yang di hadapi Indonesia dewasa ini yaitu adalah persoalan bagaimana mempertahankan stabilitas mata uang (apakah dengan CBS atau Floating Rate) dan juga bagaimana menanggulangi defisit pembelanjaan negara (apakah melalui pajak atau pinjaman luar negeri) dan yang lebih penting lagi adalah

bagaimana memposisikan usaha kecil dan menengah diantara Para kapitalis besar dan asing.

.

Menyikapi pemikiran tersebut, tidak ada salahnya para ekonom dan teknorat di Indonesia agar merumuskan kembali pandangan dan teori ekonomi dalam pembangunan kembali ekonomi Indonesia yang terpuruk antara lain dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi yang berbasis kondisi aktual bangsa Indonesia yang ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi, ketimpangan pemerataan, tingkat kemiskinan dan lainnya, sebagaimana dahulu pemikiran Adam Smith dan David Ricardo di Inggris sana, untuk mengatasi permasalahan ekonomi inggris yang dilanda depressi dan akibat blokade ekonomi yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte. Para pakar ekonomi harus membangun paradigma teori yang lebih nasionalistis dan yang menghasilkan keputusan ekonomi yang dinikmati oleh rakyatnya, hal ini dapat kita telusuri dengan kebijakan ekonomi internasional yang selama ini kita pakai, yang lebih banyak mengekploitasi, baik diri sendiri maupun hasil alam.

Kalaulah para ekonom kita tidak mampu untuk “improvisasi” teori ekonomi dengan kebutuhan dan kondisi saat ini, maka semakin

benarlah dugaan para pakar barat bahwa “ ilmuwan indonesia hanya pengekor, yang tak bisa berpikir”.

NEOLIB, SANG MALAIKAT RUPAWAN

Pekikan para anti Neoliberalisme atau Neolib jamak dianggap sebagai dendang lama yang diputar dengan kaset kusut. Siapa peduli dengan suara kresek – kresek yang membuat telinga gatal. Sekarang – sekarang ini anti neolib makin ditaruh di sudut, dianggap tidak *move on*, terlalu terobsesi dengan Sukarno atau Tan Malaka, beraliran kiri dan seterusnya.

Orang – orang lebih percaya kepada sistem ekonomi yang memakai logika neoliberalisme. Karena tangan para kapitalis asing mengenggam sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh rakyat dan negara - yang selalu diilusikan akan tenggelam seperti kita. Mereka mengulurkan bantuan hutang, aneka pekerjaan dan sedikit setoran bagi hasil sebelum mencengkeram kuat – kuat. Sedangkan konsep ekonomi selain itu terlihat terlalu utopis, mengada – ada dan tidak bersifat segera. Mitos – mitos yang dihembuskan oleh kaum neolib, mampu merubuhkan akal sehat sehingga penentangnya dianggap kolot oleh khalayak.

Agen Neolib selalu datang pada hari kelaparan dengan wajah malaikat. Mereka memberi makan, memberi pekerjaan dan membangun tugu – tugu. Lalu kita terpana bukan buatan, kita ternganga sampai lupa mengelap air liur, lalu kita dijadikan budak. Kita menganggap pembangunan telah berjalan dan semua akan baik – baik saja, sepanjang kita diberi upah. Topeng malaikat yang dipakai

neolib memang rupawan. Di balik topeng terpampang wajah garong yang penuh bopeng.

Penjajah dulu juga begitu, mereka datang membawa misi bisnis penuh gairah, membeli rempah – rempah. Kongsi dagang Perusahaan Hindia Timur Belanda atau *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) yang kita eja di sekolah dasar dahulu, itu tidak ada bedanya dengan perusahaan konsorsium milik asing sekarang. Bahkan mereka lebih identik dengan Kamar Dagang dan Industri. Bedanya kemudian mereka menggandeng tentara – tentara haus darah yang membawa bedil dan mesiu. Mereka tidak lagi membeli rempah, tapi menodongkan senjata, melancarkan tanam paksa dan merampas begitu saja.

Liberalisme disebut neo karena mereka baharu. Bernegosiasi tidak lagi dengan desingan peluru tapi lewat propaganda – propaganda yang lembut, hingga kita berkelahi sesama sendiri. *Devide et impera* juga neo sampai kita tidak melihat ada tangan – tangan tak kentara. Kita bermusuh dengan saudara kandung sendiri, saling memburuk – burukkan. Di atas sana, dari kejauhan mereka bertepuk tangan. Bayangkan sebuah kebun luas nan subur milik ayah kita. Lalu seseorang atau sekelompok orang datang membawa tawaran untuk bercocok tanam di atas kebun tersebut. Dengan sedikit perundingan mereka sudah berlagak sebagai pemilik sebenarnya, lalu menawarkan kepada kita, anak – anak ayah untuk menjadi pengusir hama atau penyiram tanaman dengan upah secukup makan.

Pada musim panen mereka mengantongi seluruh penjualan dari hasil kebun, melirik ayah sebentar lalu memberi uang receh agar ayah nyenyak tidur siang sampai musim panen berikutnya. Ayah

kemudian diberi pinjaman uang untuk memastikan asap dapur tetap mengepul dan anak – anaknya tetap bisa sekolah. Dengan hutang itu ayah dicengkeram, tapi ayah santai saja, karena yang membayar hutang tersebut adalah anak keturunan kita kelak. Selama masih berhutang selama itu pula kerah baju ayah akan diangkat tinggi - tinggi jika ayah mulai mempertanyakan bagaimana nasib kebunnya nanti.

Yang lebih dahsyat dari itu. Ayah bahkan punya kebun lain yang buahnya sudah ranum. Hasil kebun itu mampu menghidupkan rumah tangga ayah hingga tujuh generasi. Tapi ayah ditakut – takuti dan diejek – ejak bahwa ayah tidak mungkin sanggup memetik buah – buah tersebut. Ayah yang hanya memiliki perkakas kuno mengangguk saja ketika mereka mempresentasikan bagaimana tata cara memetik buah ranum dengan teknologi super mutakhir. Maka ayah membungkuk, membuka pintu pagar kebunnya luas – luas. Lalu gerombolan garong neolib dengan tangkas berlari secepat bajingan untuk berpesta pora dan menjarah buah – buah ranum milik ayah sampai tidak ada lagi yang bisa dipetik. Seperti biasa kita anak – anak ayah mengantre untuk mengemis pekerjaan menjadi tukang pikul atau pemetik buah yang diupah. Dasar kita, mentang – mentang sudah ada sandaran hidup, kita lupa tentang kisah pilu kebun ayah yang dijarah.

"Aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia, biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia. Dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya," demikian Sukarno. Ayah pasti lupa, lupa dengan ini. Sedangkan sebagian kita sudah lena, begitu dompet kita terisi. Persetan dengan Sukarno yang sudah mendiang,

bukankah kita kini punya kedudukan prestisius sebagai: *pengusir hama di kebun ayah.*

Ayah memang hobinya berunding meneruskan kelakuan ayahnya pula. Dengan menonton ayah berunding di televisi, kita melihat rumah tangga ayah, Indonesia Raya akan selalu benderang. Biarpun ayah sedang berunding dengan garong yang sedang menjerat ayah dan hutang baru. Oh ayah, jika ada waktu kenanglah Tan Malaka yang berucap: "*Tuan rumah tidak berunding dengan maling yang menjarah rumahnya".* Renungkanlah nasib apa yang menimpa anak cucu kita kelak, bahu mereka terlalu ringkih untuk memikul beban hutan dan bunga ribuan triliun itu.

"Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan meminta – minta, apalagi jika bantuan – bantuan itu diembel – embeli dengan syarat ini syarat itu! Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka, daripada makan bestik tapi budak" – Bung Karno dalam Pidato HUT Proklamasi. ***

EKONOMI BATAM DALAM JAJAHAN AGEN NEOLIB

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) berada di pinggir tapal batas Indonesia dan satu-satunya wilayah yang berbatasan dengan empat negara Asean yakni Vietnam, Kamboja, Malaysia dan Singapura. Kepri juga berseberangan langsung dengan Laut Cina Selatan yang sedang diperebutkan oleh China, Taiwan dan beberapa negara Asean, yang juga melibatkan kepentingan Amerika Serikat.

Maka Kepri adalah provinsi yang rentan sekaligus ringkih dalam hal ketahanan teritorial dengan zona udara di bawah kekuasaan Singapura, serta kondisi geografis 96 % laut yang sangat mudah disusupi dan dicuri melalui praktik *illegal fishing - illegal mining,* di samping penyelundupan orang, barang dan uang. Dari segi legal formal, wilayah ini sejak lama telah membuka diri sebesar-besarnya bagi penguasaan proyek – proyek vital oleh asing dalam skema *framework free market agreement.* Kepri kemudian menjadi wilayah yang juga rentan dalam ketahanan ideologis. Wilayah yang berada di front terdepan ini serta merta terpapar untuk dihisap dan "dicuri" secara legal bagi kepentingan asing atas nama investasi. Kedengarannya provokatif, tapi itulah yang sedang terjadi dalam perspektif neoliberalisme.

Neoliberalisme amat dekat dengan neokolonialisasi yang bertujuan mencengkeram ekonomi dunia dengan modus penjajahan gaya baru yang lebih laten dan multidimensi. Kebijakan-kebijakan yang didorong oleh kaum neoliberal (neolib) secara umum meliputi kebijakan penghapusan subsidi, deregulasi, privatisasi, liberalisasi sektor keuangan, perdagangan bebas, gerakan modal bebas dan investasi bebas. Promotor neolib juga menawarkan apa yang disebut dengan *structural adjusment program* (SAP) yaitu berbagai bentuk 'bantuan' pemikiran, konsep dengan regulasi.

Dengan Washington Consensus para pembela ekonomi privat terutama wakil dari perusahaan-perusahaan besar multinasional telah menjebak berbagai negara berkembang termasuk Indonesia sebagai 'tanah jajahan yang empuk' melalui instrumen Bank Dunia (*World Bank), International Monetary Fund* (IMF), *World Trade Organization* (WTO), *Asian Development Bank* (ADB) dan *Transnational Companies* (TNCs). Singkat saja, terminologi Batam *Bonded Zone, Special Economic Zone (SEZ), Free Trade Area (FTA)* dan belakangan *Free Trade Zone (*FTZ) Batam, Bintan dan Karimun (BBK) adalah bagian dari skenario tersebut.

Penganut neolib yang mewarisi "dosa turunan" dari pencetus teori Neoklasik, Adam Smith (1723-1790) telah merusak kemandirian ekonomi nasional dan menghasut oknum pemerintah yang oportunis sekaligus tak berdaya dalam tekanan utang untuk mengkhianati konstitusi, utamanya yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945 yang dirumuskan untuk membendung berbagai ekses negatif mekanisme pasar dan liberalisasi mutlak.

Kita warga Kepri dan para pengampu kebijakan sepertinya sedang terlelap oleh ninabobo neolib yang pada awalnya memang terlihat memesona dengan terbukanya akses lapangan kerja yang luas. Seolah tidak pernah berkaca kepada sejarah bagaimana nenek moyang kita dulu tersenyum lebar-lebar kepada para saudagar Belanda yang tergabung dalam *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) sebelum dihisap dengan cara tak beradab. Hingga kinipun perusahaan perminyakan dan pertambangan asing yang tergabung dalam TNCs (antek neolib) masih terus menguras habis kekayaan bumi Indonesia termasuk Blok Natuna D-Alpha yang pernah dikelola Exxon Mobil. Menjadi ironi ketika perusahaan negara PT Antam di Bintan dan PT Timah di Singkep memiliki tabiat yang hampir mirip kolonial. Setelah puas menghisap sampai kerontang lalu angkat koper meninggalkan kerusakan lingkungan, sedikit aset usang dan penduduk setempat yang miskin.

Agenda-agenda kaum neolib sudahpun berjalan di Indonesia yakni penghapusan subsidi misalnya BBM, deregulasi sejumlah kebijakan penting menyangkut ekonomi dan investasi, kebijakan perburuhan yang memihak sektor korporat, privatisasi BUMN atas tekanan IMF (2002-2003) termasuk sektor strategis yang diamanatkan konstitusi seperti industri-industri vital, telekomunikasi, pelabuhan, perbankan, PLN, universitas dan air minum kemudian liberalisasi serta regulasi sektor keuangan yang memakan triliunan uang rakyat untuk penyelamatan bank-bank *collapse.* Kemudian masifnya perdagangan bebas, gerakan modal bebas dan investasi bebas, inilah yang telah dan sedang terjadi di Kepri khususnya zona BBK.

Untuk memantapkan kebijakan pasar bebas, neolib telah memproduksi mitos-mitos yang bertujuan untuk mempengaruhi opini

publik dan secara perlahan memaksa pemerintah untuk tidak ikut campur dalam urusan ekonomi yang tujuan akhirnya adalah: *bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh asing/privat dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran mereka* (plesetan dari Pasal 33 ayat 3 UUD 1945). Rakyat hanya diikutkan dalam mobilisasi tenaga kerja berbiaya murah yang sewaktu-waktu bisa diancam hengkang jika menuntut kenaikan upah di atas batas toleransi mereka. Pekerja pula kerap diperlakukan sebagai asset yang dihegemoni demi sebesar-besarnya benefit perusahaan.

Gejala-gejala penjajahan sektor ekonomi di Batam misalnya sudah lama tampak dengan komposisi kepemilikan lahan industri yang hampir 80 persen dikuasai asing. Setelah sebelumnya di-*service* dengan *tax holidays,* sistem pelayanan cepat saji dan sejumlah insentif. Sementara di sektor properti dan perdagangan sangat banyak ditemukan kepemilikan asing dengan meminjam nama lokal. Ruang publik dan zona hijau segera disulap menjadi kawasan komersial begitu dilirik investor yang biasanya menggunakan jasa broker secara sistemik.

Parameter Ekonomi yang Menipu

Agen-agen neolib di Batam dengan suksesnya telah mengubah mental oknum birokrat untuk menutup mata atas bahaya laten yang akan timbul di kemudian hari. Bahwa keuntungan yang didapat dari penguasaan lokasi-lokasi strategis akan langsung dibawa ke luar negeri dengan hanya menyisakan sedikit (mungkin berupa pajak yang bisa dimanipulasi, setoran UWTO, penyerapan tenaga kerja murah

dan sedikit imbas ekonomi berupa *trickle down effect,* serta lebih banyak menyumbang kerusakan ekosistem dan limbah industri).

Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai institusi yang paling bertanggungjawab atas "terjajahnya" tanah Batam oleh kepentingan asing harus membuat langkah antisipasi dengan cara *land reform* yang transparan pada kepemilikan lahan tidur untuk dapat dimanfaatkan oleh pengusaha lokal, menciptakan kemandirian ekonomi domestik serta mewajibkan *employee stock exchange program* (semacam pembagian saham kepada karyawan) oleh perusahaan.

Di samping itu institusi ini perlu membersihkan diri dengan mengganti atau memecat pejabat korup yang saat ini ditenggarai sudah kenyang oleh *success fee* pengalokasian lahan. Termasuk menghentikan dan memutus mata rantai kebrutalan orang-orang pusat dan beberapa elite lokal yang ikut 'bermain' lahan di Batam.

Sementara pemerintah daerah perlu menggiatkan sektor mikro dan unit ekonomi berbasis syariah, menciptakan *entrepreneurships* yang kemudian bertugas menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya dan membangkitkan sektor riil sambil memangkas anggaran rutin. Jadi siapapun tidak perlu lagi tersenyum lebar-lebar dan menggelar karpet merah sambil membungkuk jika ada VOC model baru yang akan berlabuh ke Tanjung Sauh, Janda Berhias, Kepala Jeri hingga ke Pulau Bawah, Anambas.

Apalagi mengumumkan dengan bangga setiap detil rencana investasi kapitalis yang masuk tanpa sebelumnya memperhitungkan dengan jelas juntrungannya bagi peningkatan taraf hidup masyarakat lokal yang terinvasi secara ekonomi. Delegasi dagang luar negeri

disambut dengan sorak sorai, sembari memicingkan mata kepada pelaku UKM yang baru saja belajar membuat proposal bisnis. Itulah mental kacung para petinggi negeri ini yang siapa tahu di dalam tubuhnya mengalir "DNA terjajah" dari nenek moyang yang terlalu lama diinjak Belanda.

Apalah arti seribu tenaga kerja yang akan diserap jika tidak ada jaminan *profit sharing* yang bermartabat untuk kepentingan rakyat. Apalah arti pertumbuhan ekonomi yang diproyeksi meningkat tajam, tetapi yang dibutuhkan rakyat sebenarnya adalah pemerataan ekonomi. Sebagai catatan, Indonesia adalah negara terkaya dengan *Gross Domestic Product* (GDP) nomor 15 di dunia yang tergabung dalam G20 (kelompok negara yang menguasai 81 % kekayaan dunia), namun rata-rata penghasilan perorang (perkapita) 2011 justru tercampak jauh ke urutan 108 ($3,700), berada di antara negara miskin dan primitif di Afrika, Congo dan negara penuh konflik bersenjata, Irak. Padahal kekayaan domestik yang dikuasai mayoritas oleh sektor industri neolib di Indonesia melebihi 60 % dari gabungan kekayaan seluruh GDP anggota Asean. Inilah bukti dari gagalnya pemerataan ekonomi yang sangat menyesakkan dada.

Naifnya, pertumbuhan ekonomi (sebuah jargon jebakan) kemudian didewa-dewakan sebagai parameter keberhasilan pembangunan oleh pemerintah setempat. Sedangkan yang pasti pertumbuhan ekonomi hanyalah milik agen neolib yang terdiri dari segelintir borjuis dengan panji-panji *laissez faire.* Mereka kemudian berpesta pora bersama oknum birokrat yang mungkin sudah dibeli untuk menipu rakyat, atau memang karena tidak tahu apa-apa dari sananya. ***

BAB II

SOSIAL BUDAYA , MANAJEMEN DAN POLITIK

BUKU YANG “TERKUTUK”

"Dimanapun buku-buku dibakar,
manusia ditakdirkan dibakar juga." (Heinrich Heine)

Buku, dalam setiap zaman dan tempat, selalu berada dalam posisi yang mulia sekaligus terkadang terkutuk. Pada saat dan tempat yang tepat, buku selalu diagungkan, dijadikan sebagai standard keilmuan dan derajat seseorang dan buku juga merupakan salah satu indikator peradaban yang maju bagi sebuah negeri.

Namun, tidak sedikit dalam sejarah umat manusia, buku merupakan musuh besar yang berbahaya, dan mengharuskan buku-buku itu harus diinjak-injak, dirobek-robek, ditenggelamkan ke sungai dan laut dan dibakar. Buku adalah sebuah paradoks, dimana buku merupakan hasil pemikiran, telaah, penelitian, dan hasil percobaan. Namun tentu saja buku yang dihasilkan adalah bukan kebenaran mutlak dan selalu saja mendapat kritikan atau perlawanan. Buku juga mengandung sifat komplementer yang bias saja dari satu buku yang lain akan menjadi lebih baik pada buku berikutnya walaupun dengan penulis yang lain sama sekali.

Dalam sejarah, kita mengetahui majunya peradaban suatu bangsa adalah karena bangsa itu menghormati ilmu pengetahuan dan kebijakan-kebijakan dalam sebuah buku. Kemajuan peradaban islam pada masa awal adalah keinginan yang besar terhadap buku dan haus terhadap ilmu pengetahuan, maka tidak heran apabila pada saat itu banyak ahli-ahli islam menterjemahkan buku-buku dari hasil ilmuwan dan filosof Yunani ke dalam bahasa arab baik itu filsafat, sosiologi, hukum . kedokteran, astronomi dan berbagai bidang ilmu yang memang sudah dibukukan oleh para ilmuwan Yunani kuno seperti Aristoteles dan Plato.

Demikian juga dengan bangsa Barat, kejayaaan Islam di Andalusia dan Baghdad, buku jugalah yang merubah mereka dari abad kegelapan sampai menjadi sang penakluk dan negeri yang maju. Dunia barat banyak belajar dari dunia islam dalam berbagai disiplin ilmu seperti kedokteran, astronomi, matematika, Geografi, sejarah dan bidang ilmu lainnya, sehingga tak heran banyak nama tokoh islam yang di abadikan dalam dunia barat seperti Aljabar, Avicenna (Ibn Sina), Averroes (Ibn Rushd).

Sejarah juga mencatat, buku banyak yang dimusnahkan dan dibakar. Peristiwa terbesar adalah penaklukan Andalusia (sekarang Spanyol) oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Pendudukan Spanyol atas Andalusia telah membuat kita kehilangan perpustakaan-perpustakaan besar yang diceritakan sejarah dengan mencengangkan. Semua buku dibakar oleh orang-orang yang fanatik. Bahkan buku-buku yang dibakar dalam sehari di lapangan Granada menurut taksiran sebagian

sejarawan berjumlah lebih dari satu juta buku. Kitab-kitab karya Imam al-Ghazaly dibakar, ribuan buku dan naskah koleksi perpustakaan umum al-Ahkam II dihanyutkan ke sungai termasuk buku-buku karya Ibnu Tufayl, Ibnu Rusyd dan Ibnu Arabi yang tentunya merupakan literature kelas dunia pada masa itu.

Demikian juga di Baghdad, pada masa Kekaisaran dinasti Abbasiyah. Ketika Tentara Mongol menaklukkan Baghdad. Sejak awal berdirinya, kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Sebagai pusat intelektual, di Baghdad terdapat beberapa pusat aktivitas pengembangan ilmu. Di antaranya adalah Baitul Hikmah, yaitu lembaga ilmu pengetahuan yang menjadi pusat pengkajian berbagai ilmu. Selain itu Baghdad juga sebagai pusat penterjemahan buku-buku dari berbagai cabang ilmu ke dalam bahasa Arab.

Dizaman modern, Jerman dibawah pemerintahan fasis NAZI pada malam hari tanggal 10 Mei 1933, sebuah peristiwa yang tidak pernah terlihat di Eropa sejak abad pertengahan terjadi saat pelajar-pelajar Jerman dari universitas yang pernah dikatakan sebagai salah satu terbaik di dunia, dikumpulkan di Berlin untuk membakar buku-buku berisi pemikiran yang "Bukan Jerman". Buku-buku yang dibakar antara lain karya Albert Einstein, Thomas Mann, Karl Marx dan para penulis non NAZI lainnya. Tindakan Hitler yang Fasis Jerman juga diikuti musuh besarnya yaitu Stalin yang Sosialis Rusia dan Mao Zedong, RRC.

Berdasarkan uraian diatas secara sederhana kita dapat menyimpulkan bahwa rezim/penguasa yang membakar buku adalah rezim barbar, rezim fanatik, rezim fasis dan rezim komunis yang semua tindakan mereka telah menorehkan tinta hitam kelabu dalam rangkaian sejarah ummat manusia.

Dalam literatur sejarah, kita mengetahui bahwa mulai zaman kuno sampai zaman modern motif utama pembakaran dan pelarangan buku adalah dengan berbagi alasan seperti stabilitas politik dan kekuasaan, fanatisme agama dan budaya dan pada zaman modern ditambah dengan motif perbedaan ideologi dan nasionalisme yang dimaknai dalam artian sempit.

Dalam zaman modern saat ini, dalam hal perbedaan ideologi misalnya, hal ini semakin absurd dan telah terminimalisir secara signifikan dengan munculnya ideologi demokrasi liberal sebagai satu-satunya pemenang pada abad ini. Dari sekian banyak negara bangsa di dunia ini sebagian besar menerapkan ideology demokrasi liberal dan dengan segala modifikasi dan rekayasanya.

Dizaman beradab dan modern saat seperti dekade ini, seharusnya tidak perlu ada lagi yang namanya razia dan pembakaran buku walaupun apa alasannya, mengingat berbagai tingkat indikator ynng menunjukkan kita beradab seperti tingkat pendidikan yang tinggi, ekonomi yang memadai dan tentu saja kita hidup didalam alam demokrasi yang memberikan kebebasan dan pilihan. Hal ini tentu saja ada hubungannya dengan adagium bahwa semakin tinggi tingkat

pendidikan dan ekonomi maka semakin mampu masyarakat negara tersebut untuk beradaptasi dengan perbedaan, dan menyikapi perbedaan adalah sesuatu yang biasa.

Indonesia telah mengalami berbagai fase , dari yang biadab sampai yang beradab. Indonesia di bawah penjajahan Belanda dan Jepang juga mengalami yang namanya razia dan pembakaran buku. Setelah lepas dari penjajahan, Indonesia juga masih harus merazia dan membakar buku di bawah rezim orde lama dan orde baru. Baru setelah era reformasi 1998, buku dianggap sebagai anak kandung reformasi yang ditandai dengan terbitnya segala jenis buku yang pada zaman orde baru dan orde lama dianggap dan dinyatakan sebagai buku terlarang dan haram. Setelah saat itu, pasca era reformasi, masyarakat dan mahasiswa tidak lagi harus sembunyi-sembunyi untuk sekedar membaca Das Kapital-nya Karl Marx atau diskusi sastra tentang Tetralogi Buru-nya Pramoedya Ananta Toer di taman-taman kampus

Namun kini, 2016, harmoni ini telah mulai terusik karena ulah sekelompok massa yang melakukan terror terhadap jenis buku tertentu dengan melakukan aksi razia dan ancaman membakar buku-buku yang mereka anggap akan menghidupkan kembali ideologi tertentu.Kita berharap, tindakan terror ini hanya sporadis dan temporari, dan tidak melebar menjadi tindakan atas nama rezim negara.

Di alam demokrasi liberal yang kita tinggali saat ini, perbedaan adalah hal biasa, ada baiknya kata-kata dibalas dengan kata-kata dengan argumen yang cerdas dan rasional, demikian juga buku dibalas dengan buku. Sikap"tinta dibalas dengan tinta" ini merupakan tindakan beradab bermartabat, sehingga kelak dapat memperkaya khazanah pemikiran dan mampu meningkatkan minat baca masyarakat yang selama ini begitu rendah di Indonesia.

PENTINGKAH COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ?

Secara terminology Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada sebagai akibat dari operasi bisnis yang mereka lakukan.. CSR ini bukan barang baru, CSR muncul mengemuka pertama kali pada KTT Bumi di Rio de Jeneiro, Brazil pada tahun 1992 sebagai jawaban atas berlangsungnya kegiatan ekonomi yang merusak lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Sejak saat itu, pelaksanaan CSR merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan terutama di Eropa dan Amerika.

Kenapa wajib ?selain didukung oleh pemerintah kegiatan CSR ini didukung oleh masyarakat sebagai konsumen. Di Eropa, Amerika dan Jepang, sesuai dengan semakin baiknya pendapatan dan kesadaran akan lingkungan hidup membentuk suatu komunitas konsumen yaitu komunitas konsumen etis. Ketika mereka membeli sebuah produk, mereka akan bertanya apakah produk itu diproduksi

dengan cara merusak alam, memperkerjakan buruh anak, pelanggaran HAM bahkan sampai ke masalah demokratisasi suatu negara penghasil produk tersebut.

Selain dukungan konsumen etis, dukungan dari pemerintah negara-negara maju terhadap perusahaan mereka yang melaksanakan program CSR membuat perusahaan-perusahaan besar seolah berlomba melaksanakan *Corporate Social Responsibilty* (CSR). Regulasi CSR di negara maju merupakan hal yang wajib dan dapat diberikan sanksi bagi yang melalaikannya dan insentif bagi yang melaksanakannya dengan baik. Sanksi bagi pelanggaran pelaksanaan CSR antara lain seperti peringatan tertulis hingga dikeluarkan dari lantai bursa bagi perusahaan *go public*. Sedangkan insentif yang diterima oleh perusahaan adalah memperoleh insentif pajak sekaligus memperoleh keuntungan lain berupa penilaian positif dari pasar dan juga publik.

Di Indonesia, regulasi CSR adalah merupakan kewajiban perusahaan penanam modal baik asing maupun domestik, ketika klausul CSR ini di masukkan kedalam 2 undang-undang yaitu dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan UU

No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM). Pasal 74 UU PT yang merupakan klausul CSR menyebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.Jika tidak dilakukan, maka perseroan tersebut bakal dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan di UU PM, klausul CSR pada pasal pasal 15 huruf b disebutkan, setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Jika tidak, maka dapat dikenai sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal

Kewajiban akan CSR ini pada perusahaan, terutama perusahaan asing yang tidak hanya beroirientasi pada keuntungan semata, semakin diperkuat lagi dengan munculnya standarisasi internasional tentang tanggungjawab sosial perusahaan yaitu ISO 26000 yang mensyaratkan penerapan CSR hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas perusahaan yang meliputi Pengembangan

masyarakat, Konsumen; Praktek kegiatan institusi yang sehat; Lingkungan; Ketenagakerjaan, Hak Asasi Manusia; dan *Organizational Governance* (Organisasi Kepemerintahan).

Istilah CSR di Batam sering kita dengar.Dan dalam prakteknya tidak semua perusahaan di Batam menerapkan CSR. Hanya beberapa gelintir saja yang mulai menerapkan sebut saja PT. Batamindo, PT. Adya Tirta Batam dan perusahaan lainnya yang melaksanakan kegiatan CSR ini. Kegiatannya berupa pemberian beasiswa bagi pelajar/mahasiswa, penghijauan dan bagi-bagi sembako.Namun kegiatan CSR yang dilakukan diatas lebih terkesan bersifat temporary, adu gengsi bahkan hanya sekedar publikasi.Kegiatan CSR tersebut belum yang bersifat sistematis dan tidak terlembagakan dengan baik yang memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat.

Idealnya pelaksanaan CSR yang baik adalah pengelolaan CSR yang mandiri dan terencana dan mempunyai dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat, dalam pelaksanaannya bisa saja kegiatan CSR itu dilakukan oleh perusahaan sendiri dengan membentuk unit khusus yang

melakukan mulai perencanaan hingga implementasinya. Ada pula perusahaan yang mendirikan yayasan, bermitra dengan pihak lain atau bergabung dalam konsorsium. Model mana yang dipilih sangat tergantung pada visi dan misi perusahaan, dan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan

Berdasarkan berbagai permasalah tersebut diatas, sangatlah tepat , apabila saat ini DPRD kota batam merencanakan akan membuat Perda tentang CSR di Kota Batam, disamping tuntutan undang-undang yaitu UU Perseroan terbatas dan UU Penanaman Modal juga disebabkan oleh karakteristik khusus kota batam yang merupakan daerah tujuan penanaman modal asing untuk Indonesia dan wilayah Asia. Banyak perusahaan penanam modal asing yang berasal dari Eropa, Amerika, Jepang, Korea dan Negara maju lainnya yang menanamkan modal mereka di batam.

Diharapkan Perda CSR yang akan di tetapkan oleh DPRD Batam dapat mengatur dengan baik pelaksanaan CSR ini dan mampu untuk mendistribusikannya secara adil dan bermanfaat untuk pengembangan kemasyarakatan seperti kegiatan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan kegiatan lainnya yang

mendukung program pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) yang merupakan amanat dari Millenium Development Goals (MDGs) yang telah di ratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia

Kegiatan penanaman modal asing di Batam biasanya merupakan kegiatan re-lokasi pabrik yang tentu saja kantor pusatnya ada di Eropa, Amerika Serikat, Jepang dan Negara maju lainnya. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan asing yang kebanyakan adalah perusahaan Multi National Corporation (MNC) yang ada di Batam yang telah listing di bursa negaranya masing masing bahkan mungkin di bursa skala dunia.

Hal ini tentu saja CSR bukan merupakan beban dan gangguan bagi mereka, karena di negara asalnya CSR adalah hal yang lumrah dan merupakan bagian dari kebijakan perusahaan dan menurut hemat penulis, regulasi CSR dalam bentuk Perda sangat dinantikan oleh perusahaan, terutama perusahaan penanaman modal asing, karena secara global, kegiatan operasi bisnis mereka sudah lama berubah orientasi, yaitu dari semata mencari keuntungan menjadi operasi bisnis yang focus terhadap tanggung jawab sosial

dan peduli lingkungan, yang mereka sangat yakini akan menghasilkan keuntungan dalam waktu jangka panjang.

Namun disamping itu, kita juga mendengar beberapa penolakan dan nada sinis, kebanyakan dari kalangan pengusaha. Memang ini adalah ciri khas pengusaha Negara dunia ketiga, yang masih belum memahami perubahan kebijakan bisnis global yang saat ini adalah periode bisnis yang berorientasi tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup.

PUNGUTAN DONASI KOTA BATAM : POTRET KURANG OPTIMALNYA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Terhitung Oktober 2011, Pemerintah Kota Batam menerapkan pungutan donasi di pelabuhan internasional dan domestik serta Bandara. Pungutan ini menurut pernyataan beberapa pejabatnya adalah dimaksudkan untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dengan menggunakan payung hukum Peraturan Daerah (Perda) No. 16 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga.

Perlu kita ketahui, bahwa memang sudah banyak kabupaten/kota lain yang telah menerapkan pungutan donasi ini di pelabuhan laut maupun bandara, sebut saja misalnya kabupaten Pariaman, Kota Semarang dan kota-kota lainnya, namun pelaksanaannya tidak begitu mendapat penolakan alias lancar-lancar saja, berbeda dengan kota batam, yang tentu saja mendapat reaksi yang keras beserta kritikan bermacam-macam nadanya dari berbagai unsur masyarakat.

Hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh karasteristik unik kota batam itu sendiri. Kota batam disamping dikelola oleh Pemerintah Kota Batam juga ada lembaga lain yang telah ada sejak lama yang juga mempunyai kewenangan untuk membangun kota batam yaitu Badan Pengusahaan (BP) Batam yang juga berkiprah dalam pembangunan kota batam bahkan jauh sebelum kehadiran Pemerintah Kota Batam, sampai saat ini kewenangan BP Batam tersebut masih cukup signifikan.

Persoalannya tentu saja makin panas, masyarakat dibingungkan oleh kewenangan 2 instansi ini, walaupun peruntukan dana tersebut berbeda, pungutan yang dilakukan oleh BP Batam disetorkan ke kas pusat sedangkan donasi yang dipungut oleh pemko batam disetorkan kas daerah, yang tentu saja pemanfaatan dana tersebut berbeda. namun kondisi ini menjadi preseden burukbagi beberapa kalangan yang menggambarkan kerumitan birokrasi didaerah yang diproklamirkan daerah perdagangan bebas

Berdasarkan perda no. 16 tahun 2001 tersebut disebutkan bahwa Daerah dapat menerima Sumbangan dari Pihak Ketiga danSumbangan dimaksud pasal ini dapat berupa pemberian : hadiah,

donasi, wakaf, hibah dan / atau lain-lain sumbangan yang diberikan oleh Pihak Ketiga.

Namun perda ini seharusnya belum dapat diterapkan karena petunjuk teknik pelaksanaannya belum ada yaitu keputusan ataupun peraturan walikota tentang apa saja bentuk dan kriteria donasi yang akan dipungut

Berdasarkan dari 2 hal tersebut diatas yakni pertama, adanya dualisme pemegang kewenangan dalam pembangunan batam antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam serta, kedua belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan dalam bentuk keputusan walikota tentang donasi, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pungutan donasi di pelabuhan laut dan bandara sangat tidak tepat dilaksanakan, karena disamping tidak populer, toh masih ada sumber penerimaan lain yang jauh lebih besar dan mempunyai payung hukum yang jelas ketimbang dari pungutan donasi yaitu pajak daerah dan retibusi daerah

Namun setidaknya ada 2 dugaan (hipotesa) dalam mencermati bergulirnya wacana dan perdebatan mengenai mengapa pemerintah kota batam menerapkan pemberlakuan pungutan donasi ini

1. Sebagai upaya "trial and error" yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam untuk mengurangi dominasi Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam kewenangan pengelolaan pelabuhan laut dan bandara. Hal ini akan menjadi wacana public yang bergeser dari wacana daerah menjadi wacana nasional mengenai dualisme kewenangan yang terjadi di kota batam yang merupakan persoalan khusus dalam otonomi daerah di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari indikator-indikator beberapa ketidaksepakatan dalam pembagian kewenangan antara Pemko batam dan BP Batam.
2. Diduga, Pemko Batam kesulitan untuk mengoptimalkan pemasukan pendapatan dari sektor pajak daerah dan retribusi di Kota Batam. Padahal ektensifikasi pajak daerah dan retribusi sudah semakin luas, karena berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada pelimpahan beberapa kewenangan

pajak yang dulunya merupakan pajak pusat sekarang 100% merupakan pajak daerah sebut saja Pajak bumi bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Disamping ekstensifikasi, juga ada intensifikasi pajak berupa kenaikan tariff beberapa objek pajak daerah.

Kalau memang tujuannya untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) kota batam yang ujung-ujungnya menambah pundi-pundi kas daerah, ada baiknya sektor utama pendapatan daerah ini dikelola dengan baik, karena menurut pengamatan kami, Sistem, metode dan Sumber Daya Manusia pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah masih jauh dari optimal sehingga terkesan banyak potensi pendapatan asli daerah yang loss dan tidak optimal terealisasi.

POTRET SEBARAN KEPENDUDUKAN DI PROPINSI KEPULAUAN RIAU

Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi yang termuda di Indonesia terletak di jalur perlintasan dunia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Provinsi ini memiliki luas wilayah 251,810,71 km yang sebagian besar yakni 95,97 persen atau 241.251,30 km merupakan perairan. Sedangkan daratan hanya 4,21 persen terdiri dari gugusan kepulauan sebanyak 1062 pulau.

Sebagai propinsi baru, berbagai permasalahan telah muncul yaitu permasalahan ketimpangan baik ketimpangan demografi, ketimpangan ekonomi dan ketimpangan sosial. Kota Batam sebagai maskot sekaligus juga magnit Kepulauan Riau, mempunyai persoalan jumlah penduduk yang cukup besar yang indikasinya dapat dilihat dari banyaknya rumah bermasalah, tingkat kriminalitas, tingkat pengangguran dan tingkat kesejahteraan sosial yang timpang

Melihat data kependudukan Maret 2005 (BPS Kota Batam) dapat kita lihat bahwa penduduk Propinsi Kepulauan Riau berjumlah 1.245.708 jiwa. Kota Batam merupakan tempat penduduk terbesar

yaitu 599.561 Jiwa (48,13 %), Kabupaten Karimun 199.697 jiwa (16,03 %), Kab. Kepulauan Riau 117.512 (9,43 %), Kota Tanjung Pinang 158.514 jiwa (12,73 %), Kab. Natuna 89.832 jiwa (7,21 %) dan Kab. Lingga 80.592 Jiwa (6,47 %).

Struktur Perekonomian yang tergambar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan merupakan kontributor terbesar dalam perekonomian Propinsi Kepri yaitu sebesar 53,53 % yang menyumbang Rp. 2.014.048.080.000 dari total PDRB sebesar Rp. 3.762.584.520.000 sedangkan sektor pertanian hanya menyumbang 6 % dalam PDRB dan sektor pertambangan dan Penggalian hanya menyumbang 6,2 %. Dan kita sama sama tahu bahwa potensi terbesar dari Propinsi Kepri adalah pertanian dan pertambangan

Disamping itu juga, dari sudut permasalahan sosial Pekerja sektor informal yang terbesar adalah di Kabupaten Natuna yaitu 83 % dan Kepulauan Riau 48,1% sedangkan di Kota Batam hanya 24,1 % saja. Hal ini konsisten dengan kontribusi sektor Industri pengolahan diatas, dimana pada sektor industri pengolahan pekerjanya bersifat

formal.sedangkan sektor informal biasanya ditandai dengan sektor pertanian.

Dari data kuantitatif diatas, kita melihat bahwa memang telah terjadi ketimpangan-ketimpangan baik struktural maupun ekonomi. Permasalahannya untuk sementara dapat kita simpulkan adalah permasalahan sebaran penduduk yang tidak merata dan ditambah dengan kebijakan bidang ekonomi yang memprioritaskan batam sebagai basis perekonomian seperti industri, perdagangan, alih kapal, pariwisata dan juga dalam infrastruktur.

Kota Batam, dalam upaya pengendalian kependudukan mempunyai perangkat hukum yaitu Perda No.2 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian kependudukan. Perda ini dimaksudkan untuk meminimalir pertumbuhan penduduk kota Batam. Namun keefektivitasan perda ini masih perlu dipertanyakan mengingat dari tahun ketahun jumlah pencari kerja di Kota Batam semakin meningkat secara signifikan demikian juga dengan daya tampung Sekolah yang dari tahun ketahun semakin tidak mampu menampung anak usia sekolah.

Kebijakan pengendalian penduduk melalui instrumen pengaturan dapat berjalan efektif apabila faktor-faktor alamiah kenapa terjadi urbanisasi itu dijawab dahulu. Menurut Michael P. Todaro (2002) , ada beberapa faktor alamiah dan rasional mengapa orang melakukan perpindahan dari suatu daerah ke daerah lain yang lebih maju adalah disebabkan :

1. Urbanisasi Desa-Kota, dirangsang oleh pertimbangan ekonomi yang rasional yang berhubungan dengan keuntungan dan biaya-biaya relatif
2. Keputusan urbanisasi juga ditentukan tergantung pada tingkat selisih pendapatan yang diharapkan antara pendapatan di kota besar dan pendapatan di desa asal. Besar kecilnya selisih pendapatan itu ditentukan oleh 2 variabel pokok yaitu selisih besaran aktual di kota dan desa serta besar atau kecilnya kemungkinan mendapatkan pekerjaan di perkotaan yang menawarkan tingkat pendapatan yang sesuai dengan yang diharapkan
3. Kemungkinan mendapatkan pekerjaan berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran di kota.

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mengadakan penataan persebaran penduduk di Propinsi kepulauan Riau, dapat diambil kesimpulan yang merekomendasikan berbagai kebijakan-kebijakan yang harus diambil untuk menata persebaran penduduk yang diharapkan akan menghapus berbagai kesenjangan-kesenjangan yang selama ini terjadi, baik kesenjangan penduduk, struktural, regional dan kesenjangan lainnya yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan kabupaten/kota se Propinsi Kepulauan Riau, karena penataan sebaran kependudukan, setiap daerah harus mempunyai kesamaan visi, misi dan tujuan. Untuk itu, berbagai kebijakan-kebijakan dapat diambil diantaranya :

- Upah tenaga Kerja

  Perbedaan Upah tenaga kerja di setiap kabupaten/kota dapat menyebabkan terjadinya arus urbanisasi/migrasi ke daerah yang upah tenaga kerjanya lebih tinggi. Kebijakan Upah tenaga kerja adalah keputusan penetapan UMK, UMS maupun UMP yang sama ataupun mempunyai selisih yang tidak terlalu besar di setiap kabupaten/kota di Kepulauan Riau.

- Perlakuan yang sama terhadap fasilitas khusus fiskal dan moneter

  Batam, Bintan dan Karimun yang telah menikmati fasilitas Bonded Zone Plus (BZP) mendapatkan kemudahan fiskal dalam interaksi ekonominya. Diharapkan fasilitas ini juga bisa dinikmati oleh Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga

- Kebijakan mendesentralisir lokasi pusat-pusat industri dan pertumbuhan ekonomi ke daerah lain

  Kebijakan ini adalah memindahkan lokasi pabrik/plant ke daerah lain, mengingat bahwa tenaga kerja yang terserap dalam industri mayoritasnya berasal dari Pulau Jawa, Sumatera dan kawasan Indonesia Bagian Timur.

- Penetapan dan pemilahan zona kegiatan ekonomi berdasarkan keunggulan dan potensi daerah

  menetapkan cluster kegiatan ekonomi, beberapa kebijakan lain adalah Batam harus konsisten hanya pada sektor Industri dan Perdagangan. Pulau bintan konsentrasi dengan

Pariwisata, Kabupaten Karimun dengan Pertanian, budidaya kelautan dan galangan kapal, serta Kabupaten Natuna dan Lingga dengan konsentrasi pada pertanian, kelautan, pertambangan dan pariwisata

- Meningkatkan pembangunan infrastuktur didaerah kab/kota yang sebaran penduduknya minim seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan dan sarana transportasi.

  Akibat bertumpuknya infrastruktur di batam, maka berakibat segala kegiatan ekonomi baik yang domestik maupun internasional semuanya bertumpu di Kota Batam

- Pembangunan sarana kehidupan seperti sekolah, pelayanan kesehatan,

  Ketersediaan Pelayanan kesehatan dan sarana pendidikan yang merata dapat mencegah arus urbanisasi yang besar ke kota-kota yang relatif maju dan berkembang.

- Dari segi aparatur pemerintahan, perlu menyiapkan segera SIAK Online (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)

yang mencatat secara akurat data mutasi penduduk yang berhubungan (link) dengan instansi pendudukung fasilitas seperti PLN, ATB, Bandara, Pelabuhan, kepolisian, BPS dan Instansi lainnya

LAHAN, EKONOMI RENTE DAN KEADILAN EKONOMI

Di Batam persoalan lahan saat ini menjadi begitu serius. Kebijakan pengalokasian lahan untuk sektor industri ternyata tidak berpengaruh positif terhadap keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Batam yang dalam kelahiraannya memang dirancang sebagai kawasan industri. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya hubungan yang signifikan antara sektor industri manufaktur dengan sektor usaha kecil menengah.sektor ekonomi kecil bertumbuh kembang dengan sendirinya sebagai akibat trickle down effect yang tidak sempurna dari keberadaan sektor industri.

Usaha kecil ini di Batam cukup banyak jumlahnya, data sementara dari Dinas PMK & UKM Kota Batam, menunjukkan angka lebih kurang 10 ribu pelaku usaha kecil dan Menengah yang meliputi pedagang kecil, bengkel, wartel, home industri dan sektor lainnya. Karakteristik lainnya dari pelaku usaha kecil dan menengah ini biasanya belum mempunyai badan hukum dan tempat usahanya selalu berpindah-pindah

Menurut pengamatan kami, keberadaan sektor industri manufaktur yang ada di Kota Batam sampai saat ini hanya mempunyai manfaat sekedar penyerapan tenaga kerja murah saja, namun dalam fungsi mensejahterakan masyarakat, manfaat tersebut belum begitu signifikan dirasakan terutama bagi masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah. Walaupun ada beberapa pengamat dan pengusaha pernah mengklaim bahwa keberadaan industri manufaktur yang ada di Batam banyak membantu keberadaan pelaku usaha kecil dan menengah, yang menurut mereka ditandai banyaknya pedagang-pedagang di sekitar pabrik, tukang ojek dan rumah kost. Memang betul telah terjadi interaksi ekonomi, namun interaksi ekonomi yang terjadi adalah antara pekerja dan pedagang / pelaku usaha kecil lainnya, namun interaksi ini adalah seluruhnya pengeluaran pekerja untuk memenuhi kebutuhannya, bukan pengeluaran perusahaan. Tentu saja yang dimaksud trickle down effect yang ideal adalah perusahaan yang ada dengan kegiatan pembelanjaannya dapat memberikan "tetesan" keuntungan bagi pelaku usaha kecil.

Secara faktual, banyaknya lahan yang dialokasikan kepada sektor Industri tenyata tidak sebanding dengan lahan yang

dialokasikan kepada komplek pertokoan yang menjamur di Batam.Sekarang kita dapat saksikan deretan ruko yang tersebar di seluruh wilayah Batam ada yang berisi penuh tetapi lebih banyak yang kosong melompong. Keberadaan Ruko-ruko yang menjamur di Batam tidak terlepas dari aspek spekulasi untuk mencari keuntungan yang luar biasa, mengingat semakin hari jumlah lahan semakin berkurang, yang tentunya mempunyai proyeksi pada tahun berikutnya harga ruko tersebut semakin mahal. Bahkan santer terdengar, bahwa banyak ruko yang masih kosong ternyata dimiliki oleh pemilik modal yang berasal dari luar Kota Batam

Kondisi ini tentu saja sangat tidak menguntungkan pelaku usaha kecil yang relatif mempunyai modal kecil dan ketiadaan akses terhadap kepemilikan lahan. Pelaku usaha kecil ini biasanya kerap terjebak dalam perangkap ekonomi rente. Akibat ketiadaan akses mereka terhadap kepemilikan lahan dan tempat usaha, maka mereka biasanya membuka usaha dengan menyewa ruko-ruko yang dimiliki oleh orang-orang yang menguasai lahan dengan sewa yang terkadang mencekik leher. Sebagian pelaku usaha kecil, akibat minimnya modal sehingga tidak mampu menyewa ruko.Mereka

memilih membuka usahanya di lahan-lahan ilegal (liar) dan di komplek perumahan mereka tinggal. Namun keputusan ini juga mempunyai risiko yang cukup besar, bagi pelaku usaha di lahan-lahan liar, penggusuran adalah musuh utama mereka, dan bagi pelaku usaha di rumah-rumah, malah pejabat pemerintah dan oknum aparat keamanan yang menjadi musuh mereka walaupun usaha kecil dan menengah ini biasa mampu menyerap tenaga kerja 2-5 orang.

Padahal dari sisi hitungan ekonomis, margin keuntungan mereka banyak terserap untuk membayar sewa yang cukup mahal dan biaya sosial lainnya yang tentunya akan mengancam kelangsungan usaha mereka.

Pemerintah Kota Batam, baik secara politik maupun teknis, mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya. Sementara pekerjaan sektor formal yang diciptakan industri dan pemerintahan tidak bisa menyerap tenaga kerja lagi, maka sektor informal seperti usaha kecil menjadi alternatif untuk penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Sudah semestinya pemerintah Kota Batam dan BP Batam yang mempunyai wewenang pengalokasian lahan untuk memberikan space (ruang) lahan bagi pelaku usaha kecil

dengan memperhatikan aspek pasar dan letak strategis. Sangat sia-sia sekali apabila peruntukan lahan bagi usaha dan pedagang kecil di pinggiran atau yang jauh dari akses jalan, sebagaimana kebijakan selama ini yang menempatkan pelaku usaha kecil pada posisi jauh dari konsumen.

Kebijakan untuk pendistribusian lahan bagi pelaku usaha kecil saat ini dipandang belum terlambat, karena secara kasat mata, kita melihat masih banyak lahan tidur yang sampai saat ini belum dibangun. Dan menurut informasi banyak lahan-lahan tidur tersebut yang belum di bayar UWTO-nya kepada BP Batam.

Tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat sudah merupakan tujuan wajib dari semua tingkatan pemerintahan. Pemerintah pusat misalnya, mencantumkannya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang di ikuti oleh Daerah-daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kota Batam misalnya, di dalam RPJMD tahun 2011-2016 dalam dua dari enam misinya menyebutkan:

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui fasilitasi pengembangan dan pembinaan usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM), koperasi dan investasi yang didukung oleh iklim / situasi usaha yang kondusif dan berlandaskan supremasi hokum dan
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat hinterland dan masyarakat miskin melalui penyediaan fasilitas infrastruktur dasar, penataan dan pembinaan usaha sektor informal serta penanggulangan masalah sosial.

Berdasarkan misi ini, suka tidak suka Pemerintah Kota Batam harus mulai berbenah untuk mengatasi permasalahan kesenjangan ekonomi yang menyebabkan kemiskinan masyarakatnya.Penataan bisa dilakukan bersama BP Batam untuk masyarakat yang bergelut dalam usaha kecil.

Keputusan masyarakat untuk memulai usaha kecilnya adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan berupaya lepas dari kemiskinan.Dari berbagai survei yang dilakukan, pedagang kecil di jalan –jalan dan di lahan liar, semata-mata menggantungkan

hidupnya pada usaha kecilnya. Penggusuran-penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam yang mengatas namakan keindahan kota tanpa pernah memikirkan solusinya, justru menjadikan Pemko Batam dan BP Batam sebagai suatu lembaga pemiskinan rakyat secara massal dan sistematis.

Pembangunan suatu daerah, tujuan utamanya bukan penghargaan Adipura tetapi yang berorientasi memanusiakan manusia itu sendiri. Kalau proses kelangsungan hidup masyarakat disumbat, bisa menimbulkan ekses-ekses negatif yang berkaitan disfungsi hubungan sosial dan ekonomi yang kerap berulang di negeri ini yang berbuah kekacauan dalam tatanan struktur sosial yang apatis dan merusak

KARYA SASTRA DAN PEMBEBASAN MANUSIA

Dunia sastra indonesia dari hari ke hari semakin tidak menarik lagi, kebanyakan sastra yang kita nikmati saat ini hanya berkutat pada permainan kata tanpa makna dan tanpa ada unsur pembebasan jiwa.

Karya sastra yang berupa roman, Cerpen, novel, puisi, dan Drama yang sering kita nikmati sehari-hari tampaknya semakin hari semakin meninggalkan bentuk aslinya yang sebenarnya mengajak pembacanya untuk mengetahui, memahami dan bahkan melaksanakan apa-apa yang ditulis oleh pengarangnya.

Pada era sebelumnya, karya sastra menjadi pembebas manusia baik dari ketertindasan dari penguasa, ketidaktahuan dan keterbelakangan.Karya sastra adalah senjata yang mampu menghunjam tepat ke jantung hati diktator dan penguasa zalim.Tidak heran, pada masa-masa tertentu, sastrawan bahkan dianggap lebih berbahaya ketimbang penjahat atau teroris, dan memperlakukan mereka dengan sangat tidak manusiawi bahkan ada yang sampai berujung maut.

Di Perancis misalnya, Sastrawan Victor Hugo dengan karyanya Les Miserables, diyakini orang sebagai salah satu pendorong terbentuknya republik Perancis yang sebelumnya dikuasai oleh monarki

Demikian juga di Rusia, sastrawan Leo Tolstoy lewat Novel-novelnya antara lain Perang dan Damai (1869), Anna Karenina (1875-1877),Kematian Ivan Ilyits (1886), yang menjadi jiwa bangsa Rusia pada zamannya dan mampu mempengaruhi pergerakan Mahatma Gandhi dan pergerakan-pergerakan moral lainnya didunia

Bahkan karya sastra misalnya novel atau puisi dapat menjadi penyemangat masyarakat yang tertidas ataupun mampu merubah struktur sosial masyarakat seperti puisi-puisi Chairil Anwar yang dijadikan jargon atau slogan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Karya Sastra juga dapat mempunyai fungsi sebagai kontrol terhadap jalannya kekuasaan yang dianggap melenceng dari relnya seperti pesan-pesan dalam puisi Karya W.S Rendra juga Pramudya Ananta Toer melalui roman dan novel-novelnya.

Dan yang terbaru adalah Puisi-puisi kaya Wiji Thukul, yang pada era 1990-an menjadi simbol perlawanan terhadap Orde Baru. Bahkan puisi-puisi Wiji Thukul ini adalah masterpiece sastra era reforarmasi Indonesia yang sampai saay ini masih hangat di bicarakan oleh kritikus dan aktivis.

Fungsi lain sastra yang kita ketahui bersama adalah sebagai wahana mempertebal keimanan dan semakin menjalankan perintah agama dan meninggalkan larangannya adalah puisi-puisi religius sebagaimana Gurindam Dua Belas –nya Raja Ali Haji yang berisi panduan untuk menjalani kehidupan sebagaimana orang beragama. Demikian juga penyair Taufik Ismail yang mengajak pembaca puisinya untuk selalu mendekat pada-Nya

Menurut Sapardi Joko Damono, salah seorang pujangga Indonesia terkemuka, definisi sastra adalah sarana untuk menampilkan gambaran kehidupan, dan kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial. Melihat dari sudut pandang ini, sastra erat kaitannya dengan ilmu sosial yang mencakup hubungan antarmasyarakat dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan.

Ojek semua karya sastra adalah realitas yang terjadi dan realitas kehidupan manusia dipandang secara berbeda-beda berdasarkan ideologi yang dianut oleh sang sastrawan. Ideologi yang kita kenal yang pernah mewarnai kancah kesusastraan indonesia adalah Pancasila, Sosialisme, Agama, nasionalisme, Liberalisme, humanisme bahkan materialisme. Yang masing-masing sastrawan nya berupaya menuangkan realitas kedalam karya-karya mereka berdasarkan ideologi yang mereka anut

Sastra dapat menyuarakan ideologi yang diyakini pengarangnya.Ideologi yang muncul dalam teks sastra tak hanya berupa sikap pandangan ideologis pengarangnya. Namun,bisa pula melalui teks sastranya tersebut pengarang memunculkan berbagai tafsiran bahkan menawarkan wacana tandingan atas sebuah ideologi. Dalam situasi demikian, pengarang akan memunculkan berbagai tawaran sebagai bentuk counter-ideology terhadap sebuah ideologi tertentu.

Saat ini, entah kenapa, kekinian memuculkan karya sastra tanpa jiwa, tanpa ideologi dan tanpa semangat pembebasan bagi masyarakat sekitarnya, sastra saat ini hanya permainan kata, menuju

pemujian diri sendiri dan tak lebih dari bacaan yang kita baca, setelah kita baca, disimpan dan tanpa meninggalkan makna seberkas pun…

MASIH RELEVANKAH ISU KOMUNISME ?

Tulisan ini terinspirasi pada isu-isu dan rumor yang muncul dalam kegiatan kampanye pemilihan presiden (pilpres) 2014. Melalui media sosial, tim kampamye dan simpatisan kedua belah calon berupaya menampilkan sisi terbaik calonnya namun juga berupaya menampilkan sisi buruk dari program capres saingannya. Salah satu rumor itu adalah adanya prasangka akan munculnya kembali faham komunisme di Indonesia jika salah satu capres tersebut berhasil menduduki kursi no. 1 di republik ini. Kita sama-sama tahu bahwa rumor belum tentu kebenarannya. Untuk itu saya menulis tentang apa yang terjadi pada faham komunisme pada saat ini sebagai bahan renungan untuk kita dapat menyaring rumor tersebut sesuai dengan kebutuhan kita

Sejak runtuhnya tembok berlin tahun 1989 dan diikuti dengan bubarnya Negara Uni soviet beserta negara-negara satelitnya baik di asia maupun di eropa timur pada tahun 1991, menandai bahwa salah satu system ideologis terkuat didunia yang ditakuti oleh Amerika dan

Negara-negara Eropa barat telah runtuh yaitu Komunisme. Perang dingin pasca perang dunia ke II telah berakhir dan pemenangnya adalah Amerika Serikat dan sekutunya sebagai bapak kandung faham demokrasi liberal dan kapitalisme

Patut di catat bahwa komunisme bukan hancur karena kalah perang dengan Faham kapitalisme yang di gawangi oleh Amerika Serikat dan Eropa Barat, tapi Komunis Hancur karena palu dan buldoser rakyat yang telah kehilangan keyakinan terhadap ide-ide komunisme. perekonomian Negara-negara komunis terbukti tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem produksi global yang dikendalikan oleh informasi yang mengakibatkan matinya sektor industry dan merebaknya pengangguran secara besar-besaran dan mereka meragukan sistem sosial-komunis mereka untuk dapat tetap menjawab tantangan zaman.

Runtuhnya sosialisme-komunisme menyebabkan sistam yang lainnya, yaitu liberalisme-kapitalisme menjadi satu-satunya ideologi yang berjaya bahkan hingga saat ini.Walaupn ada pula pemikir-pemikir lainnya yang mempunyai prediksi berbeda tentang konsep perpolitikan pasca Perang Dingin dan mengemukakan alternatif dari

segala kelemahan sistem liberal agar tetap bertahan dan tidak termakan zaman.

Namun demikian, Banyak para pakar dan pengamat mengatakan bahwa liberalism kapitalisme lah satu-satunya system ideology yang ada saat ini.Hal ini di perkuat oleh Francis Fukuyama dan Samuel P. Huntington. Fukuyama dalam bukunya " The End of History and The Last Man" menyebutkan mengatakan bahwa paska perang dingin, tidak akan ada lagi pertarungan antar ideologi besar, karena sejarah telah berakhir dengan kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal. Meskipun menyadari evolusi sejarah, Fukuyama beranggapan bahwa demokrasi liberal merupakan titik akhir dari evolusi ideologis umat manusia sekaligus bentuk final pemerintahan manusia.Runtuhnya Soviet dan ambruknya tembok Berlin menjadi pertanda kalahnya sosialisme, dan sebagai gantinya adalah perayaan dan kemenangan kapitalisme tanpa ada kompetitornya.Sedangkan Huntington dalam bukunya "The Clash Civilizations' menyebutkan bahwa secara fundamental dari sebuah konflik dalam dunia yang baru ini terutama lagi bukanlah karena ideologi atau ekonomi. Bagian terbesar diantara berbagai macam bentuk manusia dan sumber daya

yang ada maka konflik akan didominasi oleh perihal yang terkait dengan budaya. Lewat hipotesisnya, Huntington mencoba menawarkan paradigma baru dalam melihat dunia.Ia melihat ada 7 peradaban yang akan mewarnai persaingan global: Western, Latin American, Confucian, Japanese, Islamic, Hindu dan Slavic-Orthodox.

Apa yang disampaikan oleh Huntington diatas, tampaknya sudah dilaksanakan Amerika Serikat dan sekutunya seperti yang kita lihat dalam kebijakan luar negeri yng mereka lakukan seperti kebijakan terhadap Irak, Iran, Suriah dan negera-negara lain yang kesemuanya lebih banyak bersifat budaya sosioreligius ketimbang ideologis.

Menurut Fukuyama, sejak kejatuhan ideology komunisme, lonjakan besar terjadi dalam perubahan ideology Negara-negara dunia. Sebagai contoh dari tahun 1975 sampai dengan 1990 saja terdapat kenaikan Negara yang mengganti system ideology sebanyak 30 negara dan pada saat ini hampir seluruh Negara di dunia sudah memakai system demokrasi liberal kapitalisme.

Disamping itu, Fukuyama menemukan fakta bahwa Negara-negara yang merubah system ideologinya ke liberalism kapitalisme (sebelumnya memakai system fasisme atau komunis) secara statistik mengalami kemajuan ekonomi yang luar biasa seperti yang ditunjukkan oleh Spanyol, Pilipina, Afrika selatan, Peru dan banyak Negara lainnya.

Kita tidak boleh lupa, bahwa Indonesia, secara kuantitatif mengalami lonjakan besar ketika dimulainya pemerintahan orde baru pada awal tahun 1970-an di masa Presiden Soeharto mengadop faham liberalisme kapitalisme yang salah satunya ditandai dengan masuknya investasi asing, serta masuknya Indonesia kedalam lembaga-lembaga dunia seperti WTO, IMF dan lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional lainnya. Dalam bidang politik pemerintah orde baru berkenan meambah partai politik serta tumbuhnya lembaga-lembaga demokrasi yang menurut Fukuyama sebagai syarat mutlak dalam Negara dengan faham demokrasi liberar dan kapitalisme.

Memang ada beberapa negara Asia dan Amerika latin yang masih teguh memegang ideologi komunis seperti Vietnam, Tiongkok

(RRC), Korea Utara dan Cuba dan beberapa negara Amerika Latin. Tapi ideologi komunis yang diterapkan di negara itu, sudah tidak semurni ajaran Karl Marx. Negara-negara seperti Tiongkok, Vietnam dan Kuba telah membuka diri dengan negara lain, bahkan juga dengan negara yang oleh mereka dicap sebagai negara kapitalis sehingga tidak heran kita dengan mudah kita menjumpai Mcdonalds dan KFC di berbagai kota di Tiongkok dan Vietnam serta lambing-lambang kapitalis lainnya.

Banyak pengamat menyebutkan, bahwa Negara-negara seperti Tiongkok dan Vietnam hanya menunggu waktu saja untuk bermetamorfosis menjadi demokrasi liberal, mengingat derasnya arus informasi dan kebutuhan akan pengakuan pribadi dan hak azasi manusia bagi warganya yang selama ini kita ketahui pemerintahnya cukuf represif menghadapi warganya, setelah itu sempurnalah sudah faham kapitalisme dan demokrasi liberal menguasai seluruh dunia… Kini tidak ada lagi kekhwatiran akan komunisme dan penguasaan oleh Negara yang begitu di benci oleh Adam Smith. Yang ada hanyalah apa yang dikhawatirkan oleh Huntington, yaitu persoalan benturan peradaban, yang tampaknya Indonesia sendiri sudah mulai

mengalaminya yaitu konflik-konflik yang bermuatan keagamaan dan etnis.

SANG PERENCANA PEMBANGUNAN

Proses perencanaan pembangunan adalah salah satu bentuk rekayasa dalam perubahan sosial masyarakat. Melalui perencanaan dinamika perubahan sosial dapat diarahkan sesuai dengan keinginan, dalam konteks ini adalah pemerintah.

Saat ini banyak hasil kegiatan perencanaan di berbagai daerah di Indonesia mendapat gugatan masyarakat karena rencana itu dinilai tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat karena kebijakan perencanaan pembangunan itu seringkali di dasarkan pada daftar keinginan yang sifatnya instan dan terburu-buru. Misalnya saja, demi alasan politis dan keuntungan pribadi segelintir kelompok

Tetapi ada juga produk-produk perencanaan yang dibuat dengan hanya memperhatikan aspirasi masyarakat secara murni melalui kelembagaan Reses Legislatif dan Musrenbang eksekutife sehingga terkesan meninggalkan kaidah-kaidah akademis dan isu-isu global seperti lingkungan dan Hak Asasi Manusia

Sebagai daerah Kepulauan, Batam adalah Kota yang diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi akibat perubahan iklim. Mulai dari kenaikan muka air laut yang bisa menenggelamkan pulau-pulau kecil, hingga maraknya penyakit menular akibat kenaikan suhu permukaan Bumi.

Demikian juga dengan isu lingkungan, dampak dari polusi laut dan kerusakan lingkungan akibat pembangunan (reklamasi) di pantai-pantai mangrove dan juga diperparah dengan industrilisasi pengerukan pasir, yang bahkan dalam jangka pendek telah menyengsarakan banyak keluarga nelayan. Menurut Informasi yang beredar, proses pembangunan yang mengorbankan lahan pantai mangrove itu dilakukan Pemko Batam untuk meningkatkan Pendapatan daerah, Namun disisi lain, secara teori dan tujaun primernya, proses pembangunan diharapkan harus bisa menaikkan tingkat kesejahteraan rakyat seiring dengan angka produktifitas daerah, dengan kata lain tiap kenaikan pendapatan daerah harus tercermin pula di sisi perbaikan kondisi ekonomi masyarakatnya.

Namun yang terjadi adalah, kenaikan pendapatan daerah tidak signifikan meningkat, namun malah secara signifikan

menyengsarakan masyarakat, yang ternyata berdampak mampu merobah status pekerjaan masyarakat, dari nelayan menjadi karyawan pabrik, atau dari nelayan menjadi buruh bangunan,

Secara normatif, seorang perencana harus mampu untuk mengintegrasikan ketiga rasionalitas dalam perencanaan modern yaitu Rasionalitas Teknologi, Rasionalitas Politis dan Rasionalitas Etika secara harmonis dalam menjalankan peran profesionalnya (professional role). Akan tetapi, akan tetap menjadi sebuah pertanyaan besar apabila seorang perencana dihadapkan pada pertentangan pada ketiga nilai tersebut. Adalah sesuatu yang sangat naif apabila ketiga rasionalitas tadi dianggap akan selalu berjalan beriringan. Nilai-nilai etika memang akan sangat bergantung pada mind-set dan faktor-faktor yang membentuk seorang perencana secara dogmatis. Akan tetapi rasionalitas teknis dan politis merupakan dua rasionalitas yang perkembangannya jauh lebih cepat dibanding nilai-nilai etis, mengingat kedua rasionalitas itu merupakan dua hal yang akan sangat bergantung pada kondisi sosio-kultural masyarakat dan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Artinya, kedua rasionalitas itu bisa berubah secara sekuensial atau bahkan

responsif terhadap apa yang terjadi. Keduanya bahkan bisa saling bertentangan.

Dalam dunia perencanaan dewasa ini, paradigma baru yang berkembang seiring dengan era otonomi daerah adalah paradigma perencanaan partisipatif (participatory planning). Produk-produk rencana di berbagai daerah mendapat gugatan karena rencana itu dinilai tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Tetapi ada juga produk-produk rencana yang dibuat dengan hanya memperhatikan aspirasi masyarakat secara murni sehingga terkesan meninggalkan kaidah-kaidah akademis.

Keduanya bukan merupakan cerminan dari suatu proses perencanaan yang “benar”, dalam pengertian bahwa mungkin paradigma yang dianut perencana dalam proses perencanaan sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan sosio-kultural yang terjadi di masyarakat. Seiring dengan berkembangnya iklim partisipatif dalam perencanaan, masyarakat mulai tersadarkan bahwa mereka adalah bagian terpenting dalam proses itu, dan oleh karenanya pelibatan dan partisipasi aktif mereka juga menjadi sesuatu yang esensial.

Hal ini menjadi sebuah dilema baru bagi perencana, sekaligus memaksa perencana untuk merumuskan kembali peranan mereka dalam proses perencanaan itu. Peranan inilah yang nantinya akan menentukan posisi mereka dalam peta perpolitikan yang terjadi dalam konteks perencanaan. Dan secara pragmatis, hal ini jugalah yang akan menentukan, apakah profesi perencana masih menjadi profesi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak.

MANAJEMEN MELAYU : ALTERNATIF DITENGAH ERA GLOBALISASI

Keberhasilan Jepang yang mampu mengimbangi dominasi dunia barat dalam aspek ekonomi dan teknologi, setidaknya membuka mata kita bahwa budaya lokal sutau bangsa dan ajaran agama dapat berpengaruh terhadap sistem manajemen dan etos kerja suatu bangsa. Jepang yang mulai bangkit dari reruntuhan perang tahun 1945 dalam waktu relatif singkat walau dengan keterbatasan sumberdaya alam dan teknologi, mampu mengubah kiblat manajemen yang tadinya di barat sekarang beralih ke timur, keberhasilan Jepang adalah bukti keberhasilan manajemen masa kini dan yang akan datang. Keberhasilan Jepang ini pun banyak diikuti oleh negara negara seperti Taiwan dan Korea yang mengadopsi latar belakang budaya dan ajaran agama sebagai sebagai pijakan/fondasi dalam melaksanakan kegiatan ekonomi.

John Naisbit dan Patricia Aburdene dalam “Megatrend 2000”, menyebutkan bahwa paradoks globalisasi yang timbul adalah

munculnya sentimen kultural nasionalisme, yang akibat dari keseragaman gaya hidup globalisasi, akan menyebabkan orang mencari identititas dirinya pada nilai yang dianutnya baik itu budaya, agama, keluarga dan lain-lain. Seiring dengan banyaknya kegagalan-kegagalan sistem manajemen yang berlandaskan dunia barat (individual dan kebebasan), seperti skandal-skandal perusahaan besar baik di Amerika maupun di Eropa, seharusnya membuat kita berpikir ulang untuk mencari sistem manajemen dan etos kerja berdasarkan nilai lokal masing-masing negara atau bangsa.

Bergesernya kekuatan ekonomi ke timur termasuk asia pasifik, memunculkan kekuatan-kekuatan tatanan ekonomi baru yang berdasarkan bangsa dan budaya masing-masing antara lain Jepang, Korea, China, Taiwan, Singapura dan Malaysia. Pergeseran ini menurut para pakar, untuk sebagian negara di Timur adalah merupakan suatu anugerah (blessing) akibat sistem ekonomi dan manajemen barat yang mencapai tahap kejenuhan.Hanya negara yang mampu mengimplementasikan budaya dan ajaran agama kedalam pandangan hidup dan pilosofi bekerja bagi masyarakatnyalah yang dapat bertahan. Hal ini dimaklumi bahwa

sistem manajemen dan etos kerja yang diimport dari luar, akan menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya, karena terkadang implementasinya berbenturan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Indonesia sebagai contoh, sampai sekarang belum menemukan suatu sistem manajemen dan etos kerja yang berbingkai budaya lokal yang tepat. Kita masih ingat bahwa zaman Sukarno, asas sosialisme dipaksa diterapkan sebagai landasan etos kerja padahal jelas itu bukan budaya lokal, kemudian zaman Suharto, Pancasila merupakan landasan manajamen, etos kerja dan merupakan manifestasi seluruh kebudayaan yang ada di indonesia, namun hasil yang diharapkan masih jauh dari yang diharapkan, karena terlalu luas pengertian dan penjabarannya dan terkadang muncul dualisme yang membingungkan masyarakat.

Pengaruh kemampuan memofdifikasi manajemen terhadap eksistensi kebangsaan dan kenegaraan semakin besar terutama dalam hal ekonomi dan teknologi. Kondisi ini mengharuskan adanya kemampuan sistem manajemen yang memadai untuk semua perusahaan baik perusahaan publik maupun swasta, kalau bangsa itu

ingin bisa bersaing dalam persaingan internasional, diperlukan suatu sistem manajemen yang didasarkan aspek kultur dan sosial. Dalam konteks manajemen, sebenarnya manajemen itu sendiri adalah hasil suatu kebudayaan. Itulah sebabnya aspek sosial budaya suatu bangsa mempunyai pengaruh terhadap kemampuan dan kondisi manajemen suatu bangsa. Seluruh sistem nilai yang berlaku dalam kehidupan suatu bangsa, pandangan hidupnya serta habit (kebiasaan-kebiasaan) memberikan dampaknya terhadap pelaksanaan manajemen secara makro kebangsaan. Sebaliknya juga penyelanggaraan manajemen memberikan kontribusi kepada perkembangan budaya dan sosial, kalau sebelumnya tidak pengertian tentang manajemen dalam kehidupan suatu bangsa, maka setelah bangsa bangsa itu menjalankan manajemen dengan cara berdasarkan susial budaya lokal maka akan terjadi peningkatan budaya bangsa. Hali ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta bahwa seluruh budidaya dan aspek sosial setiap bangsa selalu dipengaruhi oleh pengaruh budaya-budaya luar. Misalnya saja Bahasa Inggris, sekitar 65 % perkataan bahasa Inggirs berasal dari budaya luar seperti Latin, Yunani, Jerman dan lain-lain. Demikian juga bahasa dan budaya melayu, pengaruh budaya dan bahasa asing sekitar 35 %

yaitu yang berasal dari Arab, Inggris, Jawa dan kepulauan indonesia, China, Tamil, Portugis dan lain-lain. Dengan demikian sangat mungkin sekali, pengaruh luar yang memberikan sumbangan bahasa juga meninggalkan sedikit banyak pengaruh budaya dan gaya hidup masing-masing negara atau bangsa luar kepada budaya melayu itu sendiri.

Siapa yang disebut Melayu ?

Dalam konteks mikro, menurut orang Belanda dan Inggris yang pernah menjajah indonesia, dan Malaysia, menyatakan hampir seluruh penduduk nusantara (Indonesia) dan penduduk disemenanjung malaya adalah suku melayu, hal ini didasarkan pada warna kulit, profil tubuh, dan bahasa yang dipakai hampir sama

Lebih sempit dan spesifik tentang kategori bangsa melayu adalah menurut Tengku Luckman Sinar dalam bukunya "Jatidiri Melayu" bahwa pada awalnya orang Melayu tersebut mendiami wilayah Thailand Selatan, Malaysia Barat dan Timur, Singapura, Brunei, Kalimantan Barat, Temiang (Aceh Timur), pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Jambi, dan pesisir Palembang. Dengan

demikian jika dibagi berdasarkan teritorial negara maka ada 4 negara yang berbudaya dan berbahasa melayu yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunai dan sebagian Thailand

Karakteristik Budaya Melayu

Menurut Selo Sumarjan menyimpulkan bahwa secara sosiologis bahwa kebudayaan suku-suku di indonesia, termasuk melayu sebagai ras, lebih berorientasi kepada kehidupan bermasyarakat (socially oriented) ketimbang berorientasi pada material (material oriented). Selain itu beberapa pakar sosiologi dan antropologi menyebutkan bahwa kekuatan budaya melayu adalah bahwa melayu sebagai suku sangat menghargai keteladanan, dalam hal ini bawahan akan berusaha menjadi lebih baik jika atasannya memberi teladan yang baik. Disamping karakteristik diatas, ada juga karakteristik negatif yang melekat pada budaya melayu dan budaya-budaya di Indonesia pada umumnya yaitu : berorientasi pada masa lalu, aji mumpung dan boros

Karakteristik diatas sedikit banyak menujukkan bahwa pada umumnya budaya-budaya bangsa di timur adalah kurang lebih sama.

Persamaannya adalah berorientasi pada masyarakat (Di Jepang ; kelompok), menghormati yang lebih tua (senioritas) dan menghargai keteladanan pimpinan atau yang dituakan

Harapan Baru : Sistem Manajemen dan Ekonomi Berbasis Budaya Melayu

Setidaknya ada 3 (tiga) faktor eksternal yang dapat menjadi katalisator agar budaya melayu dijadikan falsafah dan pijakan dalam sistem manajemen dan ekonomi di seluruh negara-negara yang berpenduduk Melayu khususnya Indonesia, Malaysia, dan Brunai yaitu :

1. Kegagalan Komunisme dan Kapitalisme yang diambang kehancuran. Ternyata sejarah kemudian tidak memberikan kesempatan pada sistem komunisme untuk bertahan lama, sistem ini akhirnya runtuh seiring dengan bubarnya Uni Soviet dan negara-negara pendukungnya yang menandai berakhirnya kekuasaan Blok Timur di dunia. Sementara, kapitalisme yang masih bertahan pun, saat ini dinilai tidak mampu menjawab kepincangan ekonomi yang makin tajam

dengan jumlah pengangguran, perselisihan usaha, gelombang urbanisasi, serta degradasi lingkungan yang semakin tinggi.

2. Kegagalan banyak negara termasuk Indonesia, akibat terlalu berkiblat dan berpedoman kepada manajemen barat dan budayanya sekaligus. Fenomena rontoknya berbagai perusahaan besar dan skandal-skandal manajemen di dunia barat, membuktikan bahwa tidak mungkin sistem ekonomi suatu bangsa akan berhasi jika tidak didasarkan atas kebudayaan dan tata nilai yang dianut oleh sebuah bangsa.
3. Kawasan ASEAN yang didalamnya terdapat negara-negara yang berbudaya melayu telah menjadi salah satu pusat perekonomian yang diperhitungkan dunia saat ini. Hal ini didukung oleh jumlah penduduk yang besar, sumber daya alam yang melimpah ruah dan letak posisi ASEAN yang sangat strategis untuk perdagangan dunia

Disamping itu, ada juga faktor internal yang selama ini diabaikan oleh negara/bangsa Melayu akibat imperialisme/penjajahan barat namun merupakan suatu kekuatan besar dalam dunia melayu adalah bahwa bangsa Melayu adalah bangsa serumpun yang tidak terikat

oleh batas-batas geografis dan kultural dalam wilayah administratif tertentu, melainkan tersebar di berbagai negara termasuk Cina dan Afrika Selatan. Disamping itu juga Melayu berhasil membangun suatu budaya yang bisa bertahan terutama di kawasan Asia Tenggara selama berabad-abad lamanya. Disamping itu terdapatnya ikatan kekeluargaan secara tradisional antara penduduk satu negara dengan penduduk negara lainnya.

Berdasarkan karakteristik kekuatan dan kelemahan budaya melayu baik secara internal maupun eksternal seperti pada uraian diatas, tidak ada salahnya jika mulai sekarang kita memikirkan bagaimana aspek budaya dan tatanan nilai bangsa Melayu dapat ditransformasikan kedalam sistem ekonomi dan manajemen bagi negara-negara yang berbangsa melayu sebagai etos kerja dan falsafah hidup rakyatnya. Namun sebagaimana Jepang yang berhasil memasukkan unsur budaya kedalam sistem manajemen dan etos kerjanya yang dimotori oleh pemimpinnya dan kemudian diikuti oleh rakyatya, menjadi persoalan mendasar bagi penerapan budaya melayu kedalam sistem manajemen, karena semua bisa berhasil apabila kalau pemimpin-pemimpin negara bangsa melayu mempunyai

keinginan dan mempunyai tekad yang kuat. Masalahnya sekarang adalah belum adanya tindakan konkrit antara pemimpin-pemimpin formal negara-negara Melayu untuk menerapkan atau minimal merencanakan sistem manajemen melayu bagi kawasan ini, padahal saatnya sudah tepat untuk mengganti sistem manajemen yang berasal dari barat karena ternyata lebih banyak gagalnya ketimbang suksesnya. Jangan-jangan peribahasa "***semut diseberang lautan dapat dilihat, tapi gajah didepan hidung tak tampak***" mungkin lagi menghinggapi para pemimpin di negara kawasan melayu ini.

CIVIL SOCIETY

Istilah Civil Society (masyarakat madani) bukan hal yang baru di Kota Batam. Disamping sering diucapkan oleh para pejabat dan para orang terhormat dalam setiap kesempatan, bahkan pidato politik atau kampanye tidak akan lengkap bila tidak menyebut kata "masyarakat madani". Istilah masyarakat madani juga merupakan visi dari Pemerintah Kota Batam yaitu : *Batam menuju Bandar Dunia yang Madani*. Pesona dari Kata "Madani" juga banyak terinspirasi dalam pembuatan nama lembaga/LSM. Dalam pemakaiannya, banyak masyarakat yang keliru terhadap pemahaman masyarakat madani, bahkan ada yang cenderung mengarahkannya secara subjektif kepada ajaran agama tertentu.

Masyarakat Madani sebagai terjemahan dari *Civil Society* pertama kali diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim (Mantan Deputy PM Malaysia) pada pidato Kebudayaannya di Festival Istiqlal Jakarta pada tahun 1995. Baik Madani (tamaddun) maupun Civil (Civilization) berarti peradaban. Didalam kata peradaban terkandung unsur

kebudayaan, nilai-nilai moral dan pandangan hidup bangsa. Sebelumnya civil society diterjemahkan dengan masyarakat sipil, namun sering ditafsirkan rancu dengan istilah “militer- sipil”.

Apa yang dimaksud dengan civil society ? Civil society adalah sebuah komunitas sosial dimana keadilan dan kesetaraan menjadi fundamennya, yang sadar hukum, sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sadar akan kedaulatan yang ada ditangannya, serta mau melaksanakan hak-hak tersebut untuk melakukan perbaikan sistem dan mempertahankan hak-hak tersebut bila dilanggar. Dengan kata lain, civil society adalah suatu masyarakat yang mandiri, yang bisa mengatur dirinya sendiri, dan aktif melakukan kontrol sosial terhadap pelaksanaan pemerintahan. Menurut Nurcholish Madjid (2001) asas utama dari Civil Society adalah kebebasan dan supremasi hukum. Kebebasan tersebut mencakup kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan bersarikat, hak memberi suara, partisipasi dalam pembuatan keputusan politik dan hak untuk mengkritik pemerintah.

Prasyarat peran masyarakat madani yang optimum di dalam penyelenggaraan negara adalah adanya keterbukaan politik,

kebebasan yang didapat dari dijaminnya hak-hak sipil dan politik warga negara, Dalam suatu masyarakat yang sudah dewasa, masyarakat madaninya sudah berkembang dengan baik, maka perbedaan pendapat itu tidak berakhir dengan anarki dan kekerasan , tetapi dilakukan lewat jalur hukum, dialog politik, lobi kepada wakil rakyat dan sebagainya

Civil society lahir sebagai antitesis dari kelembagaan peran masyarakat sebelumnya yaitu natural society dan political society. Dalam natural society, negara tidak ada, yang ada hanyalah sekelompok orang-orang yang saling berperang untuk mempertahankan kepentingannya sementara hukum dan aturan tidak ada. Dalam political society, pengaturan masyarakat diserahkan sepenuhnya kepada negara (kerajaan) , namun dalam perjalannya konsep political society menimbulkan peran sentral negara yang melahirkan kesewenang-wenangan dan diktator. Melihat kondisi ini, timbullah pemikiran para intelektual. John Locke menyatakan bahwa kekuasaan negara tidak boleh mutlak, hak hak dasar manusia seperti kemerdekaan, kepemilikan pribadi dan hak atas kehidupan tidak boleh di intervensi/diganggu oleh negara manapun juga. Pemikiran

Locke kemudian diikuti oleh pemikir lainnya Rosseau dan Montesqieu dengan munculnya teori ***Trias Politika***, yang memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga bagian yaitu *eksekutif*, *legislatif* dan *judikatif.*

Disamping itu, perlu juga dicermati pemikiran Karl Marx mengenai civil society, bagi Marx, negara merupakan alat politik bagi kelas dominan, maka kepentingan kelas dominan seperti buruh dan petani harus menjadi prioritas utama dalam civil society dalam negara. Kalau kelompok mayoritas ini diangkat, maka akan tercipta masyarakat yang memiliki demokrasi politik dan juga demokrasi ekonomi.

Perjalanan Civil Society di Indonesia

Di era Soekarno dan Soeharto, pelaksanaan civil society hampir identik dengan pola political society. Pembungkaman hak partisipasi masyarakat menjadi ciri utama dalam dua pemerintahan ini. Soekarno, Misalnya dengan Dekrit 5 Juli 1959 yang melahirkan demokrasi terpimpin membungkam banyak unsur civil society seperti pers, mahasiswa dan intelektual, seniman dan membubarkan parlemen. Demikian juga dengan Soeharto, atas nama

stabilitas politik dan ekonomi, pembungkaman partisipasi masyarakat dalam negara dilakukan dengan menguatnya peran militer dalam Bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Aktivitas mahasiswa di kerangkeng dengan NKK/BKK dan pers yang dianggap "kiri" di bredel bahkan yang lebih tragis lagi adalah dilarang berkumpul apalagi berbisik-bisik, kalau bandel esok harinya intel atau kodim akan mengangkat kita untuk diamankan. Apa yang dilakukan oleh Soeharto selama hampir 32 tahun menumbuhkan stigma dan trauma yang mendalam dalam sanubari masyarakat Indonesia yang kelak akan meledak secara radikal.

Civil society di Indonesia mulai menampakkan wujudnya setelah Soeharto tumbang dan digantikan oleh Habibie. Civil society makin perkasa dibawah era Presiden Gus Dur. Ketika Gus Dur menjadi presiden, seluruh elemen civil society di berdayakan, pers bebas di gagas, sistem pengambilan keputusan Gus Dur bersifat Bottom up dengan cara melontarkan isu-isu ketengah masyarakat, LSM bebas berpendapat, kebebasan intelektual dibuka, pagar-pagar yang tertutup di buka. Kebijakan ini terus berlanjut di bawah kepemimpinan Megawati.

Namun dalam perjalanan mewujudkan Civil society di indonesia mulai era Habibie sampai Megawati bukan berati tidak ada hambatan-hambatan. Feodalisme dan label status quo para pejabat baik di pusat maupun didaerah serta dosa-dosa masa lalu dalam era Soeharto yang sering disebut dengan Orang ORBA, membuat civil society menjadi momok yang menakutkan bagi mereka. Ditambah lagi dengan beberapa persoalan dalam masyarakat seperti tingkat pendidikan, pendapatan dan kesadaran hukum masyarakat yang masih sangat rendah. Di sisi lain, masih terdapat kultur masyarakat yang belum sesuai dengan kultur demokrasi, misalnya, sikap paternalistik dan sikap belum menerima perbedaan pendapat sebagian masyarakat. Apalagi pada saat ini muncul gejala baru dalam kehidupan negara di mana terjadi persaingan para elite politik yang lebih berorientasi kepada kepentingan kelompok masing-masing dengan berusaha melemahkan atau menjatuhkan kelompok lainnya, tanpa menghiraukan nilai-nilai etika dan moral politik. Bahkan disinyalir pula, bahwa terjadinya serangkaian konflik dan kekerasan tersebut tidak terlepas dari provokasi sejumlah elite politik yang tidak menghendaki terwujudnya kondisi negara yang stabil. Banyak kalangan mensinyalir, bahwa kekerasan-kekerasan masyarakat yang

terjadi di Maluku, Poso dan di berbagai daerah lainnya yang bernuansa darah dan kekerasan, tak lain adalah untuk mencoba mengganggu terwujudnya civil society yang ideal di Indonesia

Bagaimana di Batam ?

Proses kota batam sebagai kota dengan masyarakat yang madani dan beradab telah mulai berposes dengan hadirnya instusi-instusi formal sejak tahun 1999 yaitu Pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam. Dengan penduduk hampir 700.000 jiwa dengan keheterogenan berbagai suku dan agama. Ada keunikan tersendiri dari Kota Batam, disamping Pemerintah Kota batam ada pula sebuah institusi lainnya yaitu Otorita Batam yang telah ada sejak tahun 1974. secara teoritis, mungkin kita dapat membedakan nya : pemerintah Kota Batam adalah "negara" dalam pengertian mikro dalam konteks civil society dan Otorita Batam adalah sebuah lembaga teknis bisnis yang diciptakan pemerintah pusat untuk meningkatkan penerimaan negara melalui investasi dan industri. Secara fungsional, pemko Batam bertugas menyelenggarakan roda pemerintahan dan bertanggung jawab terhadap penataan sosial masyarakat.

Ada suatu gejala yang terjadi dalam masyarakat batam, kebebasan berserikat dan berkumpul serta kebebasan mengemukakan pendapat sebagaimana prasarat pelaksanaan civil society telah menjadi katalisator tumbuhnya LSM dan Paguyuban-paguyuban Daerah/suku di Kota Batam yang setidaknya telah berjumlah ratusan. Namun perlu dicatat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kenegaraan di Kota Batam setidaknya telah pernah menimbulkan aib dan stigma dalam proses kekebasan berserikat dan kebebasan mengemukakan pendapat yaitu tindakan pengusiran terhadap saudara kita Ampuan Situmeang, SH (Penasihat Hukum) dan Bambang Yulianto, SH (Aktivis Buruh). Banyaknya LSM dan Paguyuban yang muncul di Kota Batam ternyata tidak berjalan pararel dengan menaiknya partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kebanyakan LSM lebih banyak berkutat pada sasaran jangka pendek sehingga lupa pada pemberdayaan masyarakat sesuai bidangnya. Paguyuban yang ada pun demikian, banyak paguyuban daerah yang mempunyai warga yang besar justru lebih banyak bermain politik praktis dukung mendukung tetapi lupa mengayomi dan lupa memperhatikan hak-hak kehidupan warganya yang harus diperjuangkan misalnya perjuangan

untuk lepas dari kemiskinan, kebodohan dan keterdindasan ekonomi yang jelas-jelas sudah dikuasai oleh orang asing (Singapura). Kita juga tidak habis pikir, paguyuban daerah dan LSM yang ada justru kembali kepada masa natural society yang saling menyerang satu sama lain, saling mendukung tetapi tidak tahu substansial apa yang didukungnya. Akibat kondisi ini, kita sekarang bingung, bagaimana masyarakat kita bisa minta penjelasan tentang kerusakan lingkungan, perubahan hutan lindung atau buffer zone menjadi komersial, menjamurnya ruko yang lebih banyak dari industri, pemanfaatan lahan yang amburadul, atau tentang perilaku masyarakat batam yang lebih menekankan kekerasan dan saling menyerang dari pada berdialog hanya karena perbedaan pendapat. Seharusnya kita bertanya kepada Pemko Batam dan DPRD Batam, tetapi mereka akan menjawab masalah-masalah diatas bukan tanggung jawab mereka, dan telunjuk mereka diarahkan pada suatu gedung megah yang kebetulan di daerah yang sama : Otorita Batam. Lantas bagaimana kelanjutan civil society di Kota Batam : jawabnya : masih jauh dengan jalan panjang yang terseok-seok.

TEORI KONSPIRASI

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar tentang Teori Konspirasi, namun mungkin banyak diantara kita tidak tahu teori konspirasi secara disiplin ilmu sosial.. yang terkadang kita membuat kesimpulan bahwa teori konspirasi itu lain dari yang di maksud.

Teori konspirasi adalah sebuah teori yang telah diciptakan untuk menjelaskan perubahan-perubahan sodial yang tidak direncanakan. Yang dimaksud dengan tidak direncanakan disini bukanlah sekedar bahwa perubahan sosial tersebut terjadi secara sopntan, tetapi secara khusus perubahan sosial yang menyimpang dari suatu perencanaan sosial atau bahkan bertentangan dengan perencanaan sosial tersebut (Kleden :2001)

Teori Konspirasi adalah sebuah teori yang sangat sederhana . dengan menggunakan epistemologi Johan Galtung yang mengelompokkan teori-teori sosial kedalam structur approach dan actor approach, dgn demikian Teori Konspirasi sangat beroientasi pada aktor.Dalam teori konspirasi diandaikan bahwa tingkah laku

orang dipengaruhi oleh motivasi yang sadar untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketetapan umum berlaku.

Kalau teori kebudayaan menjelaskan tingkah laku " dari jurusan belakang ", teori konspirasi menjelaskan tingkah laku orang "dari jurusan depan" (karena mereka digerakkan oleh motivasi kuat untuk mencapai tujuan yang disadarinya).

Peristiwa pembantaian Tiannamen di China, dpt dikategorikan sebagai teori Konspirasi. Perubahan sosial dapat dilakukan dengan menembaki dan membunuhi mahasiswa. Kelompok Mahasiswa dan cendikiawan pada saat itu dianggap akan melakukan perubahan sosial yang tidak pemerintah kehendaki, karena mereka minta keterbukaan sosial politik dan melakukan interaksi dengan dunia luar sebagaimana efek domino Perestroika dan Glasnot di Rusia yang dihembuskan Gorbachev. Pemerintah China menganggap untuk menghentikan gejala perubahan sosial baru ini hanya dengan cara Menghilangkan kelompok-kelompik itu dengan cara : dimatikan…!!!. Perubahan itu sampai saat ini dapat dirasakan di China…tidak ada demonstrasi mahasiswa atau buruh..walaupun di depan nafas mereka tumbuh industri-industri dari berbagai negara-negara asing…

Menurut Wikipedia, Teori persekongkolan atau teori konspirasi (dalam bahasa Inggris, conspiracy theory) adalah teori-teori yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab tertinggi dari satu atau serangkaian peristiwa (pada umumnya peristiwa politik, sosial, atau sejarah) adalah suatu rahasia, dan seringkali memperdaya, direncanakan diam-diam oleh sekelompok rahasia orang-orang atau organisasi yang sangat berkuasa atau berpengaruh. Banyak teori konspirasi yang mengklaim bahwa peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah telah didominasi oleh para konspirator belakang layar yang memanipulasi kejadian-kejadian politik.

Teori ini ada di seputaran gerak dunia global dan merambah hampir kesemua ranah kehidupan manusia. Dari urusan politik sampai makanan. Bagi orang yang tidak percaya selalu menganggap semua hanya olok-olok, mengada-ada, menyia-nyiakan waktu, kurang kerjaan, dan sebagainya. Bagi para penganutnya teori itu tidak serta-merta muncul mendunia tanpa ada yang menciptakan polanya.

Penganut teori ini pun terbelah dalam dua kubu utama. Kelompok pertama adalah mereka yang hanya percaya bahwa segala hal mungkin terjadi apabila ada dukungan argumentasi yang kuat,

fakta akurat, data ilmiah, pendapat yang bisa diverifikasi kebenarannya, tokoh-tokoh yang nyata, sejarah yang memang ada dan bukan mitos, dan sebagainya. Kelompok ini percaya JFK sebenarnya tidak tertembak, tetapi diselamatkan oleh mahluk UFO, misalnya. Kelompok kedua adalah mereka yang percaya tanpa syarat alias mereka yang menganggap apapun yang terjadi sudah dirancang sedemikian rupa, yang acapkali menghubungkan dengan mitos, legenda, supranatural, dan sebagainya. Misalnya, mereka percaya bahwa peristiwa 11 September sudah dirancang sebagaimana yang terlihat pada lipatan uang kertas 20 dolar AS; di mana apabila kita melipat uang itu sedemikian rupa akan tercipta gambar menara kembar yang terbakar.

DEMONSTRASI ANTI WORLD BANK DAN IMF

Di Batam, pada tanggal 15 s-d 18 September 2006 akan diadakan pertemuan Masyarakat Sipil sedunia Menggugat World Bank dan IMF. Rencananya akan dihadiri Oleh NGO (Non Government Organization) dari 48 Negara. Pertemuan ini yang sekaligus mengadakan aksi protes terhadap World Bank dan IMF yang akan mengelar sidang Tahunan (Annual Meeting) di Singapura pada tanggal 19—20 September 2006.

Menyambut, teman-teman NGO dari seluruh dunia yang akan datang ke Batam. Ada beberapa agenda lokal khas Batam yang kiranya menjadi perhatian semua, khususnya mengenai pemberdayaan masyarakat dan permasalahan sosial ekonomi yaitu :

Pertama, Pembangunan Ekonomi yang dilaksanakan di Kota Batam tidak berbasis budaya dan potensi Lokal. Masyarakat yang menghuni wilayah laut atau daerah pinggiran seharusnya mempunyai matapencaharian sebagai nelayan maupun petani, namun oleh program pemerintah baik itu dalam era sentralisasi maupun era

desentralisasi, secara sistematis telah dipaksa berubah profesi baik sebagai pekerja sektor industri maupun pekerja sektor jasa di perkotaan. Kenapa hal ini terjadi ?, ini karena pemerintah kota Batam tidak mempunyai konsistensi dan keseriusan dalam penanganan pembangunan masyarakatnya. Kita mengetahui, bahwa tidak ada program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Batam yang mempunyai misi menjadikan masyarakat nelayan tradisional menjadi nelayan yang cakap dan handal dengan menggunakan teknologi dan didukung oleh infrastruktur maupun fasilitas-fasilitas lainnya. Saat ini kita masih menyaksikan bahwa potret masyarakat di daerah pinggiran/pedesaan adalah potret masyarakat dengan atribut ketertinggalan, kemiskinan dan masyarakat yang tidak berdaya baik pada akses ekonomi maupun akses sosial.

Kedua, Disepanjang wilayah pedesaan/pinggiran Kota Batam banyak terdapat unit usaha masyarakat baik UKM maupun Koperasi yang biasanya mengusahakan potensi sumberdaya setempat. Secara kuantitas jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun secara kualitas, keberadaan UKM dan Koperasi tersebut sangat

memprihatinkan. Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi oleh pelaku UKM dan Koperasi adalah rendahnya kemampuan manajemen dan terbatasnya akses pemasaran. Suatu ketika, dalam sebuah tinjauan ke lapangan, kami menemukan betapa kacaunya pencatatan transaksi yang dilakukan oleh sebuah unit UKM dibidang perikanan yang cukup berpotensi di sebuah wilayah pinggiran Batam. Transaksi keuangan bukannya dicatat di sebuah buku dengan menggunakan standard akuntansi, tetapi malah di catat didinding rumah, di lengan kursi dan disembarang tempat yang nantinya dipastikan akan sulit dianalisis dan dinilai kelayakannya ketika UKM tersebut akan diberi bantuan modal. Seketika, pemasalahan tersebut kami coba akar permasalahnya, ternyata persolannya adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di wilayah tersebut yang mayoritas hanya menamatkan pendidikan formal SD dan SMP

Ketiga, kurangnya keterkaitan antara Kegiatan Industri Investasi asing dengan ekonomi rakyat. Hal ini ditandai dengan begitu kecilnya direct spending budget Industri investasi asing terhadap produk-produk UKM. Kita tidak usah bermuluk-muluk bahwa industri investasi asing akan memakai bahan baku lokal yang di tawarkan sektor UKM,

karena mungkin saja sektor UKM tidak mampu menyediakannya. Tetapi kita berharap bahwa sektor pendukung (supporting) untuk kegiatan industri investasi asing dapat dipasok oleh sektor UKM yang nota bene merupakan kegiatan yang digeluti oleh mayoritas rakyat. Namun lagi-lagi tidak terdapat hubungan signifikan, karena kebanyakan industri investasi asing memenuhi kebutuhan akan bahan pendukung industri nya (supporting) dari negara asal masing-masing investor atau dari negara tertentu. Jenis barang/jasa pendukung ini dapat berbentuk kertas, valet, pembungkus, pengikat, karton, tukang kebun, tukang servis, montir dan lain-lain. Hal ketidakterkaitan ini menjadi question mark juga menjelang diterapkannya Special economic Zone (SEZ) di Propinsi Kepulauan Riau. Kita khawatir, karena sifat alamiah dari apapun namanya, baik itu globalisasi, perdagangan bebas maupun **ekonomi** tanpa batas, biasanya selalu memperdaya yang lemah.

Keempat, Terjadinya proses kegiatan ekonomi rente dalam perdagangan. Kegiatan perdagangan yang semakin maju mendorong sektor lainnya seperti property dan perbankan berkembang. Hal ini ditandai dengan menjamurnya rumah toko (ruko), rumah kantor

(rukan), mall, dan bangunan–bangunan lainnya yang tersebar hampir diseluruh Kota Batam. Dari aspek kepemilikan property ini mayoritas dikuasai oleh pemodal besar dan terkadang dikuasai fihak asing dengan kedok pemiliknya masyarakat lokal. Lantas bagaimana proses ekonomi rente itu terjadi ?, pedagang-pedagang kecil yang biasanya menjual makanan, minuman, bengkel, potocopy dan sektor UKM lainnya mau tak mau harus menyewa tempat pada pemilik property dengan harga mahal. Sipemilik property ini dalam membayar property yang dimilikinya dibiayai oleh pedagang-pedagang kecil tadi. Kalau begini modelnya, kapan saatnya sektor UKM bisa tumbuh ?. Mari kita lihat di bangkok, misalnya. Pemerintah setempat menyediakan lokasi yang strategis di tengah kota bangkok untuk sektor UKM bagi rakyatnya dengan berbagai subsidi dan kemudahan kepemilikan bagi sektor UKM

Kelima, Kualitas Hidup yang semakin menurun. Kualitas hidup bukan hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan atau lengkapnya fasilitas perkotaan yang lengkap. Faktor yang lebih penting adalah keamanan dan kenyamanan, lingkungan alam dan tentunya pemerataan. Apa gunanya kita tinggal di komplek mewah tetapi disampingnya rumah

kumuh bertebaran yang setiap saat menghembuskan aura kriminilitas , atau apa gunanya kita mempunyai pendapatan besar tapi kita sulit bernapas akibat udara segar menghilang karena hutan-hutan digunduli hanya untuk membangun ruko atau perumahan-perumahan hanya karena hutan itu letaknya strategis ? atau yang lebih tragis lagi, tak ada gunanya apa-apa, karena setiap saat bencana alam akan datang karena lingkungan kita telah dirusak, eksplorasi pasir, hutan bakau yang musnah, terumbu karang yang dilindas dan rasa aman yang telah hilang akibat tingkat kriminalitas yang semakin tinggi akibat terjadi kesenjangan antara yang miskin dan kaya.

DEMOKRASI DAN PEMIMPIN UTOPIS

Bahwa demokrasi adalah satu-satunya cara untuk menegakkan kedaulatan di tangan rakyat. Demokrasi adalah instrumen untuk men-*design* kesamaan hak dan kewajiban, demokrasi juga ditujukan untuk kepentingan bersama *(equal oportunity).* Adanya kebebasan berpendapat dan menerima kritik adalah ciri demokrasi yang hakiki. Demokrasi juga bukanlah kebebasan tanpa batas dan memaksakan kehendak kepada orang lain. Walaupun suatu pendapat dinilai benar-benar *absolute*, tetap saja pihak yang memahami kebenaran pendapat itu tidak bisa memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Demokrasi mampu memelihara keberagaman pendapat secara arif seperti warna-warni batu hias dalam taman kolam, meski sebenarnya yang terjadi adalah seperti memendam api dalam sekam agar tak berkobar.

Demokrasi juga sejatinya tidak dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan politik dengan cara memobilisasi kekuatan modal yang kemudian disebut sebagai demokrasi transaksional. Proses demokrasi semacam itu akan melahirkan oportunis dan tentu saja pemimpin yang culas. Tujuan-tujuan demokrasi untuk melahirkan pemimpin ideal yang *capable*, *smart* dan memiliki kemapaman personal kerap digagalkan oleh model demokrasi transaksional seperti ini.

Di Indonesia yang kemudian diperkecil dalam lingkup Kepulauan Riau, fenomena demokrasi transaksional yang menggunakan pola-pola artifisialisasi (kepura-puraan dalam pencitraan diri) sudah menjadi pemandangan umum. Hal ini makin dikacaukan dengan model kepemimpinan yang paternalistik, nepotisme dan elitis. Tampuk kekuasaan dalam suatu lembaga baik di pemerintahan, institusi swasta, partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya sampai kepada kelompok kecil dalam masyarakat, kerap mengadopsi sistem rekrutmen kedekatan kerabat serta *like and dislike.*

Indonesia secara ideal formal tetap setia kepada Demokrasi Pancasila yang telah dirumuskan oleh para guru bangsa setelah model demokrasi lainnya seperti Demokrasi Terpimpin, Demokrasi Parlementer, dan Demokrasi Liberal tidak menemukan padanannya dalam nilai-nilai luhur bangsa. Namun dalam tataran praktis pakem ideal Demokrasi Pancasila hanya terdengar nyaring di ruang-ruang kelas Sekolah Dasar (SD), karena pelaku demokrasi sebenarnya sudah terkontaminasi dengan pragmatisme dan aji mumpung.

Sejarah demokrasi berasal dari sistem yang berlaku di negara-negara kota *(city state)* Yunani Kuno pada abad ke 6 sampai dengan ke 3 sebelum masehi. Waktu itu demokrasi yang dilaksanakan adalah demokrasi langsung yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan politik dan dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negaranya yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Hal tersebut dimungkinkan karena negara kota mempunyai wilayah yang relatif sempit dan jumlah penduduk tidak banyak (kurang lebih 300 ribu jiwa).

Demokrasi ketika itu terbentuk menjadi suatu sistem pemerintahan sebagai respon kepada masyarakat umum di Athena yang ingin menyuarakan pendapat mereka. Dengan adanya sistem demokrasi, kekuasaan absolut satu pihak melalui tirani, kediktatoran dan pemerintahan otoriter lainnya dapat dihindari. Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis. Landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Masalah keadilan menjadi penting, dalam arti setiap orang mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi hak tersebut harus dihormati dan diberikan peluang serta pertolongan untuk mencapai hal tersebut.

Tatanan pemerintahan demokrasi yang ideal antara lain adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum, kebebasan pers, adanya sistem pemungutan suara dalam suksesi kepemimpinan serta adanya pengakuan terhadap perbedaan SARA.

Namun dalam kenyataannya, demokrasi yang bertujuan melahirkan masyarakat sosialis tersebut digempur oleh kekuatan kapitalisme (aliran dana) untuk memuluskan tujuan-tujuan para pemilik modal. Sehingga proses demokrasi dalam apapun bentuknya diarahkan kepada tujuan kekuasan dan pencapaian tertentu yang dikendalikan melalui lobi-lobi uang. Dalam setiap suksesi baik skala

kecil maupun besar, fenomena seperti ini telah menguburkan pemimpin yang sebenarnya.

Dan yang keluar sebagai pemenang adalah mereka yang mengenggam kekuatan uang. Jika dari awal saja sudah culas, maka pemimpin seperti ini sangat susah diharapkan untuk bersikap idealis. Maka patutlah kita banyak menemukan seorang pemimpin yang tak punya hati, tanpa catatan prestasi dan cenderung main aman *(safety player).* Juga banyak ditemukan pemimpin yang tidak menjalankan fungsinya sebagaimana yang digariskan tokoh leaderhip dunia, John C Maxwell yakni pemimpin yang mampu memberdayakan *(empowerment)* para bawahan, bahwa sejatinya keberhasilan seorang pemimpin diukur dari keberhasilan orang-orang yang dipimpinnya.

Banyak pemimpin yang menganggap tampuk kepemimpinan adalah suatu batu loncatan untuk mengenggam kekuasaan dan demokrasi dijadikan sebagai alat manipulatif. Jika demikian adanya maka susah diharapkan akan terjadi perubahan besar selama kepemimpinannya. Pemimpin seperti ini tidak tercatat sebagai orang-orang yang memiliki *track record* yang membanggakan bahkan kerap menimbulkan gesekan akibat mosi tidak percaya. Masa kepemimpinannya akan dihabiskan untuk melayani keinginan para sponsor atau mencicil hutang politik dan menutup gejolak dengan uang. Karena mereka tidak muncul dari proses demokrasi yang sesungguhnya*,* maka pemimpin seperti ini bukanlah orang yang cerdas dalam mengelola persoalan bangsa atau organisasi. Yang banyak dilakukan adalah model pencitraan yang dikendalikan oleh opini publik.

Dari pengamatan (dan dipublikasikan sebagai pendapat pribadi dari penulis), khususnya di Batam, secara acak diperoleh berbagai model atau tipe kepemimpinan mulai dari pemerintah daerah, organisasi partai politik, paguyuban, organisasi profesi dan organisasi sosial kemasyaratan lainnya.

Pertama, pemimpin paternalistik, yakni pemimpin yang memposisikan dirinya sebagai "Bapak" di mana bawahan dan seluruh anggota institusinya adalah "anak-anak". Pemimpin semacam ini cenderung membentuk kultus individu, membangun kharisma, membuat simbol-simbol kekuasaan tunggal dan mengaburkan pendapat umum. Adapula yang menutupi ketidakmampuannya dengan pencitraan diri yang berlebih-lebihan melalui media massa, papan reklame dan seremonial tanpa konteks atau relevansi.

Kedua, Pemimpin Birokratis, yakni pemimpin yang selalu menyerahkan kebijakannya kepada prosedur baku yang bertele-tele untuk menutupi kelemahannya dalam menyelesaikan persoalan atau mengendalikan kendala teknis. Pemimpin semacam ini adalah pemimpin yang kaku dan cenderung kurang cerdas atau mungkin cerdas tapi kurang berani mengambil resiko. Pemimpin semacam ini cenderung menimpakan kesalahan kepada anak buah jika dihadapkan pada pelbagai problema.

Ketiga, Pemimpin Nepotisme, adalah pemimpin yang mengedepankan kedekatan kekerabatan, primordial dan mengutamakan pola perkoncoan. Pemimpin semacam ini menapikan regenerasi dan rekruitmen dari kapasitas individu. Misalnya seorang tokoh sentral di partai politik yang mendudukkan adik, anak, istri, ipar dan menantu sebagai pengurus partai, meski di sekelilingnya banyak

tokoh dan talent-talent potensial yang layak menduduki jabatan tersebut.

Keempat, Pemimpin Kapitalis, adalah pemimpin yang bermodal besar atau memiliki kemampuan untuk menggandeng sponsor guna mencapai tujuan-tujuan politiknya. Pemimpin seperti ini akan menggunakan jalan pintas *(short cut)* mulai dari proses pemilihan maupun pasca pemilihan. Pemimpin Kapitalis adalah orang-orang yang cenderung termakan oleh mitos-mitos liberalisme dan kurang memperhatikan eksistensi ekonomi mikro.

Mereka merasa bangga jika mampu menggandeng investor masuk tapi hampir tidak pernah mempromosikan pengusaha lokal agar produknya dapat menemukan pasar di luar negeri. Pemimpin semacam ini memiliki kebijakan investasi yang cenderung mudah dilakukan siapa saja, yakni memboyong investor dengan segala kemudahan yang ditawarkan, tapi tidak pernah melakukan hal sebaliknya yakni menjual potensi produk lokal agar bisa bersaing di pasar global.

Pemimpin kapitalis bahkan cenderung lebih permisif terhadap korupsi misalnya menyediakan selusin pengacara untuk membela bawahannya yang terdakwa kasus korupsi. Pemimpin kapitalis adalah jenis pemimpin yang paling berbahaya dari pola kepempinan yang ada. Dampak dari model kepemimpinan semacam ini berskala besar dan masif sehingga kita harus memikirkan cara-cara agar pemimpin kapitalis segera dihentikan.

Kelima, Pemimpin Relegius. Ini adalah model kepemimpinan paling ideal sekaligus solusi untuk mengakhiri kegagalan pola kepemimpinan yang lain untuk memenuhi aspirasi publik,

sebagaimana yang telah dirumuskan oleh intelektual Muslim yakni Amien Rais dan Nurcholis Madjid. Mereka adalah dua tokoh sentral yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan pemikiran bagi terciptanya demokrasi relegius. Yakni demokrasi yang dijalankan melalui pendekatan agama yang bebas dari kecacatan moral sehingga melahirkan pemimpin relegius yang benar-benar layak dan terhindar dari kontaminasi yang telah merusak azas demokrasi dan moral pemimpin itu sendiri.

Terakhir, Pemimpin Egaliter. Ini adalah tipe pemimpin berwajah rakyat dan utopis. Ia adalah wajah Indonesia yang tidak dibuat-buat. Pemimpin jenis ini ingin membuktikan bahwa pemimpin harus dekat dengan rakyat dan berwajah rakyat. Pemimpin yang egaliter hampir tidak membuat jarak dengan jelata. Ia adalah kontra dari model kepemimpinan gaya feodal atau priyayi yang bernafsu untuk berkuasa dan minta dilayani. Pemimpin jenis ini diyakini mampu menerjemahkan kehendak-kehendak rakyat di tingkat akar rumput. Tinggal bagaimana sosok pemimpin yang egaliter ini dielaborasi dengan model Pemimpin Religius. Semoga.! ***(MNT)

FENOMENA POLLUX HABIBIE DAN WAJAH KOTA BATAM

Satu dasawarsa silam, nafas Prof DR Ing Burhanuddin Yusuf Habibie M. Eng sesak. Dadanya terimpit godam, matanya membulat lebih besar dari biasanya. Dari kacamata visionernya, Batam jauh melenceng menjadi entitas aglomerasi yang carut marut, Batam yang tidak estetis, tong sampah raksasa dan kampung besar yang sedang berpura - pura menjadi megapolitan. Batam laksana emas polesan yang turun derajat jadi loyang kusam.

"Batam jadi kota ruko!," keluh Sang "Mr Crack" begitu ia berkunjung lagi ke kota ini. Tidak sebagai Ketua Otorita, tapi lebih dari itu. Ia mantan Presiden Indonesia yang terluka. Sejauh ia memandang, sejauh itu pula mata bulatnya menumbuk hamparan ruko berbaris memagari bahu jalan apa saja. Beberapa tahun sebelumnya, ketika menjabat sebagai Ketua Otorita Batam (OB), ia sudah selesai mendesain *masterplan* Batam menjadi kota modern untuk memikat dunia.

Menjadi pusat aglomerasi industrialisasi yang tidak sembarangan orang bisa masuk. Habibie mencanangkan Batam sebagai *Captive Market* dan etalase ekonomi Indonesia yang paling mewah dari semua kota di Indonesia. Lalu kemudian ia seperti dikhianati oleh lembaga otoritas yang pernah ia pimpin dan visinya dilecehkan oleh sekelompok pengembang. Tanah emas Batam yang secuil itu telah dijual murah untuk mendirikan bangunan yang ala kadarnya.

Dalam sebuah bincang khusus dengan mendiang JE Habibie, adik kandung Habibie sempena penulisan buku 36 Tahun Otorita Batam, Fanny Habibie yang sempat menjabat Ketua OB selama enam bulan (Maret - Juli 1998) itu secara off the record mengaku pernah berpesan kepada salah seorang pejabat OB, "Jika main – main dengan masterplan Batam, jual – jual tanah sembarangan, *i'll crack your neck!"*.

Namun gertakan mendiang tak membuat ciut oknum OB, tanah Batam sudah pun kritis hingga membabat zona hijau. Belum lagi Teori Balon Habibie yang juga gagal gara – gara gugus Rempang Galang yang tak kunjung dibangun untuk menampung limpahan ekonomi agar *mainland* Batam tidak penuh. Padahal ia telah menancapkan *masterpiece* pertamanya di kota ini dalam wujud enam jembatan megah.

Untuk ukuran Habibie yang sangat perfeksionis sekaligus teknokrat kapitalis sejati, Batam mengalami disorientasi. Tapi tidak saat ini. Mengobati sakit hatinya, Habibie kembali lagi ke Batam untuk seolah-olah ingin menunjukkan kepada khalayak: Batam seharusnya semewah ini. Habibie tidak sendiri, ia menggandeng putera mahkotanya, Dr Ing Ilham Akbar Habibie, MBA. *Like father like son,* keduanya menggarap sebuah mahakarya bernama Meisterstadt. Proyek ini muncul hampir bersamaan dengan proyek bangunan vertikal serupa yang mulai bertumbuh di Batam belakangan ini.

Meisterstadt berasal dari bahasa Jerman, meister berarti master dan stadt bermakna kota. "Artinya, kota dengan standar tertinggi," kata Ilham Habibie selaku Komisioner Pollux Habibie International

pada acara *Signing Ceremony* proyek ini. Meisterstadt adalah kota dengan standar internasional dan terintegrasi. Merupakan sebuah kawasan kota mandiri yang dibangun dengan konsep one stop living. Habibie menggandeng Pollux Properties Singapura.

Pollux adalah sebuah label yang cukup mencengangkan dalam dunia properti Asia. Bersama Pollux, Meisterstadt Habibie akan mencakar langit Batam lebih dari ekspekstasi semua orang. Pollux adalah nama bintang raksasa berwarna jingga yang berjarak 34 tahun cahaya dari bumi. Bintang ini berada pada rasi Gemini, memiliki radius lebih besar delapan kali dari Matahari atau sekitar 5,564,000 kilometer. Tingkat kecemerlangan (luminosity) – nya sebesar 32 kali yang artinya bintang ini 32 kali lebih terang daripada matahari. Matahari adalah ruko – ruko itu.

****

Di sudut lain, di kawasan slum, orang – orang pinggiran lintang pukang mendirikan gubuk di atas tanah terlarang. Mereka adalah pendatang yang tidak beruntung. Eksistensi mereka diperdebatkan antara sisi humanis dan pelanggaran hukum. Lama – lama mereka mendapat ganti rugi, lalu pindah lagi ke kawasan terlarang, kemudian kembali merayakan uang ganti rugi (disebut juga uang paku), begitu seterusnya. Yang tobat, pindah ke Kavling Siap Bangun (KSB) sebagaimana seharusnya.

Keturunan dari generasi yang sudah lama menetap di Batam bertahan di Kampung Tua yang sakral. Kampung Tua memiliki sempadan yang imajiner dengan lahan milik pemegang otoritas. Sehingga beberapa kelompok pendatang baru, ikut berlindung di

Kampung Tua kemudian tanpa usul periksa mendapat labelisasi: Melayu atau Tempatan. Ada anekdot lucu soal tanah ulayat.

Hanya bermodalkan sebuah ketapel dan empat buah biji nangka, seseorang sudah mendapat de facto atas tanah. Beberapa tahun kemudian di hadapan investor ia tinggal membusungkan dada seraya bersabda: “tanah beta batasnya dari pokok nangka sini ke pokok nangka ujung sana”. Sekuat mana ia bisa mengokang ketapel sejauh itu pula ganti rugi yang akan ia klaim.

Fenomena Batam secara utuh seragam dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia sebagai tempat bercokolnya para kapitalis, keterdesakan ekonomi akibat tingginya urbanisasi, pertumbuhan kawasan kumuh (slum) serta kekacauan tata ruang dan ketidaksinambungan ekologi kota. Globalisasi yang diterapkan di Batam dalam empat dasawarsa terakhir menjadi dalih untuk tidak memberi akses lebih banyak kepada kepentingan publik.

Implikasinya terhadap spasial pembangunan kota adalah tata ruang yang sangat memihak kekuatan dominan dalam hal ini pemilik modal. Kota Batam hari ini telah menjadi pusat aglomerasi milik segelintir orang. Menjamurnya konsep perumahan regency atau cluster system adalah sedikit upaya untuk menghindari tetek bengek kaum marjinal sekaligus membersihkan aroma kampung dari orang-orang tempatan yang telah menyumbangkan tanah moyangnya untuk itu.

Ketidakadilan alokasi sumber daya yang penting bagi rakyat telah menimbulkan kontradiksi di Kota Batam. Pergeseran makna dari public goods menjadi private goods sebagai akibat dari keniscayaan

laju sejarah neoliberalisme menjadi pendorong kontradiksi di tengah masyarakat. Salah satunya yang paling kentara adalah penggusuran rumah liar dan kampung-kampung kumuh oleh lembaga otoritas dengan perangkat aparatus-aparatusnya untuk dipersembahkan kepada pemilik modal dengan mengatasnamakan pembangunan dan estetika.

Sesungguhnya dalam cita-cita filosofisnya, kota dibangun untuk menyejahterakan masyarakat seluruh lapisan serta tempat bernaung dan berhimpun penduduknya secara humanis dalam prinsip kesetaraan *(equal opportunity).* Sejak awal seharusnya orang-orang Batam sebagai penyumbang sejarah perlu wanti-wanti ketika rumus-rumus pembangunan dan kerumitan grafik ekonometri yang dibanggakan itu ternyata tidak mampu membuka kebuntuan akses bahkan justru menghambat masyarakat untuk menikmati kotanya sendiri. Logika *trickle down effect* sangat berperan dalam sistem pengalokasian lahan di Batam.

Ratusan ribu hektar tanah telah diserahkan kepada pengembang hanya dengan membayar Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) dan sedikit bisik - bisik dengan orang dalam. Selanjutnya pengembang akan memiliki kuasa penuh atas tanah murah tersebut untuk kemudian menjualnya dengan untung berlipat – lipat kepada masyarakat.

Padahal jika sistem lembaga pemilik otoritas tanah ini tidak dirasuki cacat logika kapitalisme, lahan – lahan untuk perumahan bisa diserahkan langsung kepada masyarakat luas melalui standar dan regulasi tertentu. Bukankah nenek moyang kita pernah hidup di zaman megalitikum yang sama. Tradisi megalitik yang kita warisi

telah meniscayakan semua orang punya kemampuan dan citarasa yang sama akan sebuah peradaban rancang bangun. Tapi citarasa estetika kota ini telah dipercayakan seutuhnya kepada kapitalis pengembang dan saksikanlah hasilnya. Di atas langit masih ada langit. Di atas barisan pendiri ruko masih ada Habibie. ***

FOBIA PALU ARIT DALAM KONTEKS KEKINIAN

Partai Komunis Indonesia (PKI) mencoreng sejarahnya sendiri dengan mencabut nyawa. PKI tidak hanya telah meneteskan darah dengan membantai saudara sendiri, tapi juga ia tak henti menggelegakkan darah tua seorang Taufik Ismail. Puisi Taufik menusuk inti jantung kemanusiaan: ada partai di dunia ini yang telah membantai 120 juta orang, selama 74 tahun di 75 negara. Artinya 4.500 orang meregang nyawa tiap hari selama 74 tahun di 75 negara. Seseram itukah?

Sebelum peristiwa Gerakan 30 September (G30S), Taufik Ismail memang terkenal benci dengan PKI. Ia menggagas Manifesto Kebudayaan untuk menandingi seniman Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) dari sayap kiri Indonesia yang diinisiasi DN Aidit, Nyoto dan kawan – kawan. Ismail adalah saksi sejarah yang masih bernafas hingga sekarang. Paling tidak dibutuhkan seorang tua berumur minimal 70 tahun untuk dianggap dewasa dan memiliki kemerdekaan berpikir ketika peristiwa naas G30S terjadi pada 50 tahun yang lalu. Itupun jika ia intelek dan tidak berpihak.

Sebagian kita sedang di alam arwah ketika insiden itu terjadi dan sisanya adalah kanak – kanak. Apa yang paling memungkinkan kita mengenal PKI adalah cerita dari bangku sekolah dan narasi tunggal sejarah yang disediakan pemerintah selama 50 tahun terakhir.

Hampir semua orang bergidik mendengar kata PKI dan dalam perspektif kanonik, kita langsung merasakan aura hitam dan bau darah dari orang – orang yang memakai kaos palu arit.

Jika kita begitu membenci yang kiri, berarti kita mungkin memihak ke yang kanan. Apa yang kanan itu, tiada lain kapitalisme. Kapitalisme adalah pemenang sejarah perebutan kekuasaan di dunia, sedang Sosialisme – Komunisme – Marxime – Maoisme - Leninisme adalah pecundang yang diletakkan sejarah pada tikungan tajam, tercampak dari keelokan peradaban dan beraroma amis darah.

Sayap kanan kapitalisme telah masuk ke seluruh lekuk kehidupan kita, dan hampir tak mungkin ada ruang kosong tersedia untuk komunisme. Ia adalah malaikat rupawan yang memberi pekerjaan pada hari kelaparan. Ia adalah pembonceng paling agung atas kesaktian Pancasila, untuk mengeruk semua gula – gula tanah tumpah darah kita, Indonesia Raya.

Reaksi dan ketakutan yang berlebihan kepada prediksi munculnya Neo PKI hampir menjadi *absurd.* Kapitalisme itu adalah gigantis, ia terlalu raksasa untuk bayi kurang gizi dari reinkarnasi komunisme. Peristiwa Kaos PKI lebih menyerupai *gimmick* atau tipuan kecil untuk pengalihan isu besar.

Dan kita selalu ambigu, tak punya hati yang kukuh. Gagal untuk bisa melihat persoalan secara utuh, reaktif berlebihan dan menjadi pemaki paling depan di dinding sosial media. Benci mati pada PKI tapi terkagum – kagum pada tokoh intelektualnya, Tan Malaka. Tak ingin melihat wajah "buruk" komunisme tapi tenggelam penuh syahdu pada keindahan prosa Pramoedya Ananta Toer.

Jika dalam setandan pisang ada yang busuk, apakah pisang itu buruk? Tan Malaka yang punya cita – cita luhur akan negeri ini dan pencipta "Republik Indonesia" bahkan tak pernah sekalipun merasakan manisnya Indonesia. Ia hidup dalam kesukaran sepanjang hayat, berdiam di kontrakan separuh kandang kambing, diburu dari segala penjuru dan mati ditembak bangsanya sendiri.

Pram yang selalu setia membela jelata dan meraih Nobel dengan prosanya yang serupa kekuatan magis, separuh hidupnya habis dalam penjara Digul. Perhatikan golongan mana yang berkipas – kipas dan telah mereguk sampai habis kekayaan dan memikulkan hutang di bahu cucu kita sejumlah ribuan triliun.

Baik Tan maupun Pram adalah pembenci kekerasan. Jika demikian yang merusak nama PKI adalah oknum yang terinspirasi cara – cara radikal Mao Tse Tung atau Josef Stalin. Mereka menggerakkan rakyat lapar yang hilang akal karena periuk nasi mereka kosong, untuk memberontak dan membantai. Bahwa telah terjadi pembantaian balasan secara pukul rata atas PKI usai Peristiwa 65, mestinya menjadi perenungan kita sepanjang masa.

Perhatikan sejarah gerak gerik rezim kita. Setiap rezim bertumpu pada satu cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Rezim Sukarno tidak memberi tempat lebih lapang kepada pemikiran – pemikiran Islami Mohammad Natsir. Perdana Menteri religius ini mengkritik sikap Sukarno yang terkagum - kagum pada sekularisme Mustafa Kemal Attaturk. Mohammad Natsir, Perdana Menteri yang tak pernah pakai baju bagus itu kemudian menyingkir dari *inner circle* Sukarno. Ia meneruskan hidup dalam penjara, sebagaimana juga Buya Hamka.

Demikian pula Muhammad Hatta, konsep ekonomi kerakyatannya disindir Sukarno dengan persepsi macam – macam. Meski Wakil Presiden bahkan ia tak pernah kesampaian hanya untuk membeli sepatu Bally. Saking jujurnya, saking merakyatnya. Tapi ia tersingkir.

Di akhir – akhir masa jabatannya, oleh Blok Barat, Sukarno tercium telah berat ke kiri (Sosialisme Marhain bukan Komunisme). Misteri penyingkiran Sukarno dari istana kerap dihubungkan dengan G30S PKI. Spekulasi dari analisis para ahli sejarah tidak secara *valid* membongkar misteri tersebut, apakah karena isu Dewan Jenderal sehingga terjadi konflik internal di tubuh militer, permainan asing lewat operasi intelijen CIA atau kudeta PKI lewat uluran tangan Republik Rakyat China (RRC).

Lewat Supersemar yang juga misterius Soeharto membersihkan PKI dan membangun rezimnya sendiri. Apakah kemudian hanya secara kebetulan lewat Soeharto kapitalisme mendapat tempat istimewa di dalam istana?

Tidak menunggu lama, begitu Soeharto jadi presiden, kuku – kuku neoliberalisme – kapitalisme menancap lebih dalam pada sumur – sumur minyak, emas, intan berlian, segala jenis logam, laut, tanah dan hutan. PKI yang telah lumpuh dan rata dengan tanah tanpa pembuktian *valid* dan keilmuan sejarah, mendapat stigma negatif sebagai organisasi paling terlarang di Indonesia. Bahkan propaganda kebangkitan komunisme terus dipertahankan untuk mengunci kebebasan sipil yang mengkritik kebijakannya.

Tulisan ini bukan hendak membela tandan – tandan pisang yang rusak, tapi mengajak kita bersama untuk melihat seluruh percik –

percik persoalan bangsa secara multi dimensional. Lebih berbahaya mana sekarang, reinkarnasi PKI yang loyo atau gigantis kapitalisme asing yang telah menghisap dan membuat kita berhutang?

Tulisan ini juga tidak memiliki kewenangan intelektual untuk menjelaskan korelasi antara kemunculan atribut – atribut PKI dengan hubungan mesra yang dibina Indonesia dengan Tiongkok belakangan ini. Sedangkan Tiongkok sudah banyak melenceng dari ajaran dasar komunisme.

Tapi sebagai anak bangsa kita tentunya sepakat memberangus ajaran komunisme yang gagasan dasarnya adalah anti Tuhan *(Antiregioznik).* Inilah paham yang diusung para biang komunisme antara lain: Ludwig Feuerbach, Hegel, Karl Mark, Lenin, Bukharin, Mao, Stalin, Muso dan Aidit.

Mereka mengatakan bahwa agama adalah candu bagi rakyat yang melenakan dan membuai. Agama adalah kreasi manusia kasta terbawah yang miskin, tertindas dan diperlakukan tidak adil serta putus asa. Karena dasar perjuangan komunisme adalah dialektika materialis, pertentangan kelas dan keutamaan ilmu pengetahuan, maka sebagian tokoh komunis yang membenci agama, membentuk semacam biro atau pasukan khusus untuk membasmi agama dan agamawan.

****

Berpikir secara adil itu memang berat. Apalagi kebenaran hanya mutlak milik Tuhan. Satu dimensi kebenaran yang kita pegang erat hingga ke anak cucu, belum tentu benar menurut dimensi kebenaran

lainnya. Jalan satu – satunya adalah kembali kepada dogma dan nilai – nilai universal.

Dalam *CAPITA SELECTA* Mohammad Natsir disebutkan bahwa Islam melarang umatnya bertaklid buta, menerima sesuatu sebelum diperiksa, walaupun datangnya dari kalangan sebangsa dan seagama atau dari ibu bapa dan nenek moyang sekalipun. *"Dan djanganlah engkau turut apa jang engkau tidak mempunjai pengetahuan atasnja, karena sesungguhnja pendengaran, penglihatan dan hati itu, semuanja akan ditanja tentang itu".* (QS: Bani Israil : 36.)

Kembali kepada Taufik Ismail, ternyata 120 juta orang yang mati itu bukan karena semata – mata dibantai oleh komunis dengan mesin pembunuh, tapi mereka mati sendiri akibat adanya kerja paksa. Kemudian budayawan lagendaris ini mengecam sistem ekonomi komunis yang tidak satupun berhasil kecuali menyebabkan kematian akibat kelaparan dan bergelimpangan di jalan – jalan.

Angka – angka tersebut kemudian dipinjam Ayahnda Taufik Ismail untuk mengecam PKI di Indonesia, namun ia lupa menyebut fakta perlakuan kejam secara bumi hangus juga sudah diderita PKI dan entah siapapun yang telah dihubung – hubungkan dengan mereka. Sekitar 500.000 lebih orang mati menggelepar dalam sekejap.

Kita sepakat untuk membenci komunisme, namun tidak seperti tungau di seberang tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak. Sekali lagi, berpikir adil itu sulit. Tapi Tuhan tidak tidur. ***

SEJARAH BATAM DALAM ENIGMA ORANG-ORANG KOTA

Batam dalam pandangan sebagian orang adalah kampung nelayan tradisional yang tiba-tiba saja menjadi kota besar. Tidak lebih daripada itu. Ada benang merah sejarah yang terputus ketika orang mulai berbondong-bondong ke Batam mencari sumber penghidupan baru di awal 70-an. Batam makin lama makin sesak oleh pendatang. Mereka bercampur baur dan mengikat diri menjadi warga Batam yang baru dengan pandangan lurus ke depan. Tanpa merasa perlu menoleh ke belakang, melihat sejarah.

Sejarah Batam terkubur oleh dinamika industrialisasi yang progresif. Hikayat, aksioma, sastra klasik bahkan mitologi sebagai anasir sejarah Batam yang tak terdokumentasi bersembunyi di kampung-kampung tua pesisir menjadi sebatas cerita dari mulut ke mulut. Sebagian lainnya menjadi enigma orang-orang kota. Sampai kemudian banyak khalayak menganggap: titik nol kilometer Pulau Batam bermula ketika keran industrialisasi modern dibuka, untuk tidak mengatakan sebelum itu Batam tidak pernah ada.

Nama Batam hampir tidak disebut-sebut dalam literatur sejarah nasional. Barangkali akibat terlambatnya ahli-ahli sejarah Tanah Air membicarakan tentang era Kesultanan Riau Lingga Johor karena sempat 'dicurigai' sebagai keluarga besar Semenanjung Malaysia. Ini agaknya yang menjadi musabab mengapa patriot-patriot Melayu

Kepulauan Riau sangat belakangan diangkat menjadi Pahlawan Nasional.

Tentang Batam masa lalu kurang dianggap penting sampai kita semua mulai sibuk mencari referensi ilmiah dan abstraksi empiris untuk menentukan Hari Jadi Pulau Batam. Sebuah manuskrip yang lama tersimpan bercerita tentang Pengukuhan Raja Isa sebagai pemegang mandat atas Nongsa dan rantau sekitarnya oleh Sultan Riau Lingga dan Yang Dipertuan Muda Riau (YDMR) pada tarikh 22 Jumadil Akhir 1245 Hijriah bertepatan 18 Desember 1829 Miladiah. Daulat Raja Isa terhadap Nongsa lebih dari seabad sebelum Indonesia mardeka menjadi pijakan historis yang kukuh lahirnya Pulau Batam.

Penentuan momen ini bukan kerja main-main dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Raja Isa-lah yang pertama sekali menyusun pola pemerintahan dan perencanaan pembangunan yang sistemik di Pulau Batam. Dari jurnal *De Battam Archipel* yang dibuat seorang *ambtenaar* pemerintah kolonial Belanda bernama J.G. Schot pada 1882 misalnya diuraikan, lebih dari lima dasawarsa sejak Raja Isa memerintah (wafat 1831), sebuah perencanaan matang untuk membuat jaringan jalan yang menjadi penghubung kampung-kampung di Batam sudah selesai dikerjakan.

Di antaranya adalah jalan yang membentang antara Sei Lekop, Batoe Hadji (Batuaji), Tiban, Keranji dan Telok Senimba. Begitu pula jalan dari Tiban ke Sungai Panas dan Kampung Belian. Selain itu jalan dari Senggoenoeng ke arah Telok Tering serta Asiamkang. Bahkan bentangan jaringan jalan tanah dari Sungai Panas ke arah Kangboi melewati bagian Selatan Bukit Ladi arah Batoe Hadji yang

diikuti jaringan jalan dari Duriangkang ke arah Tiban dibuat tanpa terputus.

Batam ketika itu juga sudah dimekarkan menjadi tiga bagian, selain Nongsa yang otonom ada dua *wakilscap* yakni Pulau Buluh, Belakang Padang dan sekitarnya serta *Wakilscap* Sulit, terdiri dari pulau-pulau kecil meliputi Kepala Jeri, Kasu, Sugi, Moro, Sanglar dan lain – lain yang langsung di bawah kendali YDMR Raja Muhammad Yusuf di Penyengat.

Secara kronologis alur bentang sejarah Batam adalah sebagai berikut:

Fase Pra Kemerdekaan

- Embrio Batam – Zaman Pra Sejarah

Belum ditemukan bukti-bukti empiris tentang adanya manusia pra sejarah yang mendiami Pulau Batam. Namun wilayah ini amat berhampiran dengan Selat Malaka yang menjadi bagian penting dari bentangan Nusantara. Kira-kira 1,7 tahun yang lalu Nusantara mulai memasuki garis waktu pra sejarah yang tercatat sebagai literasi arkheolog.

- Imperium Melayu Klasik dan Masuknya Islam

Secara kronologis wilayah Batam tercakup dalam peradaban Kerajaan Sriwijaya (Abad VI sampai XIX), Temasik atau Singapura Tua (Abad XIII hingga XIV) dan Kesultanan Melaka (Abad XV sampai XVI). Dalam pola tradisi maritim dan nilai geografis, ketamadunan Melayu Nusantara didapati berputar di bagian Selat Melaka dan

rantau sekitarnya. Di sini pulalah punca masuknya peradaban Islam di tanah Melayu karena berada dalam jalur perdagangan internasional.

- Batam dalam Hegemoni Kolonial

- Ketemenggungan Bulang

Kedudukan Temenggung di Bulang bermula sejak 1722 hingga 1819. Tokoh sentral pada fase ini bernama Temenggung Abdul Jamal putera Tun Abbas seorang Dato' Bendahara dari Johor.

- Sekelumit Peta Pelayaran VOC 1675 dan Traktat London

Dalam lembaran sejarah nasional, nama Batam tidak banyak disebut. Namun ahli sejarah lokal meyakini, manuskrip dan berkas-berkas bernilai sejarah yang menyebut tentang Batam baik yang ditulis oleh pujangga Melayu seperti Raja Ali Haji dan penulis asing dari Belanda banyak tersimpan di Perpustakaan Leiden bahkan juga ada yang diperjualbelikan di bawah tangan. Nama Batam paling tidak pernah tertulis dalam Peta Pelayaran Kapal Dagang VOC pada tahun 1675 selain juga termaktub dalam dokumen Traktat London pada tahun 1824.

- Mandat kepada Raja Isa di bawah YDMR

Sebuah Surat Mandat yang menjadi daulat kepada Raja Isa untuk memerintah Nongsa dan rantau berhampiran menjadi titik penting bermulanya sistem pemerintahan di Batam. Momen ini kemudian diabadikan sebagai Hari Jadi Kota Batam.

- Tapak – tapak pembangunan Batam dari Laporan G.J. Schot

Dari jurnal *De Battam Archipel* yang dibuat seorang *ambtenaar* pemerintah kolonial Belanda bernama J.G. Schot pada 1882 ditulis secara rinci adanya jaringan jalan setapak yang menghubungkan kampung-kampung tua di Batam. Disebutkan bahwa jaringan jalan tersebut direncanakan pada masa kepemimpinan Raja Isa.

- Lahirnya Kampung – kampung Tua

Secara alami sejak bermulanya sistem pemerintahan tradisional pra kemerdekaan, di Batam mulai muncul kampung-kampung pesisir yang pernah dibuka oleh para kerabat di Raja Kesultanan Riau Lingga hingga rakyat jelata. Beberapa nama kampung tua tersebut sebagian besar masih digunakan hingga sekarang dan eksistensinya tetap dipertahankan.

- Manusia Batam dan Fenomena Suku Primitif

Batam tercatat sebagai bagian dari imperium Kesultanan Riau Lingga yang penduduknya disebut sebagai orang Melayu. Adanya asimilasi Melayu – Bugis dan kemudian membaur bersama suku-suku lainnya secara alami sudah terjadi di masa-masa awal. Selain itu arkheolog dan sejumlah saksi sejarah menemukan dan mencatat fenomena suku-suku primitif yang pernah mendiami tanah Batam di antaranya Suku Pedalaman Hutan, Sakai, Mantang, Jakun dan

Benan. Sementara di wilayah perairan terdapat Suku Laut yang masih eksis hingga saat ini.

- Industrialisasi Klasik dan Perkembangan Singapura

Sebelum industrialisasi modern dibuka, Batam yang strategis juga pernah dijadikan basis industrialisasi klasik untuk memasok kebutuhan bagi Singapura dan sekitar Kepulauan Riau. Beberapa di antaranya adalah pabrik pembakaran arang, pengolahan sagu gambir serta yang paling fenomenal adalah pabrik bata dengan merk "BATAM" yang dikelola oleh Raja Ali Kelana.

- District van Batam di Pulau Buluh

Setelah Kedaulatan Nongsa, di Pulau Buluh terdapat sistem pemerintahan baru yang dipimpin oleh seorang Amir. Oleh Belanda wilayah ini disebut sebagai District van Batam yang kemudian berlanjut menjadi ibukota kecamatan pasca kemerdekaan.

- Patriotisme Pahlawan Melayu – Bugis

Bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari sejarah Pulau Batam adalah munculnya patriot-patriot Melayu dan keturunan Bugis di masa kolonialisasi Eropa. Tercatat beberapa nama seperti Laksmana Hang Nadim, Raja Haji Fisabilillah dan Sultan Mahmod Riayat Syah.

- Kisah Dramatis di Zaman Penjajahan Jepang

Masa pendudukan Jepang menjadi catatan hitam dalam sejarah Indonesia Raya. Dalam waktu relatif singkat Jepang telah membuat porak poranda tak terkecuali di Batam. Kisah-kisah dramatis ini terekam dalam sejarah Pulau Batam.

Fase Pasca Kemerdekaan

- Batam dalam Masa-masa Sulit

Situasi ekonomi dan politik nasional pasca kemerdekaan ikut berimbas ke Batam. Batam memasuki masa-masa sulit karena intimidasi bersenjata dari pasukan sekutu yang dikenal sebagai zaman agresi. Pasokan kebutuhan pangan menipis dan kemiskinan merajalela.

- Terbukanya Hubungan Dagang Tradisional dengan Singapura

Nilai strategis dan psikografis Pulau Batam mengikat hubungan dagang klasik dengan Semenanjung Malaya khususnya Singapura. Di masa ini marak digunakan mata uang Dollar Singapura dan perdagangan lintas batas antara Batam dan Singapura menjadi simbiosa mutualis.

- Cerita Dramatis Masa-masa Konfrontasi

Presiden Soekarno mengobarkan semangat Ganyang Malaysia. Masa ini dikenal dengan era konfrontasi. Batam yang berbatasan langsung dengan Malaysia dijadikan basis strategi militer tentara KKO

(Korps Komando Operasi). Banyak kisah-kisah dramatis era konfontasi yang bernilai sejarah. Namun ada berkah yang muncul, Batam mulai dilirik Jakarta. Soekarno berpesan kepada Jenderal Soeharto untuk memberikan perhatian khusus kepada Batam yang amat berhampiran dengan pusat perdagangan dunia, Selat Malaka dan Singapura.

- Berkembangnya kampung – kampung pesisir Batam

Hampir seluruh nama-nama tempat di Batam berasal dari masa lalu dan memiliki cerita tersendiri. Penamaan tersebut berasal dari kampung-kampung yang pernah ada di Pulau Batam. Sebagian di antaranya dilestarikan sebagai kampung tua, namun beberapa yang lainnya menjadi sentra urban. Kampung-kampung ini semakin berkembang dalam periodesasi migrasi tahap pertama dan kedua.

- Camp Pengungsian Vietnam di Galang

Pulau Galang yang berada dalam gugus Barelang pada 1975 hingga 1996 menjadi tempat persinggahan para manusia perahu yang eksodus besar-besaran dari Vietnam akibat perang saudara. Tercatat sekitar 250.000 jiwa yang tersebar di pulau-pulau berhampiran disatukan di Galang dalam areal seluas 80 hektar. Oleh UNHCR, Galang resmi dijadikan camp pengungsian Vietnam hingga perang reda.

Fase Industrialisasi

- Wasiat Soekarno pada Jenderal Soeharto

Dalam salah satu pidatonya di masa konfrontasi yang disiarkan RRI, Presiden Soekarno secara tegas menyebutkan telah mempersiapkan sebuah kawasan terdekat untuk menyaingi Singapura. Meski nama Batam tidak disebutkan secara eksplisit, namun Jenderal Soeharto menerjemahkan hal itu agar memberi perhatian khusus kepada Pulau Batam.

- Gemerlapnya Pulau Sambu di Masa Lalu

Pada era tahun 1940 – an Pulau Sambu sudah berkembang menjadi perkampungan yang ramai. Wilayah ini menjadi *storage tank oil* oleh perusahaan perminyakan Royal Dutch Shell sejak tahun 1927. Orang – orang kapal yang menyinggahi perairan Indonesia waktu itu mengidentikkan Indonesia dengan *Sambu Island.*

Dibanding dengan Batam di kala itu, Sambu diibaratkan sebagai pusat kota dan hiburan. Pulau Sambu tidak bisa dipisahkan dari sejarah perkembangan Batam dan beberapa tahun setelah itu gemerlap kehidupan Sambu menular ke Batam khususnya wilayah Sekupang, Jodoh dan Batu Ampar.

- Langkah – langkah Strategis Pengembangan Batam

Ketika estafet pemerintahan beralih ke Soeharto, Presiden RI kedua ini mulai menyusun langkah-langkah strategis bagi pengembangan Batam. Dimulai dengan menetapkan Batam sebagai *oilbase* Pertamina.

- Tetesan Minyak Pertamina jadi Pondasi Infrastruktur Awal

Di masa ini ekspor minyak Indonesia sedang *booming.* Tetesan minyak Pertamina pun ikut mengalir ke Batam guna dibangun infrastruktur awal berupa jalan, dermaga dan fasilitas-fasilitas lainnya.

- Otorita Batam Lahir di Pulau Bertuah

Batam menjadi *grand strategy* nasional karena letaknya yang sangat berhampiran dengan jalur sibuk pelayaran dunia serta menjadi kembaran Singapura. Itulah tuah Batam yang kemudian ditetapkan sebagai basis industrialisasi pada tahun 1971. Secara teknis Batam dikelola oleh sebuah lembaga khusus bernama Badan Pimpinan Pengembangan Industri Pulau Batam (BPPIPB) yang kemudian dikenal dengan sebutan Otorita Batam (OB).

- Daerah Industri Pulau Batam dalam Visi Habibie

BJ Habibie baru saja dipanggil dari Jerman untuk mengabdi kepada bangsa dan negaranya ketika mendapat tugas khusus untuk meng-*up grade* Pulau Batam sehingga memiliki daya saing. Visi-visi Habibie tentang Batam dalam fase ini sebagian terlaksana, sebagian lainnya mengalami disorientasi akibat gelombang reformasi dan pergantian kepemimpinan nasional.

- Terbentuknya Kota Administratif Batam

Batam terus berkembang salah satunya ditandai dengan peningkatan populasi penduduk yang drastis. Hal ini dipandang perlu

untuk menjadikan Batam sebagai wilayah Kota Administratif berdasarkan PP Nomor 34/1983 dengan walikota madya pertama Ir Usman Draman.

- Batam Memasuki Era Otonomi Daerah

Ketika Presiden Soeharto mundur pada 1998, Indonesia mulai memasuki fase reformasi. Dalam masa peralihan kepimpinan nasional ini, pada tahun 1999 seluruh kawasan di Indonesia mendapat hak otonomi yang dituangkan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999. Batam kemudian ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus yang dipimpin oleh seorang walikota defenitif, namun dalam pelaksanaan pembangunan dan investasi melibatkan potensi-potensi yang dimiliki Otorita Batam.

- Batam Menuju *Free Trade Zone*

Meski sebelumnya secara *de facto* kegiatan industrialisasi Pulau Batam sudah menggunakan prinsip-prinsip FTZ, namun legitimasi secara masif baru diundangkan pada tahun 2007. Diharapkan dengan berlakunya UU FTZ ini dapat menjadi katalisator bagi Batam dan segitiga Batam, Bintan dan Karimun (BBK) untuk semakin maju dalam menjemput dan menstabilkan iklim investasi.

- Tanda-tanda Kota Industri dalam Jejak Masa Silam

Batam mendapat perhatian khusus karena posisi yang sangat strategis. Nilai plus ini sudah terbaca oleh para pendahulu Batam,

sehingga banyak peninggalan tapak sejarah industri klasik yang pernah ada di Batam. Di antaranya adalah pabrik Batam, pengelolaan dapur arang, gambir dan sagu. ***

BATAM DARI TITIK NOL KILOMETER

Penentuan Hari Jadi Kota Batam awalnya adalah sebuah proses yang panjang dan melelahkan. Beberapa momentum sejarah tentang Batam seperti pembangunan pabrik batu Batam Brick Works pada 26 Juli 1896 dan hikayat Hang Nadim yang menghadang Portugis di Riau pada 1881 telah dipertimbangkan sebagai titik nol kilometer kelahiran Batam yang dapat kita saksikan gemerlapnya pada hari ini.

Bahkan ketika pembahasan ini masuk ke domain politik, beberapa pihak mencoba mengaitkan hari jadi Batam pada Kepres Nomor 65 Tahun 1970 tentang penetapan Batam sebagai logistic base untuk eksploitasi dan eksplorasi minyak lepas pantai atau pada PP Nomor 34 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kotamadya Administratif Batam. Adanya saling pengukuhan eksistensi antara Pemko dan Otorita Batam (OB) yang terlibat konflik kepentingan beberapa tahun lalu ikut menggagalkan penentuan Hari Jadi Batam yang merujuk kepada kaidah normatif.

Barulah tabir terbuka ketika Sejarawan Kepri Aswandi Syahri mempublikasikan temuan manuskrip pengukuhan Raja Isa ibni Raja Ali sebagai pemegang perintah atas Nongsa dan sekitarnya atas nama Sultan Riau Lingga Abdulrahman Syah dan Yang Dipertuan Muda Riau (YDMR) Raja Jakfar pada tanggal 22 Jumadil Akhir 1245 Hijrah, bertepatan 18 Desember 1829 Masehi.

Dengan demikian, kota yang sempat dianggap sebagai “pulau kosong” ini rupanya telah berumur 180 tahun. Tanggal 18 Desember 1829 oleh Aswandi diargumentasikan sebagai fase paling awal adanya lembaga pemerintahan di Batam. Dengan pengukuhan Raja Isa sebagai pemegang otoritas atas Batam, maka roda pemerintahan di pulau ini mulai berjalan secara sistemik yang kemudian perlahan-lahan mengkatrol pertumbuhan wilayah.

Penetapan hari jadi tiap-tiap kota di Indonesia merujuk pada pelbagai persepsi. Hari jadi Kota Pekanbaru misalnya dianggap bermula pada penggantian nama Senapelan menjadi Pekan Baharu pada Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku yakni Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar. Sedangkan hari jadi Tanjungpinang diperhitungkan pada 6 Januari 1784 M saat Raja Haji Fisabilillah menembak kapal komando Belanda “Malaka’s Wal Faren”.

Momentum ini hampir mirip dengan hari jadi Kota Jakarta yang bertepatan pada saat pengambilalihan Pelabuhan Sunda Kelapa oleh Pangeran Fatahillah dari Portugis pada 22 Juni 1527. Kota Pekanbaru dan Tanjungpinang kendati lahir pada tahun yang sama, latar belakang sejarahnya berlandaskan pada dua momentum yang berbeda. Sama halnya dengan Jakarta dan Surabaya yang jika dirunut dari sejarah kelahiran, kedua kota ini sudah muncul pada zaman kerajaan Hindu di abad ke-12, namun Jakarta memilih titik sejarahnya sendiri.

Sudah Humaniskah Batam?

Ketika sejarah itu telah digenggam, lantas bagaimana kita memfungsikannya agar langkah-langkah ke depan tidak mewariskan bercak hitam kepada generasi selanjutnya. Setiap kota seperti Batam memiliki muatan sejarah yang tidak pernah lepas dari konflik dan kontradiksi. Sejak terbentuknya kota di muka bumi ini dimulai dengan peradaban sederhana Mesopotomia, kota tertua di antara Sungai Eufrat dan Tigris yang berkembang pada awal Zaman Neolitik antara tahun 7000 SM – 5000 SM, atau kota besar Mohenjodaro-Harappa yang dibangun sekitar 3000 SM di lembah Sungai Indus, konflik antara penguasa dan jelata atau antara tuan tanah (pengendali modal) dengan pribumi telah menoreh luka-luka sejarah sepanjang berdirinya kota itu.

Akan halnya Batam, perjalanan sejarahnya dari titik nol kilometer itu patut kembali direnungkan, agar kita tidak terlalu puas hanya karena kota ini sudah menemukan tanggal lahirnya. Kecuali jika tujuan awalnya hanyalah untuk mematahkan semua mitos bernada sarkastis yang menyebutkan bahwa Batam hanyalah hutan belantara yang terdiri dari para monyet, sebelum masuknya era industrialisasi. Karena tidak akan pernah berbeda dengan sejarah kota manapun di muka bumi ini, Batam juga menyimpan sebuah luka sejarah. Pertanyaannya adalah sudah cukup humaniskah kota ini untuk kita tinggali?

Sepanjang usianya yang mencapai 180 tahun, kenyataannya pembangun fisik Batam berjalan lamban. Wilayah ini dikagetkan pada 30 tahun terakhir dengan adanya kontraksi pembangunan menyusul kebijakan pusat yang menetapkan Batam sebagai basis

industrialisasi. Dan dalam masa 30 tahun terakhir itu pulalah, fenomena Batam secara utuh seragam dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia sebagai tempat bercokolnya para kapitalis, keterdesakan ekonomi akibat tingginya urbanisasi, pertumbuhan kawasan kumuh (*slum*) serta kekacauan tata ruang dan ketidaksinambungan ekologi kota.

Globalisasi yang diterapkan di Batam dalam tiga dasawarsa terakhir menjadi dalih untuk tidak memberi akses lebih banyak kepada kepentingan publik. Implikasinya terhadap spasial pembangunan kota adalah tata ruang yang sangat memihak kekuatan dominan dalam hal ini pemilik modal. Kota Batam hari ini yang demikian gempita telah menjadi pusat aglomerasi milik segelintir orang. Menjamurnya konsep perumahan *regency* atau *cluster system* adalah sedikit upaya untuk menghindari tetek bengek kaum marjinal sekaligus membersihkan "aroma kampung" dari orang-orang tempatan yang telah menyumbangkan tanah moyangnya untuk itu.

Ketidakadilan alokasi sumber daya yang penting bagi rakyat telah menimbulkan kontradiksi di Kota Batam. Pergeseran makna dari *public goods* menjadi *private goods* yang terjadi sebagai akibat dari keniscayaan laju sejarah neo-liberalisme menjadi pendorong kontradiksi di tengah masyarakat. Salah satunya yang paling kentara adalah penggusuran rumah liar dan kampung-kampung kumuh oleh lembaga otoritas dengan perangkat aparatus-aparatusnya untuk dipersembahkan kepada pemilik modal dengan mengatasnamakan pembangunan dan estetika.

Sampai di sini, sebagai rakyat tidakkah kita ingin bertanya apa makna sebuah kota sejatinya? Sesungguhnya dalam cita-cita

filosofisnya, kota dibangun untuk menyejahterakan masyarakat seluruh lapisan serta tempat bernaung dan berhimpun penduduknya secara humanis dalam prinsip kesetaraan (*equal opportunity*). Sejak awal seharusnya orang-orang Batam sebagai penyumbang sejarah perlu wanti-wanti ketika rumus-rumus pembangunan dan kerumitan grafik ekonometri yang dibanggakan itu ternyata tidak mampu membuka kebuntuan akses bahkan justru menghambat masyarakat untuk menikmati kotanya sendiri.

Sepanjang alur sejarah Batam, tersumbatnya akses masyarakat untuk memiliki dan menikmati kotanya sendiri secara humanis terjadi pada tiga tahap. Pertama, fase Kesultanan Riau Lingga yang bernafas feodalistik, ditandai dengan besarnya kewenangan sultan dan kaum bangsawan dalam kepemilikan lahan dan pemungutan cukai. Kedua, fase kolonialisme yang menghegemoni kepentingan rakyat dengan menguasai seluruh fasilitas kota dan seluruh sumber daya pribumi untuk kepentingan kompeni. Ketiga, fase globalisasi di mana sedikit banyaknya, penguasa meng-*copy paste* model kebijakan yang diterapkan bangsa kolonial dalam tata kelola pembangunan kota.

Untuk fase yang terakhir ini, model kebijakan tata kota yang mengadopsi tabiat kompeni amat terasa di masa orde baru. Masyarakat berada pada posisi yang sangat dilemahkan ketika tanah-tanah ulayat mereka di-*buldozer* secara paksa dengan nilai ganti rugi yang sangat merisaukan hati. Orang-orang tempatan terpinggirkan ke sudut-sudut tak penting tanpa pemberdayaan apapun, hanya untuk sebuah penciptaan zona urban yang hasilnya dinikmati sekian orang. Titik-titik strategis di Batam ketika itu juga dikuasai orang-orang penting yang menjelma menjadi calo dan spekulan lahan.

Penyingkiran masyarakat lokal dan kaum pendatang unsklilled terjadi bersamaan dengan starting point era industrialisasi di Batam di mana terminologi FTZ pertama kali disebut-sebut. Kini ketika pola FTZ diterapkan secara lebih masif, perubahan cara pandang elemen eksekutor terhadap sisi sosial di Batam tidak banyak berubah. Meski sudah ada desakan politik untuk pelestarian kampung tua, namun ruang-ruang sosial tempat tumpah darah masyarakat tradisional tetap menjadi incaran atas nama investasi tanpa diimbangi tindakan afirmatif terhadap kesejahteraan mereka.

Jika alur sejarah ini tetap dipertahankan, maka asa kita bersama untuk menjadikan Batam sebagai kota yang humanis dalam prinsip kesetaraan tidak akan pernah benar-benar sampai ke tujuan. Dan satu catatan, kondisi kekinian dibandingkan dengan ketika sejarah itu bermula amat sangat berbeda. Siapa kini yang memiliki Batam sebenarnya? ***

JEMBATAN BARELANG
DAN TEORI BALON HABIBIE

Jembatan Barelang (Batam – Rempang – Galang) adalah ikon Batam. Adapula yang mempopulerkannya sebagai *landmark* Pulau Batam. Seperti orang mengenal New York dengan Patung Liberty, Paris dengan Menara Eiffel atau San Francisco dengan Golden Gate Bridge-nya, maka orang akan mengidentikkan Batam dengan jembatan Barelang, kemudian Logo Kota Batam latar belakangnya juga menggunakan jembatan tersebut sebagai salah satu ornamen di dalam logonya.

Gugusan kepulauan Rempang dan Galang yang pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Kepri (sekarang Kabupaten Bintan) mulai dilirik pada tahun 1984 terkait dengan rencana pengembangan pusat riset bioteknologi berskala internasional (*bio island*), sehingga Rempang sebagai bagian dari gugus Barelang dijadikan wilayah Kawasan Berikat berdasarkan Keputusan Presiden No. 56 Tahun 1984.

Terakhir pembentukan Kotamadya Batam definitif juga memasukkan Pulau Rempang dan gugusan Pulau Galang ke dalam wilayah administratifnya. Dalam perkembangan selanjutnya gugus Barelang berada dalam penjabaran RTRW Provinsi Kepri dengan total luas 715 KM2 atau 115 % luas Singapura. Maka langkah untuk

membangun jembatan Barelang mulanya menjadi keputusan sangat strategis.

Enam buah jembatan megah ini merupakan proyek vital sebagai penghubung jalur Trans Barelang yang memiliki bentang sepanjang 54 kilometer. Infrastruktur prestisius tersebut adalah bagian dari obsesi sang visioner Batam, Bapak Baharuddin Jusuf Habibie. Dalam proses selanjutnya fasilitas berbiaya mahal dan terkenal se-Indonesia ini dapat dikatakan mengalami proses disorientasi. Habibie pun kecewa.

Dalam beberapa kali kunjungan ke Batam, teknokrat yang selalu berpikir futuristik ini tampak risau dengan keadaan Batam yang dinilainya tidak terlihat istimewa sebagaimana *grand design* semula yang telah ia rancang.

Di mata Habibie, pembangunan Batam tak lebih dari deretan ruko – ruko dengan sistem tata kota yang sepele. Dalam visi Habibie, Batam didesain dengan sangat futuristik, mulai dari sistem drainase, fasilitas publik, *green area* serta tata pemukiman yang terukur yang tumbuh dan berkembang *by design,* namun sekarang terlihat asal jadi, bahkan tumpang tindih, dan banyak area hijau berubah menjadi Ruko, jantung kota menjadi hilang, semua wujud menjadi kawasan komersial yang sesak.

Begitu pula jika menilik ke tujuan semula untuk membangun jembatan Barelang yang setidaknya telah menyedot anggaran Otorita Batam (OB) saat itu sebesar Rp 400 Miliar (mendekati Rp 1 triliun untuk nilai sekarang) yang dibangun dalam masa tujuh tahun (1992 –

1998), maka pantaslah Habibie mengurut dada, karna sampai detik ini apa yang menjadi angan sang Visioner jauh dari harapan.

Jembatan Barelang (disebut juga Jembatan Habibie) merupakan *pilot project* berteknologi tinggi yang melibatkan ratusan insinyur Indonesia tanpa campur tangan ekspatriat atau tenaga ahli luar negeri. Dibangun tentu saja untuk memperluas wilayah kerja OB sebagai regulator daerah industri Pulau Batam dengan pertambahan luas 277 kilometer persegi.

Hal ini adalah juga sebagai manifestasi dari Teori Balon Habibie. Teori itu mengasumsikan, Singapura yang luasnya sekitar 500 kilometer persegi itu akan memasuki era jenuh. Ketika era itu tiba, Singapura tidak dapat lagi menampung investasi yang masuk. Batam pun dibangun dan disiapkan untuk menampung aliran udara dari balon investasi yang terus menggelembung. Seandainya Batam sudah penuh maka desakan investasi dapat disalurkan ke pulau-pulau di sepanjang yang terhubung dengan Jembatan Barelang (Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Setoko, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru).

Namun fakta yang terlihat hari ini adalah, Jembatan Barelang tidak lebih dari tempat tamasya jagung bakar, tempat remaja bercinta, dan pernah juga dijadikan oprang untuk tempat mengakhiri hidup dengan terjun bebas, dan sedikit bermanfaat bagi orang – orang pulau menyeberang menuju Nagoya ke Kota Batam, sebuah kesia-siaan apalagi jika dikaitkan dengan biaya perawatan keseluruhan jembatan yang mencapai Rp 5 miliar per tahun.

Kisruh soal status lahan serta tata cara pengalokasian kepemilikan lahan untuk dunia investasi, tampak seperti benang kusut menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Pusat sengaja menahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Rempang dan Galang dari pada harus menyerahkan kepada pemilik sahnya, Pemerintah Kota Batam.

Akibatnya investasi ratusan miliar yang ditanamkan di jembatan Barelang tidak menampakkan benefit atau *return on investment* yang mendekati *zero* meski sudah 20 tahun berlalu sejak mula dibangun.

Jembatan Barelang adalah korban ketersia-siaan investasi oleh OB akibat tarikan kepentingan dan ego sektoral pihak-pihak yang berkepentingan baik di pusat maupun di daerah. Jika saja benang kusut ini segera dapat diuraikan atau ditempatkan sesuai pada tempatnya, maka *status quo* untuk kepemilikan lahan investasi di Batam tidak perlu terjadi.

Bukan saja dana ratusan miliar yang menjadi soal tapi kita dapat mengkalkulasi dari nilai *potential lost* akibat ratusan investor yang tertolak untuk menanamkan modalnya di kawasan Rempang, Galang dan pulau-pulau lainnya, yang lebih menyedihkan lagi masyarakat asal yang memiliki lahan kebuh di pulau-pulau tersebut, juga tidak dapat memanfaatkan benefit dari terbukanya peluang Investasi.

Jika saja OB dengan cengkeraman pusatnya dapat melunak dan menghargai spirit Otonomi Daerah yang kala itu diperjuangkan dengan idealisme dan semangat juang seorang walikota seperti Nyat Kadir, maka pengelolaan lahan investasi di Barelang tidak perlu memakan korban. Cukup sudah jika Batam sebagai *mindland* menjadi proyek besar bagi para penjahat spekulan yang bertopengkan sang

Investor yang "bersepakat" dengan sejumlah oknum di OB dengan sedemikian rupa memanipulasi sistem pengalokasian lahan, OB pun tampaknya ingin merebut peluang besar dan tak rela melepaskan peluang apa yang akan diperoleh di kawasan sepanjang Trans Barelang.

OB (baca: BP) dalam perkembangannya kemudian memang memperoleh Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Rempang dan Galang namun statusnya kini sedang menggantung di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat dengan alasan menunggu hasil padu serasi dengan Kementerian Kehutanan.

Sebenarnya sejak dulu problema yang kontraprduktif dengan iklim investasi ini dapat diatasi jika saja OB dan orang – orang pusat yang berkepentingan dapat mengikuti *trend* dan arus reformasi yang berkembang karena bukan harga mati bahwa visi Habibie hanya dapat diterjemahkan oleh OB semata.

Maka amanat yang terkandung di dalam UU No. 53/1999 tentang Pembentukan Kota Batam dapat dimanifestasikan dengan memindah kedudukan OB di bawah sub ordinat Pemerintah Kota Batam. Hal ini dapat dilakukan dengan *smooth* tanpa perlu mereduksi para *experts* di tubuh OB, yang pemikiran dan keahliannya telah terbukti dapat menyulap Batam menjadi metropolitan seperti saat ini. Jadi, *statement* Asman Abnur beberapa tahun lalu untuk mendemisioner OB, adalah langkah tepat. ***

BAB III

KETENAGAKERJAAN

UPAH MINIMUM KOTA :
ANTARA RETORIKA DAN KONSISTENSI

Setiap menjelang akhir tahun, pemerintah kota dan propinsi selalu disibukkan dengan hingar bingar pembahasan dan penetapan UMK, yang selalu saja meledakkan ketegangan baik dalam pembahasan maupun kegiatan demonstrasi pekerja/buruh yang mengganggap kurang terakomodirnya kepentingan mereka dalam pemenuhan kehidupan layak.

Data-data makroekonomi dan mikroekonomi yang dipakai sebagai salah satu indikator dalam penetapan besaran angka Upah minimum tahun ini menunjukkan indikator yang kurang baik dalam proses pencapaian kehidupan layak bagi pekerja sebagai contoh adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, krisis ekonomi yang melanda Eropa dan Amerika yang berpengaruh terhadap Investasi asing, yang diperparah dengan berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Selain faktor-faktor ini

juga diperparah dengan kenaikan BBM dan Tarif Dasar Listrik.Dalam persoalan ini kenaikan BBM dan kenaikan tariff dasar listrik adalah factor eksternal yang terkadang luput dari kajian namun harus dapat diantisipasi agar upah buruh dapat bertahan.

Ini adalah simalakama bagi kelompok pengusaha dan kelompok pekerja/buruh untuk mencapai titik keseimbangan kepentingan antara kedua kelompok tersebut.Dan adalah sangat wajar apabila dalam perundingan penetapan upah minimum, baik pengusaha maupun pekerja dengan keseriusan dan dengan segala perjuangan mempertahankan angka yang mereka tetapkan karena pada masing angka-angka itulah berada titik keseimbangan kepentingan mereka.Kekompok buruh tentu saja bekepentingan tehadap kenaikan upah yang mereka anggap wajar untuk menutupi upah yang defisit akibat kenaikan harga-harga, demikian juga pengusaha yang berupaya untuk mempertahankan stuktur biaya terhadap marjin keuntungan mereka.

Secara teori ekonomi, baik kapitalis maupun sosialis, persoalan kepentingan pengusaha dan pekerja tidak pernah akan mencapai kata sepakat jika tidak di intervensi oleh pemerintah, oleh

sebab itu di dalam setipa Negara yang menganut faham demokrasi kapitalis seperti Indonesia sudah selayaknya peran pemerintah baik sebagai stabilisator maupun sebagai penggerak sangat vital perannya dalam berbagai kebijakan terutama mengenai ekonomi tenaga kerja sebagaimana peran pemerintah menggerakkan program menuntaskan kemiskinan dan kebodohan.

Tulisan ini bermaksud untuk mengkritisi peran pemerintah baik pemerintah provinsi kepulauan riau maupun pemerintah Kota/kabupaten. Mulai dari tahun 2005 ketika tebentuknya Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau, penetapan besaran UMK Kabupaten/Kota sesuai dengan UU No.13 Tahu 2003 tentang Ketenagakerjaan ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota. Dan Dewan Pengupahan Provinsi.

Penetapan besaran UMK oleh Gubernur selalu saja ada rekomendasi dan kondisi-kondisi yang harus dilaksanakan sebagaimana hasil kompromi ketika terjadi perdebatan di Dewan pengupahan Provinsi, sebagai contoh adalah rekomendasi yang menyertai SK Gubernur tentang Penetapan UMK Kota Batam ketika waktu itu Gubernur kepri adalah Ismeth Abdullah yang

merekomendasikan pengadaan Bus karyawan dan pembangunan Rumah susun sewa murah yang tujuannya adalah untuk meringankan beban perkerja dalam bidang perumahan dan transportasi yang sampai sekarang dianggap sebagai faktor inflatoir yang menggerogoti kekuatan daya beli pekerja/buruh.

Disamping itu dalam setiap kesempatan penetapan upah, Surat Keputusan tentang penetapan UMK selalu saja membuat rekomendasi yang selalu menyebutkan untuk mengupayakan tahapan tercapainya Upah Minimum sama dengan kebutuhan Hidup layak, bayangkan kalau tahapan pencapaian menuju KHL ini dimulai dari tahun 2006 sampai tahun 2013 ? . Namun hal ini tidak pernah dapat dicapai bahkan secara kuantitatif malah bukan terjadi proses peninggakatan malah terjadi dekadensi persentasi.

Menurut saya kesalahannya adalah cara pandang pemerintah, baik itu pemerintah provinsi kepulauan Riau maupun pemerintah kota/kabupaten di provinsi kepulauan riau bahwa persoalan upah buruh hanya sekedar retorika. Persoalan upah buruh bukan persoalan sistemik yang perlu untuk di tindaklanjuti dan yang dipandang hanya bersifat ad hoc walaupun jelas-jelas berisi

rekomendasi dan serangkaian kegiatan yang tercantum dalam surat keputusan Gubernur. Akibat cara pandang pemerintah diatas jelas menimbulkan reaksi pada kelompok buruh dengan mengadakan demonstrasi dari yang damai sampai penuh dengan bentrok yang tentunya dapat mempengaruhi sisi pandang investor asing tentang stabilitas kehidupan sosial dan ekonomi kota Batam yang memang telah dirancang sebagai daerah lokasi penanaman investasi asing yang terkemuka di kawasan asia.

Persoalan klasik lainnya adalah adanya rekomendasi gubernur tentang komitmen untuk pengendalian harga dan distribusi barang kebutuhan konsumsi pokok, yang merupakan biang keladi terjadinya inflasi yang menurut sindiran teman-teman mengatakan bahwa berapapun upah kalau harga kebutuhan pangan melonjak terus toh tak ada gunanya. Dari berbagai analisis, ditemukan belum adanya praktik nyata dalam pengendalian harga barang konsumsi di lapangan dan trend nya pun cenderung mengarah keatas setiap tahunnya.

Yang terbaru adalah usulan pengelompokan kelompok usaha sebagaimana yang tercantum dalam rekomendasi SK Gubernur

tentang penetapan UMK Tahun 2012 lalu yang sampai saat ini belum ada standarisasi atau pedoman yang mengatur pengelompokan Usaha padahal telah 1 tahun berjalan. Akibat kelalaian ini tentu saja menimbulkan persoalan baru yang berdampak terhadap kewibawaan pemerintah terutama Gubernur karena SK yang telah ditandatangani itu harus direvisi maupun harus ditambahkan dengan Surat keputusan lainnya.

Perlu diketahui bahwa Batam adalah model bagi wilayah penanaman modal asing bagi Indonesia dan sering disebut sebagai halaman depan Republik Indonesia yang tentunya harus berbeda dengan daerah lain yang tidak punya berbagai keistimewaan, yang diharapkan setidaknya mampu menunjukkan pada dunia bahwa Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau mampu memanajemeni secara sistematik dan terencana terhadap persoalan tenaga kerja yang merupakan modal dasar dan sering dibangga-banggakan kepada pelaku bisnis investasi mancanegara

BURUH : SUATU TINJAUAN KEMBALI

Pengertian buruh pada saat ini di mata masyarakat awam sama saja dengan pekerja, atau tenaga kerja. Padahal dalam konteks sifat dasar pengertian dan terminologi diatas sangat jauh berbeda. Secara teori, dalam kontek kepentingan, didalam suatu perusahaan terdapat 2 (dua) kelompok yaitu kelompok pemilik modal (owner) dan kelompok buruh, yaitu orang-orang yang diperintah dan dipekerjanan yang berfungsi sebagai salah satu komponen dalam proses produksi. Dalam teori Karl Marx tentang nilai lebih, disebutkan bahwa kelompok yang memiliki dan menikmati nilai lebih disebut sebagai majikan dan kelompok yang terlibat dalam proses penciptaan nilai lebih itu disebut Buruh. Dari segi kepemilikan kapital dan aset-aset produksi, dapat kita tarik benang merah, bahwa buruh tidak terlibat sedikitpun dalam kepemilian asset, sedangkan majikan adalah yang mempunyai kepemilikan aset. Dengan demikian seorang manajer

atau direktur disebuah perusahaan sebetulnya adalah buruh walaupun mereka mempunyai embel-embel gelar keprofesionalan.

Buruh berbeda dengan pekerja. Pengertian pekerja lebih menunjuk pada proses dan bersifat mandiri. Bisa saja pekerja itu bekerja untuk dirinya dan menggaji dirinya sendiri pula. Contoh pekerja ini antara lain Petani, nelayan, dokter yang dalam prosesnya pekerja memperoleh nilai tambah dari proses penciptaan nilai tambah yang mereka buat sendiri. Istilah tenaga kerja di populerkan oleh pemerintah orde baru, untuk mengganti kata buruh yang mereka anggap kekiri-kirian dan radikal.Pengertian Tenaga Kerja mempunyai makna yang sangat luas yang bersifat umum dan terkadang rancu dengan istilah angkatan kerja.

Pengertian-pengertian buruh sesuai gambaran diatas, menunjukkan bahwa mulai dari operator, mandor sampai manajer adalah buruh. Sepanjang dia memperoleh gaji/kompensasi sebagai akibat pekerjaannya dalam suatu proses produksi. Hal ini begitu kontradiktif dengan eksistensi buruh secara faktual saat ini. Buruh saat ini identik dengan pekerja level bawah yang biasanya terdiri dari operator produksi dan paling tinggi mandor. Kekeliruan terminologi

dan pengertian ini pula yang menyebabkan, dari seluruh buruh yang bekerja di Indonesia, hanya 3 % buruh yang menjadi anggota serikat buruh/serikat pekerja, yang tentu saja menunjukkan betapa rendahnya posisi tawar buruh ketika berhadapan dengan kelas pemilik modal. Disamping itu, sebaran keanggotaan serikat buruh/serikat pekerja hanya terbatas dari manajemen menengah ke manajemen bawah.Sedangkan top manajemennya, mengganggap bergabung ke dalam serikat buruh/serikat pekerja bukan sesuatu yang menguntungkan hal ini mungkin disebabkan pendapatan yang lebih tinggi dan akses mereka ke pemilik perusahaan. Walaupun dalam berbagai kasus, terkadang top manajemen bahkan sama nasibnya dengan tingkat manajemen paling bawah., terancam kehilangan pekerjaan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi atau pun tutup. Di Indonesia, saat ini tercatat masih sangat sedikit kalangan pekerja dalam kelompok top manajer yang bergabung dalam serikat buruh/serikat pekerja beberapa perusahaan mulai menempatkan para manajernya sebagai pengurus serikat buruh/serikat pekerja diantaranya perusahaan Bir Bintang dan City Bank.

Saat ini, wilayah perjuangan buruh titik klimaksnya hanya sekedar perjuangan akan upah. Demonstrasi buruh yang memacetkan lalu lintas dan terkadang harus berdarah-darah hanya dibayar dengan sedikit kenaikan upah minimum yang biasanya selalu digerogoti oleh tingkat inflasi.

Disisi lain, karena kuantitas buruh yang cukup besar, keberadaan buruh sering dieksploitasi oleh pihak-pihak lain terutama oleh kepentingan politik. Banyak partai politik mengarahkan pola gerakannya untuk merekrut buruh sebagai alat kepentingan politik mereka dan berupaya merebut suara mereka dengan menjanjikan perbaikan untuk nasib buruh, yang kita sama-sama tahu bahwa nasib buruh dari hari ke hari tetap saja sebagai alat produksi yang dapat dibuang dan diganti setiap saat.

Dalam kancah perpolitikan di Indonesia, sebenarnya ada partai politik yang berbasiskan massa buruh bahkan partainya memakai nama buruh. Walaupun basis massa nya jelas, namun partai tersebut ternyata tidak di didukung oleh buruh itu sendiri. Justru buruh itu ikut partai lain yang jelas-jelas tidak meletakkan perjuangan buruh sebagai proiritas programnya. Bahkan pada saat ini, ada

kecenderungan, bahwa serikat buruh/serikat pekerja menjadi underbow bayangan sebuah partai politik.

Andai saja serikat buruh/serikat pekerja mempunyai kekuatan teroganisir dan mempunyai pola perkaderan yang militan, kaum buruh bisa membuat perubahan-perubahan paradigma politik yang saat ini jelas tidak berfihak terhadap buruh.Berdasarkan analisa kinerja partai politik di Parlemen (DPRD) selama ini dan arah politik ekonomi mereka, kelompok buruh bisa menarik benang merah secara tegas, mana partai politik yang tidak membela kepentingan buruh dan mana yang membela. Sehingga ke depan akan ada pembelajaran politik kepada para politikus agar mereka tidak bisa berbohong lagi, karena bagi partai politik yang tidak membela kepentingan buruh maka kedepan mereka akan tidak dipilih oleh buruh lagi. Beberapa kasus di Batam misalnya, buruh selalu menjadi korban, baik itu dalam kasus Livatech maupun dalam penetapan Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan kota Batam yang tertunda terus hanya karena beberapa pasal yang dinilai memberatkan kelompok kapital.

Pemahaman akan proses industrialiasasi yang minim dan gerakan perburuhan serta perkaderan yang lemah dalam gerakan

buruh serta banyaknya para ketua-ketua Serikat buruh/serikat pekerja menjadi petualang politik, menyebabkan gerakan politik buruh menjadi tidak tentu arah. Ikatan kepentingan dan sosial sebagai buruh dikalahkan oleh ikatan ideologis para buruh itu sendiri. Ikatan ideologis itu ternyata tidak membuat partai buruh yang ada menjadi besar, tetapi justru partai-partai yang memakai ideologi keagamaan dan nasionalis yang dapat merebut konsituen buruh. Walaupun dalam perjalanannya dari waktu ke waktu, partai keagamaan dan nasionalis ini ternyatatidak mampu berbuat yang terbaik bagi kepentingan buruh, bahkan ketika kader partai tersebut menjadi pejabat birokrat di dalam pemerintahan

BOLA LIAR UPAH MINIMUM

Upah tenaga kerja secara teori dapat ditentukan melalui 3 (tiga) metode yaitu berdasarkan hukum pasar (interaksi supply dan demand), kemampuan finansial perusahaan dan berdasarkan biaya hidup. Di Indonesia, secara umum upah buruh baik UMK (upah minimum Kota) maupun UMS (Upah Minimum Sektoral) ditentukan berdasarkan tingkat biaya kebutuhan hidup. Tingkat kebutuhan Biaya Hidup yang merupakan refleksi dari pengeluaran konsumsi pekerja, yang saat ini di implikasikan menjadi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) .Dari besaran angka KHM yang didapat kemudian secara bersama-sama dibahas dan dirundingkan oleh pihak serikat pekerja, asosiasi pengusaha dan pemerintah yang kemudian menghasilkan Upah Minimum Kota/Kabupaten.

Di beberapa negara seperti China dan Vietnam, Upah minimum sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah.Uniknya lagi, di China dan Vietnam, mempunyai struktur upah minimum yang

berstandard ganda, yaitu upah minimum yang tinggi untuk perusahaan investasi asing dan sebaliknya untuk perusahaan domestik. Di Indonesia, penetapan upah minimum ditentukan dengan mempertimbangan faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, perbandingan dengan daerah lain dan Indeks Harga Konsumen, yang setiap besaran Upah minimum berbeda disetiap kota/kabupaten tergantung pada kondisi daerah yang bersangkutan. Sebagai perbandingan: untuk tahun 2005, Upah minimum Kota Batam adalah sebesar Rp. 635,000, sedangkan di Kabupaten Karimun sebesar Rp. 577,500, Kabupaten Natuna Rp. 557,000 Kabupaten Kepulauan Riau Rp. 573,500, Kabupaten Lingga Rp. 557,000 dan Kota Tanjung Pinang Rp. 576,000

Upah Minimum Kota/Kabupaten di Indonesia yang ditetapkan biasanya berlaku untuk satu tahun, namun di negara lain seperti Malaysia, Vietnam dan China, Upah Minimum biasanya berlaku untuk minimal 5 (lima) tahun yang kemudian akan diadakan revisi bila dibutuhkan. Upah minimum yang mempunyai jangka waktu lebih panjang, biasanya menunjukkan kondisi stabilitas ekonomi suatu negara. Berbagai keuntungan dari Upah minimum yang relatif

panjang yaitu memberikan kepastian kepada investor asing mengenai upah tenaga kerja yang stabil dan memberikan rasa aman investor asing dari ancaman demonstrasi buruh yang biasanya selalu dikhawatirkan oleh pengusaha investor asing.

Upah Minimum secara filosofi adalah suatu jaring pengaman (safety net) yang paling terendah yang harus dibayarkan kepada buruh. Dengan perkataan lain, Upah minimum merupakan upah yang paling terendah yang boleh dibayarkan pengusaha yang mempunyai batasan untuk seorang pekerja yang yang bekerja selama 0 tahun dan berstatus lajang. Dari Batasan ini, maka perhitungan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) pun diasumsikan sebagai kebutuhan hidup minimum seorang pekerja lajang dalam 1 (satu) bulan. Dalam Penetapan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) ada 4 (empat) komponen utama yaitu Makanan dan Minuman, Perumahan dan Fasilitas, Sandang dan Aneka Kebutuhan. Di Indonesia, Penetapan Kebutuhan hidup Minimum didapatkan melalui survey yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota yang dilakukan di pasar-pasar terpilih yang biasanya tempat pekerja berbelanja kebutuhan hidup. Survey KHM dilakukan secara periodik per bulan

Bagi negara-negara yang kondisi ekonominya relatif stabil yang ditandai dengan nilai kurs yang relatif stabil, dan tingkat inflasi yang moderat serta investasi sosial pemerintah yang terencana.Permasalahan besaran angka bukan menjadi persoalan pokok. UMK kota Batam yang sebesar Rp. 635,000 menurut pengamatan kami, digerogoti oleh dua komponen pengeluaran buruh yang dominan yaitu komponen transportasi dan perumahan yang mengambil porsi sekitar 50 %. Hal ini terkadang diperparah dengan kenaikan harga komponen lainnya seperti makanan dan minuman dan sandang serta aneka kebutuhan. Disamping itu kondisi ekonomi makro indonesia seperti kenaikan BBM dan kebijakan tata niaga perdagangan semakin mengurangi kekuatan upah yang diterima buruh. Faktor-faktor ketidakstabilan harga, moda transportasi yang mahal dan tentu saja iklim ekonomi makro nasional yang saat ini gonjang-ganjing yang akhirnya mempengaruhi kekuatan upah yang diterima oleh pekerja. Menghadapi berbagai perubahan-perubahan dalam indikator ekonomi seperti tingkat inflasi, kenaikan BBM dan indikator lainnya, beberapa perusahaan biasanya melakukan penyesuaian tingkat upah pekerjanya.Namun dari hasil pengamatan dilapangan, lebih banyak perusahaan tetap mempertahankan Upah

minimum yang telah ditetapkan walaupun terjadi perubahan-perubahan dalam tingkat harga konsumsi dan BBM.

Sesuai namanya, Upah Minimum adalah upah yang terendah yang harus dibayarkan pengusaha kepada buruh untuk kegiatan pekerjaan yang bersifat umum yang diberlakukan pada karyawan lajang dan mempunyai masa kerja 1 tahun. Namun kenyataannya, masih banyak perusahaan di kota Batam yang hanya memberikan standard upah minimum yang ditetapkan ini menjadi upah real (take home pay) yang diterima buruh, walaupun si buruh tersebut telah kawin dan mempunyai anak dan telah melewati masa kerja 1 tahun. Dari hasil survey yang dilakukan oleh Sarma Sinaga dkk (2004) di seluruh kawasan industri di Kota Batam, mereka menemukan ada 3 (tiga) kondisi dalam penerapan UMK di Kota Batam. Di Kawasan Industri Muka Kuning Misalnya, secara kuantitatif upah yang diterima buruh perbulannya berkisar dari Rp. 800,000 s/d Rp. 1,500,000, sedangkan diluar kawasan ini, ada perusahaan yang membayar sesuai UMK yang berlaku Rp. 635,000 namun ada juga perusahaan yang membayar upah buruh dibawah standard UMK yang berkisar dari Rp. 500,000 s/d Rp. 600,000.

Kedepan, tahun 2006, penetapan UMK menjadi begitu rumit, mengingat berbagai persoalan ekonomi yang mengarah kepada instabilitas seperti kenaikan Harga BBM, melemahnya mata uang rupiah dan indikator ekonomi makro lainnya yang labil yang kesemuanya ini akan mempaengaruhi kondisi ekonomi mikro seperti daya beli yang lemah dan kelangsungan perusahaan. Tentu saja, kondisi ini membuat baik buruh maupun pengusaha menghadapi dilema. Buruh, tentu saja akan berupaya untuk bernegoisasi menaikkan upahnya untuk mengatasi kenaikan-kenaikan harga barang konsumsi dan biaya hidup sedangkan pengusaha akan mengupayakan tidak terjadi kenaikan upah, karena dengan berbagai alasan seperti beratnya beban perusahaan akibat kenaikan harga BBM dan semakin tidak kondusifnya iklim investasi di Kota Batam yang akan menebar ancaman serius : hengkang atau relokasi ke negara yang lebih kondusif.

Pembahasan Upah minimum Kota Batam yang sudah mulai dilaksanakan mulai bulan Agustus ini, tampaknya akan diperpanas dengan kegiatan Pemilihan Langsung Walikota Batam yang akan dimulai pada September 2005 ini. Bersama kemiskinan dan isu

SARA, Topik Upah Minimum Buruh merupakan komoditas politik yang paling laku dijual oleh Calon Walikota untuk mendapatkan simpati pemilih dari kalangan tertentu.Kita berharap, bagi calon walikota dan pendukungnya untuk tidak mempolitisir permasalahan upah minimum hanya untuk kepentingan sesaat.

Dari uraian diatas, kita melihat bahwa memang tidak ada jalan keluar (way out) permasalahan apabila persoalan ini diserahkan hanya kepada perundingan buruh dan pengusaha. Persoalan besar dalam Upah minimum kota batam sebenarnya sudah diidentifikasikan yaitu komponen perumahan dan transportasi yang menjadi faktor inflatoir yang menggeroti upah buruh. Solusi yang paling realistik adalah adanya intervensi Pemerintah Kota Batam dalam bentuk investasi publik dalam penyediaaan sarana trasportasi dan perumahan murah bagi pekerja yang merupakan 80 % penduduk Kota Batam. Pemerintah kota Batam tidak boleh melupakan perannya sebagai stabilitasator dalam pembangunan masyarakat. Disamping itu Pemerintah kota batam dalam menyikapi ketidak pastian ekonomi nasional, harus menyiapkan dana-dana darurat dalam APBD-nya yang biasanya ada dalam pos anggaran tak tersangka yang tujuan

penggunaannya ditujukan untuk penanggulangan bencana alam, dan penanggulangan akibat krisis ekonomi yang bisa berbentuk dalam intervensi pasar dan subsidi.

ISU POLITIK DAN EKONOMI DALAM PEMBAHASAN RANPERDA KETENAGAKERJAAN DI KOTA BATAM

Ranperda Ketenagakerjaan yang di mulai dibahas pada periode 2004-2009 DPRD Kota Batam, sampai saat ini (periode 2009-2014) belum menemukan titik terang akhir dari Ranperda tersebut. Berbagai macam pro kontra selalu mewarnai perdebatan pembahasan ranperda baik di dalam ruangan Rapat DPRD Batam maupun pada wacana publik terutama yang diwakili oleh kalangan Pengusaha dan Pekerja.

Perlu diketahui, bahwa Ranperda Ketenagakerjaan ini adalah merupakan produk hak inisiatif anggota DPRD Batam yang diwakili oleh Komisi IV DPRD Kota Batam.

Tentu, ranperda yang merupakan hak inisiatif DPRD Kota Batam sangat berbeda dengan Ranperda yang diusulkan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) , terutama dalam hal pembiayaan. Perda hasil hak inisiatif biasanya merupakan bentuk kepedulian Anggota DPRD terhadap permasalahan sosial yang ada. Menurut

data yang ada, DPRD Kota Batam baru menghasilkan satu perda yang merupakan hak inisiatif yaitu perda Wakaf

Secara politis, apabila ranperda ketenagakerjaan ini berhasil dijadikan sebagai produk hukum dalam bentuk peraturan daerah (Perda), maka secara otomotis akan mengikut sertakan keterlibatan aktif DPRD Kota Batam dalam berbagai persoalan ketenaga kerjaan seperti besaran upah, jaminan sosial tenaga kerja, serta persoalan negatif yang ditimbulkan oleh praktik alih daya tenaga kerja (outsourcing)

Ketika UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah satu-satunya payung hukum ketenaga kerjaan di Indonesia, masalah ketenagakerjaan bukanlah domain dari DPRD baik DPRD Kota/Kabupaten maupun DPRD Provinsi, hal ini dapat kita lihat bahwa pembahasan Upah, baik Upah Minimum kabupaten.Kota (UMK) maupun Upah Minimum Propvinsi (UMP) merupakan hasil pembahasan tripartit yaitu pihak pengusaha, pihak pekerja dan pemerintah daerah, yang tanpa melibatkan sedikitpun peran unsur legislatif. Demikian juga pesoalan yang menyangkut permasalahan hubungan industrial, selalu saja, karena aturan

perundangan, DPRD Kota/Kabupaten tidak bisa masuk ke wilayah tersebut.

Dalam banyak Undang-Undang yang ada di Negara ini, selalu dibutuhkan penjabaran yang lebih detail dari undang-undang tersebut yaitu dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan daerah. Jadi wajar saja apabila UU No. 13 tahun 2003 menyisakan persoalan-persoalan, utamanya adalah persoalan berbedanya penafsiran makna akan undang-undang tersebut dan ke-khas-an daerah masing yang tentunya di interpretasi berdasarkan sudut pandang kepentingan.

Kita juga tahu, bahwa UU No. 13 Tahun 2003 tersebut disusun dalam konteks secara makro masalah ketenakerjaan di seluruh Indonesia tanpa memperhatikan Produk Domestik Regional Bruto, struktur industri, indeks harga konsumen dan indikator lainnya antar kota/kabupaten di Indonesia. Beberapa kekhususan kota Batam adalah antara lain lebih dari 62 % Produk Domestik Regional Brutonya dikuasai oleh sektor industri pengolahan

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh kelompok pengusaha yang merasa keberatan tentang Perda Ketenagakerjaan ini adalah menurut mereka perda ketenagakerjaan ini akan menambah jenjang birokrasi yang panjang, karena tentunya akan melibatkan DPRD Batam dalam setiap pembahasan masalah ketenagakerjaan di Kota Batam. Tanpa keterlibatan DPRD Kota Batam, misalnya, selama ini pembahasan Upah Minimum Kota (UMK) yang melibatkan unsur tripartite selalu diwarnai dengan perdebatan seru dan demontrasi tenaga kerja yang memakan waktu dan energy kedua belah pihak. Disamping itu secara pesimistis mereka menilai bahwa isi dari Perda Ketenagakerjaan ini melulu lebih mementingkan kepentingan kekompok pekerja yang tentunya menurut mereka ini ujung-ujungnya akan menambah biaya yang harus mereka keluarkan.

Menurut hemat penulis, Perda ketenaga kerjaan di Kota Batam, bermanfaat bagi pengusaha maupun tenaga kerja. Bagi pengusaha, manfaaatnya adalah dapat melibatkan DPRD Kota Batam bersama Pemerintah Kota Batam untuk bertanggung jawab terhadap pengendalian harga bahan konsumsi yang selalu menjadi momok dalam pembahasan Upah dari tahun ke tahun. Disamping itu

juga, dengan adanya perda ini diharapkan dapat dijabarkan kriteria/klassifikasi dunia usaha baik itu skala besar, yang nantinya akan digunakan untuk pengeculian dalam penerapan Upah Minimum maupun pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi perusahaan/usaha yang dikategorikan tidak mampu.

Disamping itu, kontributor utama dalam setiap kenaikan upah yaitu sektor transportasi, sektor perumahan dan konsumsi yang mengegerogoti besaran upah tenaga kerja dapat dicarikan solusinya bersama DPRD Kota Batam dan pemerintah Kota Batam tentunya melalui kebijakan penganggaran dari APBD Kota Batam misalnya dengan penambahan jumlah bus karyawan, pembangunan rumah susun sewa dan paling penting adalah pengendalian harga bahan kebutuhan konsumsi.

Manfaat bagi tenaga kerja adalah antara lain adanya jaminan bahwa upah yang mereka terima adalah hasil pembahasan yang fair dan rasional berdasarkan indikator-indikator yang terpercaya. Disamping itu pekerja dilindungi dari kesewenang-wenangan dalam hal kesejahteraan dan jaminan sosial mereka.

Sedangkan manfaat makro perekonomian batam, perda ini diharapkan dapat mengatur kembali pola pelatihan tenaga kerja yang selama ini terabaikan meskipun di Batam telah ada Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Batam, BP Batam dan Departemen Tenaga Kerja RI, namun belum mampu menghasilkan tenaga kerja yang terlatih dan menjadi tuan di negerinya sendiri

MEMAHAMI HUBUNGAN BURUH – PENGUSAHA

Buruh, Kata Karl Marx, adalah sekelompok mayoritas masyarakat yang tertindas akibat penguasaan faktor produksi dan akumulasi kapital para kapitalis. Pernyataan Marx setidaknya masih relevan pada situasi saat ini, apalagi melihat gejolak yang terjadi antara buruh-pengusaha di tanah air. Hal ini bisa kita lihat pada setiap tahunnya di berbagai belahan dunia sering terdengar demonstrasi buruh yang memperjuangkan haknya.

Pada hakikatnya, ada suatu hukum alam yang terjadi dalam hubungan antara buruh dan pengusaha.Sejak abad ke 19 sampai sekarang pola hubungan buruh-pengusaha bersifat konflik yang terus menerus. Disatu sisi pengusaha akan selalu berupaya terus menerus mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Disisi lain buruh pun punya kepentingan untuk mendapatkan upah yang sebesar-besarnya dari pengusaha.

Hubungan buruh – pengusaha di zaman ekonomi klasik yang ditandai dengan rezim ekonomi liberal dimana campur tangan intervensi pemerintah sama sekali tidak ada, posisi kaum buruh semakin tertindas, karena pada masa itu buruh adalah dipandang sebagai salah satu faktor produksi yang kualitas dan kuantitasnya ditentukan oleh kekuatan Permintaan-penawaran (supply Demand)

Buruh, pada masa kini, pada saat dunia berfahamkan ideologi kapitalisme modifikasi, yang ditandai dengan adanya campur tangan pemerintah dalam hubungan buruh-pengusaha, mulai mengakomodir keberadaan buruh ketempat yang lebih baik. Buruh pada saat ini, di negara-negara maju, diposisikan sebagai asset perusahaan. Kalau dulu tujuan perusahaan adalah untuk mendapatkan laba maksimum maka saat ini tujuan perusahaan yang paling utama adalah kesejahteraan karyawan.Dengan posisi sebagai asset, buruh mempunyai daya tawar (bargaining) yang cukup kuat dengan pengusaha.Apalagi ada kebijakan yang memungkinkan buruh untuk ikut serta dalam kepemilikan saham.Tentu saja kondisi ini hanya berlaku di negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa.

Bagaimana di Indonesia yang merupakan kelompok negara berkembang ?, posisi buruh di Indonesia secara faktual masih dianggap sebagai salah satu produksi . posisi buruh masih tetap lemah walaupun beberapa instrumen peraturan perundangan telah dibuat oleh pemerintah. Berbagai kelemahan daya tawar buruh dapat dilihat dari alotnya pembahasan berbagai bentuk upah yang dengan mudah ditebak, selalu dimenangkan oleh kepentingan pengusaha. Demikian juga tuntutan-tuntutan terhadap hak-hak normatif buruh seperti kesejahteraan dan peningkatan kualitas kerja, hasilnya sering dikompromikan sesuai dengan keinginan pengusaha.

Dari pengamatan terhadap berbagai gerakan demonstrasi buruh yang sering terjadi di Kota Batam dan kota lainnya di Indonesia, ada beberapa kelemahan yang cukup signifikan yang dihadapi oleh kelompok buruh. Pertama, secara organisasi, kesadaran berserikat dikalangan anggota buruh masih sebatas ikut-ikutan tanpa mengerti arti substansi pergerakan buruh, yang ditandai misalnya pengurus serikat buruh di Indonesia pada umumnya di ikuti hanya pekerja level terbawah sampai mandor (foreman), dan kondisi ini berbeda dengan negara tetangga, dimana serikat pekerjanya (union) juga melibatkan

para manajer menengah dan manajer puncak, yang secara intelektual dan teknis mereka cukup menguasai permasalahan perburuhan dan perusahaan. Faktor internal lainnya adalah tidak adanya hubungan dan koordinasi yang harmonis diantara serikat buruh yang ada, mereka cenderung mempunyai platform perjuangan yang berbeda-beda jadi ketika satu serikat buruh mengendakan suatu aksi, serikat buruh lainnya tidak mendukung dan ada kesan merasa diremehkan.

Disisi lain, pengusaha yang memiliki penguasaan modal dan kekuasaan, melihat perpecahan antara serikat buruh merupakan suatu yang diharapkan.bagaimana tidak, dalam keadaan kompak dan bersatu pun, pengusaha memiliki peluang yang cukup besar untuk memenangkan konflik kepentingan buruh-pengusaha.

Karakteristik serikat buruh di Kota Batam adalah cenderung lebih mengutamakan jalan mogok daripada menempuh jalan berunding.Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan pengurus serikat pekerja kurang memiliki pengetahuan yang baik tentang permsalahan ekonomi dan tentunya filosofi pergerakan buruh.Yang menjadi masalah adalah sebagian besar pengurus serikat pekerja tersebut tidak profesional di bidangnya, tidak mempunyai latar

belakang perjuangan serikat bekerja, tidak mempunyai program kerja dan sasaran yang jelas, tidak mempunyai kemampuan negosiasi.Banyak kasus-kasus yang terjadi mengindikasikan bahwa "perjuangan" mereka sangat diragukan untuk kepentingan pekerja.Sebagian mempunyai muatan politik, sebagian lagi lebih menonjolkan kepentingan pribadi. Tingkah laku serikat pekerja sekarang ini bukan saja terkesan menakutkan, akan tetapi dalam jangka panjang dapat merusak disiplin dan etos kerja para karyawan. Pengalaman para pengusaha di Amerika Serikat dan Eropa menghadapi perilaku serikat pekerja seperti itu dalam awal tahun 1970-an adalah menciptakan teknologi yang sangat sedikit menggunakan tenagakerja.Hal seperti itu dapat ditiru di Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu prioritas utama ketenagakerjaan sekarang ini adalah pembekalan dan pemberdayaan para pemimpin serikat pekerja, supaya betul-betul mempunyai idealisme memperjuangkan kepentingan pekerja, memahami perjuangan serikat pekerja, mempunyai profesionalisme dalam mencapai sasaran organisasi, serta dapat menjadi mitra pengusaha menciptakan hubungan industrial yang harmonis supaya dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

POTRET TENAGA KERJA KOTA BATAM

Ditengah ramainya argumen-argumen kuantitatif dalam konteks Free Trade Zone, yang kebanyakan berkisar masalah pertumbuhan ekonomi, tingkat investasi, penyerapan tenaga kerja, PDRB dan indikator-indikator statistik lainnya, ada baiknya kita sedikit memberi perhatian terhadap masalah kualitatif yang selama ini belum pernah tersentuh yaitu mengenai permasalahan tenaga kerja di Kota Batam.Meskipun Kota Batam diposisikan sebagai kawasan Industri dan Investasi dengan keunggulan bersaing dalam hal letak strategis dan tenaga kerja murah, namun ada baiknya permasalahan kualitas tenaga kerja mulai dipikirkan dari sekarang. Jika ini dibiarkan, ini akan menjadi suatu paradoks dalam era Free Trade Zone. Disatu sisi tingkat pertumbuhan ekonomi, industri dan investasi meningkat pesat namun disisi lain tenaga kerja lokal terpuruk dan tidak mampu bersaing secara kualitas dengan pekerja asing. Namun secara psikologis, kebijakan untuk meningkatkan kualitas pekerja akan

menghadapi suatu tembok besar. Dan tembok itu bernama *ancaman hengkangnya investor asing*. Karena baik secara langsung ataupun tidak langsung, upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal pasti terkait dengan *cost* yag dikeluarkan oleh perusahaan investor

Kondisi aktual yang terjadi di Batam saat ini adalah, tenaga kerja lokal yang ada dirasakan belum mampu mendukung pengembangan kota Batam sebagai daerah industri. Ini diindikasikan dari masih begitu banyaknya permasalahan-permasalahan yang menyangkut SDM atau masalah ketenagakerjaan.

Permasalahan tenaga kerja di Batam semakin lama semakin kompleks, yang bukan sebatas permasalahan keterbatasan tenaga kerja secara kualitas, tapi juga secara kuantitas. Secara umum, kualitas tenaga kerja Batam dianggap masih belum memenuhi standar, ini terlihat dari masih banyaknya tenaga kerja asing (ekspatriat) yang menempati pos-pos kunci di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di berbagai kawasan industri yang ada.

Tulisan ini adalah ringkasan hasil penelitian dengan judul " Daya dukung Sumber daya Manusia Lokal terhadap keberadaan Investasi Asing di Kota Batam" yang memfokuskan perhatian pada peran tenaga kerja local Indonesia di perusahaan Investasi asing yang di Batam jumlahnya sangat banyak, disamping itu penelitian ini mencoba memotret karakteristik pekerja local dan juga pekerja asing yang banyak bekerja di Perusahaan Investasi asing di Batam.

A. Tenaga Kerja Berdasarkan Jabatan, Pendidikan Dan Jenis Kelamin

Jumlah tenaga kerja baik lokal maupun ekspatriat yang bekerja di Batam menunjukkan perbandingan sebesar 1: 59 yang artinya setiap 1 orang tenaga ekspatriat dalam satu perusahaan terdapat 59 orang tenaga kerja lokal. Sedang untuk pendidikan tenaga kerja yang telah bekerja pada berbagai perusahaan tersebut sebagian besar yaitu 76,1% berpendidikan SLTA. Hal ini akan sangat mendukung terhadap perkembangan Batam sebagai daerah Industri karena diharapkan dengan pendidikan yang baik akan lebih mudah

menerima dan mengembangkan transfer teknologi yang baru. Hanya untuk jabatan-jabatan utama masih terlihat di dominasi oleh tenaga kerja ekspatriat, dibuktikan bahwa 65 % posisi Top Manager diisi oleh ekspatriat dan 35 % posisi Mid Manager diisi oleh tenaga kerja lokal sebaliknya untuk tenaga pelaksana lebih didominasi oleh tenaga kerja lokal. Untuk kategori gender secara umum tenaga kerja di Batam dipenuhi oleh tenaga kerja wanita 61,8 % dan laki-laki 38,2 % (untuk perusahaan Elektronik). Namun demikian untuk kelompok-kelompok perusahaan tertentu hal ini cukup mencolok perbedaannya, hal ini sangat bisa dimaklumi karena ada kelompok perusahaan/ pekerjaan tertentu yang lebih efektif dan efisien bila dikerjakan oleh tenaga kerja laki-laki dan ada kelompok perusahaan / pekerjaan tertentu yang lebih efektif dan efisien bila dikerjakan oleh tenaga kerja perempuan.

B. Kemampuan Managerial Tenaga Kerja Lokal Dan Ekspatriat

Dari penelitian terhadap sampel yang ada dapat dikatakan bahwa pada perusahaan-perusahaan elektronik, tenaga kerja lokal mempunyai kemampuan managerial sebagai berikut : tenaga kerja laki-laki mempunyai kemampuan kepemimpinan 4,1 %, kemampuan

perencanaan 3,9 %, kemampuan analisis 3,8 %, dan kemampuan operasioanal 13,7 %. Sedangkan tenaga kerja wanita mempunyai kemampuan kepemimpinan 0,2 %, kemampuan perencanaan 0,1 %, kemampuan analisis 0,1 %, dan kemampuan operasional 74,1 %.

Sementara itu tenaga kerja ekspatriat mempunyai kemampuan managerial sebagai berikut : tenaga kerja laki-laki mempunyai kemampuan kepemimpinan 20,6 %, kemampuan perencanaan 27,9 %, kemampuan analisis 16,2%, dan kemampuan operasioanal 23,5 %. Sedangkan tenaga kerja wanita mempunyai kemampuan kepemimpinan 2,9 %, kemampuan perencanaan 2,9 %, kemampuan analisis 2,9 %, dan kemampuan operasioanal 2,9 %.

Pada perusahaan-perusahaan Perkapalan yang diperoleh untuk kemampuan managerial adalah sebagai berikut : tenaga kerja laki-laki mempunyai kemampuan kepemimpinan 4,6 %, kemampuan perencanaan 4,20 %, kemampuan analisis 3,9 %, dan kemampuan operasional 86,1 %. Sedangkan tenaga kerja wanita mempunyai kemampuan kepemimpinan 0,2 %, kemampuan perencanaan 0,2 % , kemampuan analisis 0,2 %, dan kemampuan operasioanal 0,5%.

Sementara itu tenaga kerja ekspatriat mempunyai kemampuan managerial sebagai berikut : tenaga kerja laki-laki mempunyai kemampuan kepemimpinan 21,2 %, kemampuan perencanaan 21,2 %, kemampuan analisis 15,2 %, dan kemampuan operasioanal 42,4 %. Sedangkan tenaga kerja wanita mempunyai kemampuan kepemimpinan 0 %, kemampuan perencanaan 0%, kemampuan analisis 0 %, dan kemampuan operasioanal 0 %.

Pada perusahaan-perusahaan Jasa, data kemampuan managerial yang diperoleh adalah sebagai berikut : tenaga kerja laki-laki mempunyai kemampuan kepemimpinan 16,1 %, kemampuan perencanaan 10,9 %, kemampuan analisis 8,5 %, dan kemampuan operasioanal 37,4 %. Sedangkan tenaga kerja wanita mempunyai kemampuan kepemimpinan 4,5 %, kemampuan perencanaan 2,1 %, kemampuan analisis 5,2 %, dan kemampuan operasional 15,2 %.

C. Keragaman Etnis Tenaga Kerja Di Batam

Etnis Tenaga kerja lokal di Batam dibedakan 4 (empat) kelompok besar yaitu dari etnis Jawa dan Sunda, Etnis Melayu

(masyarakat tempatan), Etnis Sumatera dalam hal ini diwakili oleh Batak dan Minang serta etnis lainnya selain ketiga kelompok diatas, yang termasuk dalam kelompok keempat ini adalah Etnis di Sumatera selain Batak/Minang, etnis di Kalimantan, Etnis Bali, Sunda, Lombok, Flores, Maluku, Sulawesi, Irian dan lain-lainnya.

Sedangkan untuk tenaga ekspatriat dibedakan atas 5 (lima) kelompok yaitu dari warga negara Singapura, Jepang, Amerika/ Eropa, Malaysia/ Philipina serta kelompok selain keempat kelompok tersebut.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk tenaga kerja lokal didominasi oleh tenaga kerja dari etnis Jawa sebesar 51,65 %, sedang etnis Sumatera sebesar 30,75 %, etnis Melayu (masyarakat tempatan) sebesar 6,47 % dan etnis lainnya sebesar 15,40 %. Hal ini berlaku umum pada perusahaan-perusahaan tempat penelitian.

Tenaga ekspatriat paling banyak berasal dari Jepang sebesar 64.15 %, Malaysia/ Philipina sebesar 13.1 %, Amerika/Eropa sebesar 4.5 % dan Singapura 13.21 %, lainnya 3.26%. Hal inipun juga terjadi baik pada Perusahaan elektronik, perkapalan maupun jasa.

Untuk Tenaga kerja lokal secara umum sebagian besar etnis Jawa menempati posisi/ jabatan teknisi dan operator sebesar 52.76. % , sebagian besar etnis Minang/ Batak menempati posisi/ jabatan operator sebesar 28.5 %, sebagian besar etnis Melayu menempati posisi/ jabatan operator sebesar 4 % dan etnis lainnya menempati posisi/ jabatan operator sebesar 5.7 %.

D. Usia Tenaga Kerja.

Dari sejumlah tenaga kerja yang ada baik tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja ekspatriat, sebagian besar yaitu 78.7 % berumur kurang 25 tahun. Dari hasil studi ini bisa kita ketahui bahwa untuk level tertentu yaitu Top Manager, Mid Manager di dominasi tenaga kerja yang telah cukup matang usianya baik berasal dari tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja ekspatriat. Sedang untuk level Yunior manajer, Line supervisor , dan lainnya didominasi oleh tenaga kerja muda yaitu usia dari 25 sampai 40 tahun sebanyak 15.6 %.

Sebagai daerah yang ditetapkan sebagai kawasan industri yang sekaligus merupakan kawasan *borderless,* daya dukung sumber daya

manusia untuk memenuhi kebutuhan permintaan tenaga kerja memiliki potensi yang besar dalam hal jumlah (kuantitas). Hal ini tampak dari tingkat pertumbuhan penduduk yang pada akhir semester kedua tahun 2001 diprediksikan mencapai pertumbuhan lebih dari dua kali lipat dibanding semester pertama tahun yang sama.

Potensi yang besar dalam hal jumlah ternyata tidak diikuti dalam hal jenis (kualitas) sumber daya manusianya. Indikasi dari hal tersebut adalah adanya angka koefisien korelasi pertumbuhan penduduk yang besarnya hanya 15,44 % (0,1544), yang menunjukkan bahwa setiap pertambahan 100 orang penduduk baru, yang terserap dalam lapangan kerja hanya 15 orang saja.

Selain indikasi yang ditunjukkan diatas, tampak juga dari jenis lapangan kerja yang menyerap tenaga kerja ternyata 70 %-nya ada pada kesempatan kerja yang membutuhkan ketrampilan teknis serta lebih dari 83 % kesempatan kerja untuk tenaga kerja berlevel paling rendah (lowest managerial level), 16 % tenaga kerja berlevel menengah dan sisanya (hanya 1 %) pada level atas (top).

Apa yang Harus dilakukan ?

Proses pemberdayaan tenaga kerja secara kualitatif baik keterampilan teknis, human relation dan keterampilan manajerial setidaknya harus melibatkan pemerintah (dalam hal ini Pemko Batam dan Otorita batam) dan Pihak Pengusaha/investor. Perlu diakui, bahwa ada sebagian perusahaan investor yang mempunyai program peningkatan kualitas tenaga kerja lokal melalui inhouse training dan program magang ke negara asal investor namun jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja lokal yang ada, dan pada kenyataannya sebagian besar perusahaan investor tidak mempunyai program peningkatan kualitas tenaga kerja. Dalam hal ini peran pemerintah sangat diperlukan.

Keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) Karya Bangsa yang berdiri sejak tahun 1999, merupakan suatu solusi tepat.Namun sampai saat ini belum mampu berkiprah banyak karena terus dililit masalah kekurangan pendanaan. Kedepan, BLK Karya Bangsa diharapkan sudah mampu menjadi *agen of change* tenaga kerja lokal sebagaimana yang tertuang dalam cita-cita luhur pendirian BLK Karya

Bangsa tersebut yaitu, ***menjadikan tenaga kerja Indonesia menjadi tuan dinegerinya sendiri.***

Posisi BLK Karya Bangsa menjadi begitu sentral karena stake holdernya adalah Pemko Batam, Otorita Batam dan Departemen Tenaga Kerja.Hal ini merupakan kekuatan tersendiri untuk dapat membuat regulasi masalah ketenagakerjaan terhadap para investor asing yang menanamkan modalnya di Kota Batam. Namun semuanya diserahkan kepada pemerintah, karena aspek tenaga kerja adalah pembahasan ekonomi makro yang kebijakannya diambil oleh pemerintah atau kondisi ini memang sengaja diciptakan demi " *terciptanya stabilitas iklim investasi asing*" yang kondusif dan menarik. Semoga tidak…

MENCARI SOLUSI PENGUPAHAN YANG ADIL

Latar belakang

Secara teori ekonomi, baik kapitalis maupun sosialis, persoalan kepentingan pengusaha dan pekerja tidak pernah akan mencapai kata sepakat jika tidak di intervensi oleh pemerintah, oleh sebab itu di dalam setiap Negara yang menganut faham demokrasi kapitalis seperti Indonesia sudah selayaknya peran pemerintah baik sebagai stabilisator maupun sebagai penggerak sangat vital perannya dalam berbagai kebijakan terutama mengenai ekonomi tenaga kerja sebagaimana peran pemerintah menggerakkan program menuntaskan kemiskinan dan kebodohan.

Upah tenaga kerja secara teori dapat ditentukan melalui 3 (tiga) metode yaitu berdasarkan hukum pasar (interaksi supply dan demand), kemampuan finansial perusahaan dan berdasarkan biaya hidup. Di Indonesia, secara umum upah buruh baik UMK (upah minimum Kota) maupun UMS (Upah Minimum Sektoral) ditentukan berdasarkan tingkat biaya kebutuhan hidup. Tingkat kebutuhan Biaya Hidup yang merupakan refleksi dari pengeluaran konsumsi pekerja, yang saat ini di implikasikan menjadi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) . Dari besaran angka KHM yang didapat kemudian secara

bersama-sama dibahas dan dirundingkan oleh pihak serikat pekerja, asosiasi pengusaha dan pemerintah yang kemudian menghasilkan Upah Minimum Kota/Kabupaten.

Di beberapa negara seperti China dan Vietnam, Upah minimum sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah. Uniknya lagi, di China dan Vietnam, mempunyai struktur upah minimum yang berstandard ganda, yaitu upah minimum yang tinggi untuk perusahaan investasi asing dan sebaliknya untuk perusahaan domestik. Di Indonesia, penetapan upah minimum ditentukan dengan mempertimbangan faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, perbandingan dengan daerah lain dan Indeks Harga Konsumen, yang setiap besaran Upah minimum berbeda disetiap kota/kabupaten tergantung pada kondisi daerah yang bersangkutan. Sebagai perbandingan: untuk tahun 2015, Upah minimum Kota Batam adalah sebesar Rp. 2.685.000, sedangkan di Kabupaten Karimun sebesar Rp. 2.100,000, Kabupaten Natuna Rp. 2,020,000 Kabupaten Bintan Rp. 2.300.000, Kabupaten Lingga Rp. 1.970,000 dan Kota Tanjung Pinang Rp. 1.950.000 dan kabupaten Anambas Rp.2.118.000

Upah Minimum Kota/Kabupaten di Indonesia yang ditetapkan biasanya berlaku untuk satu tahun, namun di negara lain seperti Malaysia, Vietnam dan China, Upah Minimum biasanya berlaku untuk minimal 5 (lima) tahun yang kemudian akan diadakan revisi bila dibutuhkan. Upah minimum yang mempunyai jangka waktu lebih panjang, biasanya menunjukkan kondisi stabilitas ekonomi suatu negara. Berbagai keuntungan dari Upah minimum yang relatif panjang yaitu memberikan kepastian kepada investor asing mengenai upah tenaga kerja yang stabil dan memberikan rasa aman

investor asing dari ancaman demonstrasi buruh yang biasanya selalu dikhawatirkan oleh pengusaha investor asing.

Upah Minimum secara filosofi adalah suatu jaring pengaman (safety net) yang paling terendah yang harus dibayarkan kepada buruh. Dengan perkataan lain, Upah minimum merupakan upah yang paling terendah yang boleh dibayarkan pengusaha yang mempunyai batasan untuk seorang pekerja yang yang bekerja selama 0 tahun dan berstatus lajang. Dari Batasan ini, maka perhitungan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) pun diasumsikan sebagai kebutuhan hidup minimum seorang pekerja lajang dalam 1 (satu) bulan. Dalam Penetapan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) ada 4 (empat) komponen utama yaitu Makanan dan Minuman, Perumahan dan Fasilitas, Sandang dan Aneka Kebutuhan. Di Indonesia, Penetapan Kebutuhan hidup Minimum didapatkan melalui survey yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota yang dilakukan di pasar-pasar terpilih yang biasanya tempat pekerja berbelanja kebutuhan hidup. Survey KHM dilakukan secara periodik per bulan

Persoalan saat ini

Bagi negara-negara yang kondisi ekonominya relatif stabil yang ditandai dengan nilai kurs yang relatif stabil, dan tingkat inflasi yang moderat serta investasi sosial pemerintah yang terencana. Permasalahan besaran angka bukan menjadi persoalan pokok. UMK kota Batam pada tahun 2015 yang sebesar Rp. 2.685.302 menurut pengamatan kami, digerogoti oleh dua komponen pengeluaran buruh

yang dominan yaitu komponen transportasi dan perumahan yang mengambil porsi sekitar 50 %. Hal ini terkadang diperparah dengan kenaikan harga komponen lainnya seperti makanan dan minuman dan sandang serta aneka kebutuhan. Disamping itu kondisi ekonomi makro indonesia seperti kenaikan BBM dan kebijakan tata niaga perdagangan semakin mengurangi kekuatan upah yang diterima buruh. Faktor-faktor ketidakstabilan harga, moda transportasi yang mahal dan tentu saja iklim ekonomi makro nasional yang saat ini gonjang-ganjing yang akhirnya mempengaruhi kekuatan upah yang diterima oleh pekerja. Menghadapi berbagai perubahan-perubahan dalam indikator ekonomi seperti tingkat inflasi, kenaikan BBM dan indikator lainnya, beberapa perusahaan biasanya melakukan penyesuaian tingkat upah pekerjanya. Namun dari hasil pengamatan dilapangan, lebih banyak perusahaan tetap mempertahankan Upah minimum yang telah ditetapkan walaupun terjadi perubahan-perubahan dalam tingkat harga konsumsi dan BBM.

Dari uraian diatas, kita melihat bahwa memang tidak ada jalan keluar (way out) permasalahan apabila persoalan ini diserahkan hanya kepada perundingan buruh dan pengusaha. Persoalan besar dalam Upah minimum kota batam sebenarnya sudah diidentifikasikan yaitu komponen perumahan dan transportasi yang menjadi faktor inflatoir yang menggeroti upah buruh. Solusi yang paling realistik adalah adanya intervensi Pemerintah Kota Batam dalam bentuk investasi publik dalam penyediaaan sarana trasportasi dan perumahan murah bagi pekerja yang merupakan 80 % penduduk Kota Batam.

Pemerintah kota Batam tidak boleh melupakan perannya sebagai stabilitasator dalam pembangunan masyarakat. Disamping itu Pemerintah kota batam dalam menyikapi ketidak pastian ekonomi nasional, harus menyiapkan dana-dana darurat dalam APBD-nya yang biasanya ada dalam pos anggaran tak tersangka yang tujuan penggunaannya ditujukan untuk penanggulangan bencana alam, dan penanggulangan akibat krisis ekonomi yang bisa berbentuk dalam intervensi pasar dan subsidi.

Harapan Baru setelah PP No.78 tahun 2015

Pada bulan Oktober 2015 Pemerintah telah mengeluarkan PP No.78 tahun 2015 tentang pengupahan yang merupakan penjabaran detail dari pasal 97 UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Dalam PP ini ada aturan terbaru dan tentunya menantang yaitu digunakannya variabel angka inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai variabel utama dalam perhitungan kenaikan upah minimum. Menurut penjelasan PP 78 Tersebut

Formula perhitungan Upah minimum:
UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % Δ PDBt)}
Keterangan:
UMn : Upah minimum yang akan ditetapkan.
UMt : Upah minimum tahun berjalan.
Inflasit : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.

Δ PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang
Mencakup periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II tahun berjalan.

Formula perhitungan Upah minimum adalah Upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun berjalan.

Contoh:
UMt : Rp. 2.000.000,00

Inflasit : 5%

Δ PDBt: 6%

UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % Δ PDBt)}
UMn = Rp. 2.000.000,00 + {Rp. 2.000.000,00 x (5% + 6%))
= Rp. 2.000.000,00 + {Rp. 2.000.000,00 x 11%} = Rp. 2.000.000,00 + Rp. 220.000,00
= Rp. 2.220.000,00

Upah minimum tahun berjalan sebagai dasar perhitungan Upah minimum yang akan ditetapkan dalam formula perhitungan Upah minimum, sudah berdasarkan kebutuhan hidup layak.

Penyesuaian nilai kebutuhan hidup layak pada Upah minimum yang akan ditetapkan tersebut secara langsung terkoreksi melalui perkalian antara Upah minimum tahun berjalan dengan inflasi tahun berjalan.

UMK Kota dan Kabupaten Prov. Kepri Tahun 2016 Berdasarkan PP No.78/2015

NO	KABUPATEN - KOTA	UMK		KENAIKAN	
		2016	2015	Rp	Persen
1	Kabupaten Anambas	2.425.110	2.118.000	307.110	14,50%
2	Kabupaten Karimun	2.418.254	2.100.000	318.254	15,15%
3	Kota Tanjungpinang	2.179.825	1.950.000	229.825	11,79%
4	Kabupaten Bintan	2.645.017	2.300.000	345.017	15,00%
5	Kabupaten Lingga	2.201.010	1.970.000	231.010	11,73%
6	Kabupaten Natuna	2.252.300	2.020.000	232.300	11,50%
7	Kota Batam :				
	A. UMK Batam	2.994.111	2.685.000	309.111	11,51%
	B. Upah Minimum Kelompok I	-	2.873.273	-	-
	C. Upah Minimum Kelompok II	-	2.715.565	-	-
	D. Upah Minimum Kelompok III	-	2.689.196	-	-

Upah minimum yang dikalikan dengan inflasi ini akan memastikan daya beli dari Upah minimum tidak akan berkurang. Hal ini didasarkan jenis-jenis kebutuhan yang ada dalam kebutuhan hidup layak juga merupakan jenis-jenis kebutuhan untuk menentukan inflasi. Dengan demikian penggunaan tingkat inflasi dalam perhitungan Upah minimum pada dasarnya sama dengan nilai kebutuhan hidup layak.

Penyesuaian Upah minimum dengan menggunakan nilai pertumbuhan ekonomi pada dasarnya untuk menghargai peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Dalam pertumbuhan ekonomi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain peningkatan produktivitas, pertumbuhan tenaga kerja, dan pertumbuhan modal.

Dalam formula ini, seluruh bagian dari pertumbuhan ekonomi dipergunakan dalam rangka peningkatan Upah minimum.
Dalam hal ini yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto

KHL (Kebutuhan Hidup Layak)

Komponen KHL :

Jumlah jenis kebutuhan yang semula 46 jenis dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 17 tahun 2005 menjadi 60 jenis KHL dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 tahun 2012. Dan menurut PP 78 akan ditinjau kembali setiap 5 tahun sekali oleh Dewan Pengupahan Nasional.

Persoalan yang dihadapi :

1. Tidak adanya jaminan dari pemerintah tentang stabilitas harga –harga bahan pokok
2. Kurang akuratnya data-data yang dikeluarkan oleh pemerintah baik tentang laporan kinerja ekonomi maupun non ekonomi seperti data inflasi, pertumbuhan ekonomi. Struktur dan besaran perusahaan, tingkat kemiskinan dan lain-lain
3. Kurangnya rasa kepedulian birokrasi dan DPRD tentang situasi ketenaga kerjaan
4. Kurang stabilnya kondisi makroekonomi dan mikroekonomi indonesia

KONDISI PENGUPAHAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Upah Minimum secara filosofi adalah suatu jaring pengaman (safety net) yang paling terendah yang harus dibayarkan kepada buruh. Dengan perkataan lain, Upah minimum merupakan upah yang paling terendah yang boleh dibayarkan pengusaha yang mempunyai batasan untuk seorang pekerja yang yang bekerja selama 0 tahun dan berstatus lajang. Dari Batasan ini, maka perhitungan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) pun diasumsikan sebagai kebutuhan hidup minimum seorang pekerja lajang dalam 1 (satu) bulan. Dalam Penetapan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) ada 4 (empat) komponen utama yaitu Makanan dan Minuman, Perumahan dan Fasilitas, Sandang dan Aneka Kebutuhan. Di Indonesia, Penetapan Kebutuhan hidup Minimum didapatkan melalui survey yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kab/Kota yang dilakukan di pasar-pasar terpilih yang biasanya tempat pekerja berbelanja kebutuhan hidup. Survey KHM dilakukan secara periodik per bulan

Upah tenaga kerja secara teori dapat ditentukan melalui 3 (tiga) metode yaitu berdasarkan hukum pasar (interaksi supply dan demand), kemampuan finansial perusahaan dan berdasarkan biaya hidup (Cost of Living). Di Indonesia, secara umum upah buruh baik

UMK (upah minimum Kota) maupun UMS (Upah Minimum Sektoral) ditentukan berdasarkan tingkat biaya kebutuhan hidup dan beberpa variable lainnya. Tingkat kebutuhan Biaya Hidup yang merupakan refleksi dari pengeluaran konsumsi pekerja, yang saat ini di implikasikan menjadi Kebutuhan Hidup Minimum (KHL) . Dari besaran angka KHM yang didapat kemudian secara bersama-sama dibahas dan dirundingkan oleh pihak serikat pekerja, asosiasi pengusaha dan pemerintah yang kemudian menghasilkan Upah Minimum Kota/Kabupaten.

Di beberapa negara seperti China dan Vietnam, Upah minimum sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah. Uniknya lagi, di China dan Vietnam, mempunyai struktur upah minimum yang berstandard ganda, yaitu upah minimum yang tinggi untuk perusahaan investasi asing dan sebaliknya untuk perusahaan domestik. Di Indonesia, penetapan upah minimum ditentukan dengan mempertimbangan faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, perbandingan dengan daerah lain dan Indeks Harga Konsumen, yang setiap besaran Upah minimum berbeda disetiap kota/kabupaten tergantung pada kondisi daerah yang bersangkutan. Sebagai perbandingan: untuk tahun 2008, Upah minimum Kota Batam adalah sebesar Rp. 960,000, sedangkan di Kabupaten Karimun sebesar Rp. 839,500, Kabupaten Natuna Rp. 557,000 Kabupaten Bintan Rp. 834,500, Kabupaten Lingga Rp. 557,000 dan Kota Tanjung Pinang Rp. 835,000

Variabel-Variabel Penentu Upah (UMP/UMK) :

a. Kebutuhan Hidup Layak
b. indeks harga konsumen(IHK);
c. kemampuan,perkembangan dan kelangsungan perusahaan;
d. upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah ;
e. kondisi pasar kerja;
f. tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita.

Untuk Penetapan UMS, Pembahasan nya ditambah variable sebagai berikut :
(a). homogeneitas perusahaan;
(b). jumlah perusahaan;
(c). jumlah tenaga kerja;
(d). devisa yang dihasilkan;
(e). nilai tambah yang dihasilkan;
(f). kemampuan perusahaan;
(g). asosiasi perusahaan;
(h). serikat pekerja terkait;

REKAPITULASI UMK, UMP DAN UMS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	KAB/KOTA	BESARAN	TAHUN	KET
1	KOTA BATAM	Rp 635,000.00	2005	UMK
2	KOTA TANJUNGPINANG	Rp 576,000.00	2005	UMK
3	KABUPATEN KARIMUN	Rp 577,500.00	2005	UMK
5	KABUPATEN LINGGA	Rp 557,000.00	2005	UMK
6	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Rp 760,000.00	2006	UMP
7	KOTA BATAM	Rp 815,000.00	2006	UMK
8	KABUPATEN KARIMUN	Rp 766,000.00	2006	UMK
9	KABUPATEN NATUNA	Rp 767,000.00	2006	UMK
10	KOTA TANJUNGPINANG	Rp 767,000.00	2006	UMK
11	KAB. KEPULAUAN RIAU	Rp 767,000.00	2006	UMK
12	KABUPATEN LINGGA	Rp 760,000.00	2006	UMK
13	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Rp 805,000.00	2007	UMP
14	KABUPATEN BINTAN	Rp 805,000.00	2007	UMK
15	KOTA TANJUNGPINANG	Rp 805,000.00	2007	UMK
16	KABUPATEN NATUNA	Rp 817,000.00	2007	UMK
17	KABUPATEN KARIMUN	Rp 818,000.00	2007	UMK
18	KOTA BATAM	Rp 860,000.00	2007	UMK
19	KABUPATEN LINGGA	Rp 805,000.00	2007	UMK
20	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Rp 833,000.00	2008	UMP
21	KABUPATEN BINTAN	Rp 834,000.00	2008	UMK
22	KOTA TANJUNGPINANG	Rp 835,000.00	2008	UMK
23	KABUPATEN KARIMUN	Rp 839,000.00	2008	UMK
24	KOTA BATAM	Rp 960,000.00	2008	UMK
25	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	Rp 557,000.00	2005	UMP

REKAPITULASI UMS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	KAB/KOTA	BESARAN	TAHUN	KET
1	KOTA BATAM	Rp 886,000.00	2006	UMS IIND. BERAT
2	KOTA BATAM	Rp 690,500.00	2005	UMS IND. BERAT
3	KOTA BATAM	Rp 700,000.00	2005	UMS PARIWISATA
4	KOTA BATAM	Rp 926,000.00	2007	UMS IND. LOGAM
5	KABUPATEN KARIMUN	Rp 880,950.00	2008	UMS GRANIT
6	KABUPATEN NATUNA	Rp 1,150,000.00	2007	UMS MIGAS
7	KABUPATEN NATUNA	Rp 1,300,000.00	2008	UMS MIGAS

Proyeksi Jumlah Penduduk dan Angka Pengangguran Tahun 2006-2010

PROYEKSI PENDUDUK		***PROYEKSI ANGKA PENGANGGURAN***	
Tahun	***Jumlah (Jiwa)***	***Jumlah (Jiwa)***	***Presentase dari Jumlah Penduduk (%)***
Desember 2006	***1.322.644***	***49.599***	***3,75***
Desember 2007	***1.362.323***	***44.276***	***3,25***
Desember 2008	***1.403.143***	***38.588***	***2,75***
Desember 2009	***1.445.289***	***32.519***	***2,25***
Desember 2010	***1.488.647***	***26.051***	***1,75***

Dengan proyeksi kenaikan APBD sebesar sekitar 15% setiap tahunnya, maka angka pengangguran pada tahun 2010 diproyeksikan

tinggal sebesar 26.051 jiwa atau 1,7% dari jumlah penduduk. Suatu angka yang tergolong rendah dan berpeluang besar untuk mendekati 0% dalam 3 tahun berikutnya.

Table : Kontribusi per sector terhadap pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2001-2006

LAPANGAN USAHA	2001	2002	2003	2004	2005	Rata-Rata
1. PERTANIAN	**4.72**	**4.86**	**4.91**	**4.87**	**4.82**	**4.83**
e. Perikanan	3.32	3.44	3.48	3.48	3.48	**3.44**
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	**13.68**	**9.56**	**8.24**	**7.40**	**6.86**	**9.15**
3. INDUSTRI	**62.63**	**65.60**	**66.04**	**66.72**	**67.24**	**65.65**
4. LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	**0.22**	**0.23**	**0.23**	**0.23**	**0.23**	**0.23**
5. BANGUNAN & KONSTRUKSI	**2.48**	**2.58**	**2.64**	**2.63**	**2.61**	**2.59**
6. PERDAG., HOTEL & RESTORAN	**7.48**	**7.89**	**8.19**	**8.19**	**8.20**	**7.99**
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	**3.04**	**3.30**	**3.48**	**3.65**	**3.72**	**3.44**
8. KEU. PERSEWAAN & JASA PERSHN	**3.93**	**4.06**	**4.35**	**4.38**	**4.40**	**4.22**
9. JASA-JASA	**1.82**	**1.92**	**1.94**	**1.93**	**1.93**	**1.91**
PDRB (Dengan Migas)	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**-**

DAFTAR BACAAN

Arief, Sritua. 1993. *Pemikiran Pembangunan dan Kebijaksanaan Ekonomi*. Jakarta, Lembaga Riset Pembangunan

Arief, Sritua. 1998. *Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan*. Jakarta, CIDES

Basyiah, Ali. 1993. *Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan di Daerah*., Jakarta : Bappenas

Baum, Warren C. and Tolbert, Stokes M.2006. *Pelaburan Dalam Pembangunan*. Jakarta : UI Press

Benda, H.J. 1980. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, Terjemahan Daniel Dhakidae. Jakarta: Pustaka Jaya.

Brown, L.R. 1992. *Tantangan Masalah Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Budiman, Arief. 1991. *Negara dan Pembangunan – Studi tentang Indonesia dan Korea Selatan*. Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas

Burmansyah, Edy, 2014. *Rezim Baru ASEAN : Memahami Rantai Pasokan dan Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Yogyakarta : Pustaka Empu

De Soto, Hernando.1992. *Masih Ada Jalan Lain : Revolusi Tersembunyi di Negara Dunia Ketiga*, Jakarta : Buku Obor

Fishlow, Albert. 1980. Rich and Poor Nations in the World Economic. McGrawHill Book Company, New York

Friedman, Thomas L. 2006. *The World is Flat*, Jakarta : Dian Rakyat

Fukuyama, Francis. 2001. *Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*, Yogyakarta : Qalam

Fukuyama, Francis. 2002. *The Great Disruption*, Yogyakarta : Qalam

Fukuyama, Francis. 2005. *Memperkuat Negara : Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21* , Jakarta : Gramedia

Gemmel, Norman. 1992. *Ilmu Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES

Gie, Kwik Kian, 1995. *Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan*, Yogyakarta : Gramedia Pustaka Umum,

Gie, Kwik Kian.1996. *Praktek Bisnis dan Orientasi Ekonomi Indonesia.* Jakarta : Gramedia

Grindele, Marilie, 1980. P*olitics and Policy Implementation in the Third World*, , New Jersey : Princenton Unversity Press

Haq, Mahbub ul. 1983. *Tirai Kemiskinan, Tantangan-Tantangan untuk Dunia Ketiga*, terjemahan Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Harun, Hamrolie. 2005. *Analisis Ketersediaan Dana Pembangunan Daerah*, Yogyakarta : BPFE

Hunger, J. David & Thomas L. Whelen.2001. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta : Penerbit Andi

Jhingan, M.L. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT. Raja Grafisindo

Mubyarto. 1988. *Sistem dan Moral Ekonomi* Indonesia. Jakarta: LP3ES.

Nurdin, Thamrin. 1993. *Profil Sumber Daya dan Kemiskinan Komunitas Desa Nelayan,* Padang: FAPERTA Universitas Andalas,

Ormerod, Paul, 1997, *Matinya Ilmu Ekonomi*, Penyadur, Parakitri T. Simbolon, Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia (KPG)

Sen, Amartya. 2006. *Kekerasan dan Ilusi Tentang Identitas*, Jakarta : Marjin Kiri

Stiglitz, Joseph E, 2005. *Dekade Keserakahan*, Tangerang : Marjin Kiri

Thoha, Miftah. 1991. *Beberapa Aspek kebijaksanaan Birokrasi*. Yogyakarta : PT. Media Widya Mandala

Tjiptoherijanto, Prijono. 1997. *Migrasi, Urbanisasi dan Pasar Kerja di Indonesia*. Jakarta : UI Press

Todaro, Michael P.2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jilid 1, Edisi Ketujuh. Jakarta; Penerbit Erlangga

Wie, Thee Kian. 2004. *Pembangunan, Kebebasan dan Mukjizat Orde Baru*, Jakarta : Freedom Institute

TENTANG PENULIS

ADE PARLAUNGAN NASUTION lebih dikenal publik di Batam sebagai Ade P Nasution. Lahir di Kota Pinang, Sumatera Utara pada 6 Agustus 1968. Ade adalah salah satu Dosen Tetap di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Riau Kepulauan Batam.

Disamping kegiatan akademik rutin di kampus, Ade juga terlibat dalam aktivitas kemasyarakatan baik di pemerintahan maupun di Lembaga Swadaya Masyarakat dan terlibat aktif sebagai pembicara dalam berbagai diskusi-diskusi ilmiah dan berbagai penelitian

Pada 1999 ia bergabung dengan jaringan UNFREL untuk menjamin pelaksanaan Pemilu yang Jujur dan Adil. Terlibat aktif dalam pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Tercatat sebagai Staff Ahli Ekonomi dan Koperasi Ketua DPRD Kota Batam tahun 2001-2003, Staff Ahli Ekonomi dan Tenaga Kerja DPRD Provinsi Kepulauan Riau serta pernah menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam pada tahun 2004. Sementara pada 2005, ia berkiprah sebagai Wakil Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau.

Ade memulai kuliah S-1 nya di Fakultas Ekonomi Universitas Ibn Khaldun Bogor dan melanjutkan studi S-2 pada Program Pasca Sarjana,Universitas

Airlangga, Surabaya dan saat ini sedang menempuh Program Doktor Management di University Tun Hussein Onn (UTHM) Malaysia.

Ade tercatat aktif dalam pengembangan Ekonomi kerakyatan, dengan melakukan survey, pemetaan, advokasi dan pelatihan-pelatihan bagi pelaku ekonomi kerakyatan dan pernah berperan sebagai konsultan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Dinas Koperasi dan UKM Kota Batam.

Di bidang ketenagakerjaan, selain terlibat aktif sebagai anggota Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau yang mengharuskannya melakukan perjalanan survey ke bebagai kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau terutama monitoring pelaksanaan upah, Kebutuhan Hidup layak, dan tentang hubungan industrial, dia juga mempunyai jaringan yang bagus dengan para pimpinan/aktivis buruh/pekerja seperti SPSI, SBSI dan SPMI dan kerap bertindak sebagai narasumber dalam berbagai seminar, workshop dan diskusi tentang ketenagakerjaan dan pengupahan.